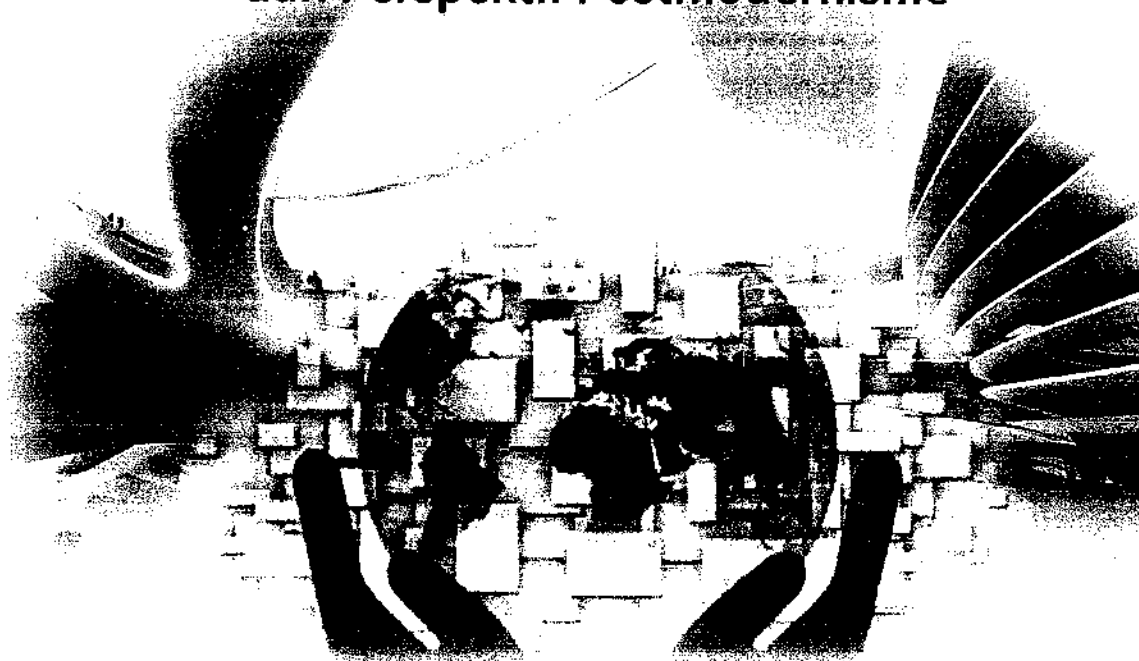


Urbanus Ura Weruin

VISI BARU TENTANG KEBUDAYAAN

**Kritik Terhadap Kebudayaan Modern
dan Perspektif Postmodernisme**



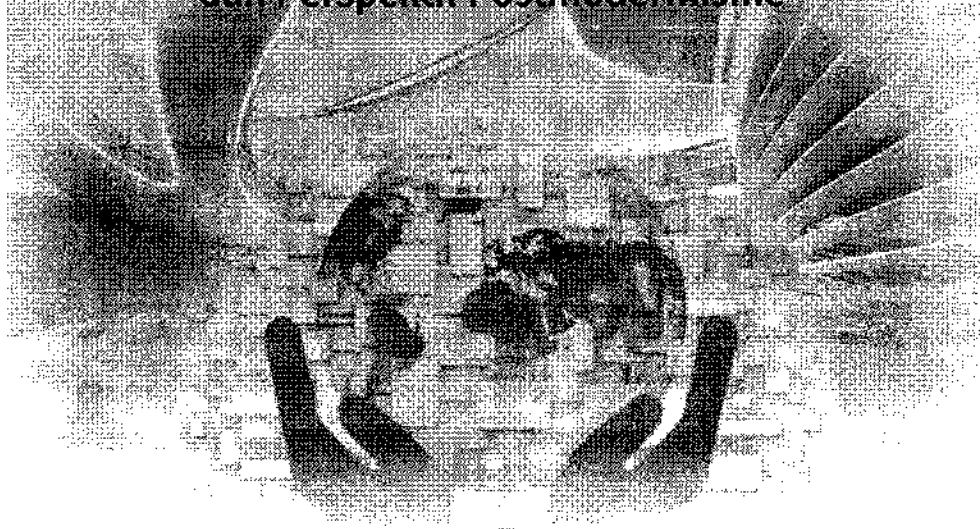
PUSTAKA MANDIRI
Penerbit Buku Super

Urbanus Ura Weruin

Urbanus Ura Weruin
25 Sept 2015

VISI BARU TENTANG KEBUDAYAAN

Kritik Terhadap Kebudayaan Modern
dan Perspektif Postmodernisme



PUSTAKA MANDIRI
Penerbit Buku Super

VISI BARU TENTANG KEBUDAYAAN
Kritik Terhadap Kebudayaan Modern dari Perspektif Postmodernisme
ISBN : 978-602-359-000-1

Desain Sampul dan Tata Letak: Imam Kurnia, S.Pd.

PT Pustaka Mandiri
Jalan Kartika III, Kompleks Puri Kartika AB 19
Tajur, Ciledug, Kota Tangerang
Anggota IKAPI

Katalog dalam Terbitan (KDT)

=====

Urbanus Ura Weruin

Visi Baru Tentang Kebudayaan

Tangerang : Pustaka Mandiri 68 hlm ; 17.5 x 25.5 cm.

Bibliografi: hlm.

ISBN : 978-602-359-000-1

1. Visi Baru Tentang Kebudayaan

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya,
dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin
tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan
untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah.

Isi buku di luar tanggung jawab penerbit.

PENGANTAR

Dewasa ini, di tanah air, semua institusi dan kaum profesional dalam hampir setiap bidang kehidupan berusaha memburu apa yang paling benar, apa yang paling baik, apa yang paling bisa dipercaya, atau apa yang paling 'menyelamatkan'. Sebut misalnya kaum intelektual di perguruan tinggi, politisi di gedung dewan, pengacara dan hakim di ruang sidang, ekonom dan saudagar di pasar, agamawan di ritual keagamaan, semuanya berusaha mencari "mana yang paling baik, mana yang paling tepat, atau mana yang paling benar!". Tentu semua upaya tersebut amat bernilai dalam mengembangkan mutu kehidupan pribadi dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut melahirkan inovasi, kreativitas, dan dinamika kehidupan sosial. Tetapi tidak jarang, dalam pencarian yang penuh dengan intrik, rekayasa, dan manipulasi, yang baik dan benar adalah apa yang mereka anut atau apa yang mereka yakini. Sementara semua yang berbeda dari apa yang mereka yakini dianggap salah, keliru, atau bahkan sesat. Dengan kata lain, acuan yang dipakai untuk menilai mana yang benar dan mana yang salah atau mana yang baik dan mana yang buruk adalah teori, pendapat, argumen, keyakinan, atau nilai yang mereka anut atau tindakan yang mereka pilih. Sikap seperti ini menurut kaum postmodernis, tidak hanya tidak toleran dan anti terhadap keragaman teoretis, nilai, dan praktik sosial melainkan juga intimidatif, absolutis, menindas, dan represif. Menurut kaum postmodernis, praktik-praktik semacam ini merupakan bagian dari model kebudayaan modern yang sudah seharusnya ditinggalkan. Model kebudayaan baru yang diperjuangkan oleh kaum postmodernis melalui pemikiran, gerakan sosial, dan praktik kehidupan sosial adalah model kebudayaan yang menghargai perbedaan, keberagaman, dialog, percakapan, hati nurani, 'relativitas' (bukan relativisme), dan egaliter. Nilai-nilai kebudayaan seperti ini dianggap seharusnya tampil untuk menggantikan praktik budaya yang mengedepankan kesatuan, keseragaman, isolatif, dogmatis, rasional, absolut, bahkan juga totaliter.

Salah satu contoh yang tidak sulit untuk diingat kembali adalah klaim-klaim kebenaran secara sepihak dengan munculnya institusi-institusi 'tandingan' di tanah air: PSSI tandingan, alat kelengkapan DPR tandingan, partai politik tandingan, bahkan sampai dengan 'gubernur tandingan' (Jakarta). Situasi ini semakin diperparah dengan arogansi kekuasaan institusi-institusi penegak hukum dalam kasus 'cicak versus buaya' (dua jilid) dan yang paling akhir Polri versus KPK. Tanpa berpretensi menentukan kelompok mana yang benar dan mana yang salah dalam 'pertandingan' tersebut, tetapi yang menarik untuk diamati adalah bahwa klaim kebenaran argumen atau pendapat yang mereka anut selalu dibangun secara sepihak dari sudut pandang mereka sendiri tanpa sedikitpun mengapresiasi kebenaran dari argumen atau pendapat pihak lain. Pandangan pihak lain seolah tidak memiliki kebenaran apa pun. Yang paling menyedihkan adalah tidak adanya upaya membuktikan secara objektif dan proporsional kebenaran argumen atau pendapat yang dianut sehingga pihak lain dan publik bisa mengapresiasinya. Kebenaran pendapat atau argumen yang dianut suatu kelompok justru dibuktikan dengan menyalahkan pendapat lain yang berseberangan dan bukan

dengan membuktikan kebenaran apa yang mereka anggap benar. Sikap seperti ini tentu tidak hanya tidak objektif, tidak menghargai perbedaan, tidak menghargai keberagaman, melainkan juga mempraktikkan kebudayaan oportunis, represif, subjektif, otoritatif, atau dalam bahasa postmodernisme: fondasional. Kebudayaan fondasional adalah model kebudayaan yang menganggap prinsip, nilai, keyakinan, atau posisi sosial dan politik tertentu (tentu posisi yang dianutnya) sebagai satu-satunya dasar, prinsip, atau nilai yang paling tepat untuk diberlakukan secara universal dan berlaku umum dalam seluruh masyarakat. Dalam bidang pengetahuan, sikap dan budaya fondasional tersebut tampak pada pemutlakan suatu teori atau argumen tertentu sebagai teori atau pendapat yang paling benar dan penolakan terhadap teori atau pendapat lain. Pada hal, dewasa ini semakin disadari bahwa setiap teori atau argumen tidak memonopoli seluruh kebenaran. Kebenaran, termasuk kebenaran ilmu sekalipun, merupakan sebuah kemungkinan yang paling mungkin, sebuah keyakinan yang masih dapat difalsifikasi; karena kebenaran ilmu pengetahuan merupakan hasil proses sintesis dan interpretasi.

Dewasa ini, dalam dunia pendidikan tinggi, peran kaum intelektual yang bergelut dengan 'kebenaran' pun semakin dipertanyakan. Dalam pengantar buku *Beyond Modernism and Postmodernism : essays on the politics of culture* (2002), Maurice R. Berube mengkritik kaum intelektual AS yang dinilainya justru anti intelektual. Cita-cita atau kanon modernis bahwa kaum intelektual seharusnya secara konsisten memerangi anti intelektualisme; memperjuangkan kebenaran terutama berhadapan dengan kekuasaan (power); mempublikasikan karya-karya mereka bagi para pembaca untuk 'mencerdaskan' mereka; mempengaruhi kebijakan publik melalui analisis kritis dan argumentatif yang bisa mereka sumbangkan, dan sebagainya, tidak lagi dapat diharapkan. Semuanya berubah. Tidak hanya bahwa anggapan modernis tentang peran kaum intelektual berubah, melainkan senyatanya peran kaum intelektual memang berubah. Di penghujung abad 20 dan terutama pada abad ini, kaum intelektual lebih sibuk dengan disiplin-disiplin teoretis yang semakin abstrak dan sempit dari pada mencerdaskan massa. Maka yang dibutuhkan adalah dialog. Dialog antar berbagai komponen masyarakat: antara ilmuwan dan politisi, antara para akademisi dan pemerintah, antara dunia usaha dan lembaga pendidikan, antara ilmu dan agama, dan sebagainya. Soalnya adalah bahwa kebenaran bukanlah monopoli satu institusi saja melainkan dimiliki juga oleh institusi dan kelompok lain. Model kebudayaan dialogis yang menghargai keberagaman itulah yang ingin dikembangkan oleh kebudayaan postmodern. Buku ini bermaksud menggeluti visi baru tentang kebudayaan berdasarkan kritik postmodernisme terhadap pemikiran dan praktik kebudayaan modern.

Studi tentang kebudayaan, terutama dari perspektif postmodernisme, menurut hemat saya, selalu menarik untuk diperbincangkan karena pemikiran postmodern menyebar dalam berbagai bidang kehidupan mulai dari bidang seni sampai pada filsafat dan agama. Kebudayaan, termasuk kebudayaan postmodern,

menurut Bell, dewasa ini semakin menentukan dan signifikan tidak hanya dalam imajinasi sang seniman melainkan justru dalam realitas kehidupan sosial sehari-hari.

Maidier Marañia dalam Laporan kertas kerja UNESCO, *Culture and Development: Evolution and Prospect* (2010), menunjukkan bahwa dewasa ini semakin disadari bahwa kemajuan masyarakat bukan sekedar evolusi perkembangan kebudayaan melainkan juga bahwa model kebudayaan tertentu justru melahirkan kemajuan masyarakat. Amartya Sen misalnya mempromosikan pengembangan kapasitas individu dan memperluas pilihan tindakan sebagai syarat mutlak memajukan masyarakat. L. S. Senghor, menegaskan, "Culture is the be all and end all of development".

Tetapi kebudayaan merupakan salah satu topik yang penuh dengan perdebatan dan kontroversi entah dalam arena akademik, sosial, maupun politik. Tidak hanya bahwa kata kebudayaan memiliki berbagai ragam makna melainkan juga muncul istilah, pemikiran, dan praktik-praktik budaya baru seperti budaya massa, budaya populer, keberagaman budaya, budaya post-modern dan sebagainya.

Ben Agger, dalam artikelnya berjudul "Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance", (*Annual Reviews of Sociology*, No. 17, 1991, 105-131), menyatakan bahwa postmodernism merupakan cara baru menteorisasi dan memahami masyarakat kontemporer. Postmodernisme, bersama dengan teori kritis dan post strukturalisme merupakan kritik yang efektif, konstruktif dan inovatif terhadap positivisme, terutama dalam menulis dan membuka ilmu pengetahuan sosial. Paradigma lama berkaitan dengan teori dan pemahaman terhadap kenyataan sosial yang merayakan kepastian, validitas, objektif, kebenaran yang satu, tunggal, dan absolute diganti dengan paradigma baru yang merayakan ketidakpastian, kebergamatan, subjektivitas, serta kebenaran yang beragam, plural, dan relatif. Teori bahkan bukan dilihat sebagai suatu presentasi atau representasi realitas melainkan sebuah cara 'memahami' diantara pemahaman-pemahaman lain tentang realitas.

Ben Agger juga menunjukkan bahwa post modernisme, melalui pemikir-pemikir kuncinya seperti Foucault, Barthes, Lyotard, Rorty, Baudrillard, merupakan sebuah teori tentang masyarakat, kebudayaan, dan sejarah. Inti pokok pandangan postmodernism adalah penolakan terhadap ide dan praktik budaya yang mentotalisasi pemahaman dan pengembangan masyarakat (dalam bidang seni, arsitektur, hukum, agama, politik, filsafat, dan sebagainya) menurut satu pola tunggal yang di universalisasi sehingga berlaku umum (misalnya grand narasi Marxisme). Perspektif post modernisme justru menekankan keberagaman perspektif: kelas, ras, gender, afiliasi kelompok, dan sebagainya.

Dalam bidang kebudayaan, Baudrillard misalnya menyatakan bahwa masyarakat post modern dewasa ini, terutama dalam budaya konsumsi, tidak membeli barang karena 'nilai tukar' atau 'nilai guna' (use value) seperti dig-

gas Marx sebelumnya melainkan karena 'nilai tanda' (sign value). Orang membeli jeans Levis atau mobil Honda bukan karena nilai guna barang tersebut sebagai pakaian atau alat transportasi melainkan karena nilai tanda dari pakaian dan mobil tersebut sebagai status sosial. Tanda bukanlah realitas melainkan mewakili realitas. Baudrillard kemudian menyebutnya sebagai hiper realitas; realitas simulatif; realitas yang dikonstruksikan oleh kekuatan media dan sumber kultural lain termasuk politik dan ekonomi. Celaknya masyarakat dewasa ini tidak mampu membedakan antara simulasi dan realitas.

Dalam rangka teori pengetahuan, post modernism menegaskan, tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran itu relative tidak hanya bagi setiap kebudayaan melainkan juga bagi setiap individu. Kebenaran itu relatif, tidak universal. Bahkan kaum post-modernisme menolak berbicara tentang kebenaran. Mereka mengganti kata kebenaran ('truth') dengan 'perspectives', 'constructs', atau 'points of view'. Kita tidak tahu mana yang benar, tetapi yang jelas adalah berbagai cara melihat dan melukiskan dunia.

Salah satu hal yang patut digaris bawahi berkaitan dengan konsep postmodernisme tentang berakhirnya modernisme, berakhirnya sejarah, berakhirnya ideologi, berakhirnya filsafat, dan sebagainya adalah bahwa penegasan tersebut sekaligus menandai dimulainya modernism ala baru (most-modernism), sejarah baru, ideologi baru, filsafat baru, atau singkatnya, kebudayaan baru. Tetapi kebudayaan yang baru itu adalah sebuah politik kebudayaan yang 'membumi', politik kebudayaan yang menghargai lokalitas', politik kebudayaan yang memberdayakan, berhadapan dengan praktik kebudayaan yang tidak otentik, represif, dan 'manipulatif' entah dalam arena ekonomi kapitalis atau ladang politik demokrasi liberal.

Tetapi sejumlah pemikir melihat misi, pemikiran, dan gerakan budaya postmodernisme bukanlah pemikiran dan gerakan budaya yang sama sekali baru. Habermas misalnya memahami postmodernisme sebagai kelanjutan proyek modernisme yang belum selesai. Sejumlah pemikir lain memahami postmodernisme sebagai modernisme yang sadar diri atau modernisme yang ingin mengoreksi cacat-cacat inheren dalam dirinya sendiri. Meskipun tidak seluruh ide atau cita-cita post modernisme benar-benar baru karena dalam banyak hal postmodernism meneruskan gelombang kritik yang sudah terkandung dalam pemikiran dan gerakan budaya modernisme sendiri, kritik-kritik frontal mereka terhadap pemikiran dan praktik budaya modern menyiratkan visi dan dorongan kuat ke arah perubahan kebudayaan ke arah baru juga. Visi seperti apa yang disuarakan oleh postmodernisme? Buku ini ingin menjawab

pertanyaan tersebut. Beberapa kritik pokok postmodernisme terhadap kedudukan teori, aktivitas, tindakan, hasil, dan produk-produk kebudayaan dalam agama, filsafat, seni, arsitektur, hukum, dan politik akan coba diuraikan dalam buku ini. Tujuannya agar perkembangan-perkembangan kebudayaan baru dalam bidang-bidang tersebut perlu dipahami secara kritis dan konstruktif guna membangun kehidupan dan masa depan bersama yang lebih baik dan bermartabat.

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Dimulai dengan pengantar umum tentang pemikiran postmodernisme, postmodernisme sebagai pemikiran dan gerakan kebudayaan, sampai dengan postmodernisme dalam bidang seni, arsitektur, filsafat, agama, politik, dan hukum. Beberapa catatan kritis terhadap pemikiran postmodernisme akan menutup laporan ini.

Saya ingin menutup pengantar singkat ini dengan mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Lembaga Penelitian dan Publikasi Ilmiah Universitas Tarumangara khususnya kepada bapak Ir. Jap Tji Beng MMSI, PhD. yang mendukung penulisan buku ini melalui program penulisan di LPPI Universitas Tarumanagara dan Prof. Dr. Ir. Dali S. Naga MMSI. yang telah memberikan dorongan dan masukan dalam proses penulisan buku ini. Akhirnya untuk keluarga tercinta, istri saya Monica Andriani dan kedua anak saya Gratia Firminae Purwaningtyas Weruin dan George Gilberto D. S. Weruin yang telah membagi waktu mereka buat saya demi penyelesaian buku ini. Kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca budiman sangat saya nantikan demi penyempurnaan buku ini lebih lanjut. Akhir kata, 'selamat membaca!'.

Jakarta, Awal Februari 2015

Urbanus Ura Weruin

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BABI. PEMBALIKAN BUDAYA POSTMODERNISME	1
1.1. Pengantar	1
1.2. Modernitas, Modernisme, Postmodernitas dan Postmodernisme	2
1.3. Postmodernisme sebagai Kritik terhadap Modernisme	3
1.4. Latar Belakang Muncul dan Berkembangnya Postmodernisme	5
1.5. Peta Perbedaan antara Modernisme dan Postmodernisme	6
1.6. Postmodernisme sebagai Visi Baru tengan Kebudayaan	9
 BABII. POSTMODERNISME SEBAGAI GERAKAN BUDAYA	 11
2.1. Pengantar	11
2.2. Dasar-Dasar Filsafat Modernisme dan Kritik terhadap Modernisme	11
2.3. Transformasi Masyarakat dan Kebudayaan Postmodern	14
2.4. Masyarakat dan Kebudayaan 'Resiko'	15
2.5. Kebudayaan Simbolik dan Pertunjukan	16
2.6. Hiperrealitas Kebudayaan	17
2.7. Kebudayaan Hiburan: McDonaldisasi, Disneysasi, dan Barby	18
2.8. Postmodernisme sebagai Kritik terhadap Kebudayaan Modern	19
2.9. Budaya Kritis	21
 BABIII. POSTMODERNISME DALAM SENI	 23
3.1. Pengantar	23
3.2. Seni Modern	23
3.3. Seni Postmodern	27
 BAB IV.POSTMODERNISME DALAM ARSITEKTUR	 31
4.1. Pengantar	31
4.2. Postmodernisme dan Arsitektur	31
4.3. Arah Baru Arsitektur Postmodern	35
4.4. Historisisme, Eklektisisme, dan Pluralitas Arsitektur Postmodern	37
4.5. Kritik terhadap Arsitektur Postmodern	38
 BABV. POSTMODERNISME DALAM FILSAFAT DAN AGAMA	 41
5.1. Pengantar	41
5.2. Postmodernisme dalam Filsafat	41
5.3. Postmodernisme dalam Agama	47
 BAB VI. POSTMODERNISME DALAM BIDANG POLITIK DAN HUKUM	 53
6.1. Pengantar	53
6.2. Postmodernisme dalam Bidang Politik	53
6.3. Postmodernisme dalam Bidang Hukum	58

BAB VII. CATATAN KRITIS TENTANG POSTMODERNISME	63
7.1. Kritik atas Kritik Postmodernisme	63
7.2. Beberapa Kritik Lain	64
7.3. Sumbangan Postmodernisme	65
DAFTAR PUSTAKA	67

Bab 1

Pembalikan Budaya Postmodernisme

1.1. Pengantar

Dalam khazanah intelektual dan akademik dewasa ini, postmodernisme merupakan gerakan pemikiran dan praktik sosial yang ramai diperbincangkan. Ia tidak hanya merupakan topik yang ramai didiskusikan dalam bidang pengetahuan dan filsafat melainkan juga dalam bidang agama, hukum, ekonomi, politik, seni, arsitektur, pendidikan, studi literer dan studi kebudayaan itu sendiri. Jika semua bidang ilmu pengetahuan ini merupakan bagian dari kebudayaan yang dibangun manusia dalam kehidupannya, kita, dengan demikian, bisa membicarakan gerakan pemikiran dan praktik postmodernisme dalam bidang-bidang tersebut sebagai bagian dari perkembangan kebudayaan.

Perbincangan tentang visi dan praktik baru kebudayaan dari perspektif postmodernisme, menurut hemat saya, menarik dan relevan karena sebagian besar (untuk tidak mengatakan seluruhnya) problem-problem sosial yang ada dalam masyarakat berakar pada kebudayaan. Berhadapan dengan problem-problem tersebut yang diperlukan adalah visi, pemahaman, dan praktik-praktik sosial baru agar bisa menyelesaikannya, atau paling tidak menguranginya. Problem-problem tersebut, antara lain: keangkuhan akademik, pemutlakan teori dan kebenaran; formalisme dan absolutisme agama; legalisme hukum dan keadilan yang tidak pernah adil; politik yang haus kekuasaan, kepentingan kelompok dan uang; praktik-praktik ekonomi yang menindas kaum miskin, korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai praktik sosial-ekonomi; orisinalitas seni dan keberpihakan arsitektur pada nilai dan estetika yang semakin dipertanyakan; pendidikan yang semakin 'tidak manusiawi'; sampai dengan kasus-kasus perkosaan dan pembunuhan sadis yang semakin menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Semua problem ini harus direfleksikan dan dikritisi. Pemikiran, ide, gagasan, ideologi, atau praktik-praktik lama yang kotor yang menjadi basis bagi praktik-praktik sosial semacam ini mesti dipikirkan ulang tidak saja demi kepentingan akademis dengan menunjukkan ketidakmemadainya premis-premis yang mendasari pemikiran, ideologi, atau praktik-praktik semacam itu, melainkan justru untuk menciptakan praktik budaya baru yang lebih bermartabat dan manusiawi. Visi baru tentang kebudayaan dari perspektif postmodernisme bisa menjadi alternatif bagi refleksi tentang perlunya nilai dan praktik budaya baru melalui kritik-kritik dan penolakan postmodernisme terhadap pemikiran modernisme dan praktik-praktik budaya modern.

Postmodernisme yang memperkenalkan ide semacam 'ketidakpercayaan pada metanarasi', 'wafatnya sang pengarang', 'filsafat sebagai percakapan' dan 'desakralisasi filsafat', 'privatisasi agama', 'epistemologi non-fundasional', 'ironi dan solidaritas sebagai praktik politik', '*decentering subject*', 'realitas tanpa realitas', 'dekonstruksi', dan sebagainya menegaskan perlunya pemahaman terhadap ide, gagasan, pemikiran dan praktik budaya yang baru. Seluruh pandangan, teori, gagasan, kebenaran, dan praktik-praktik budaya yang sudah dianggap 'mapan' harus 'dibongkar' guna mengungkapkan kepalsuannya dan dengan demikian membuka ruang bagi terciptanya ide, gagasan, pemikiran, teori, dan praktik-praktik sosial yang baru. Untuk menciptakan dan mengembangkan kebudayaan yang baru tersebut, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan mengkritisi praktik-praktik budaya yang sudah lama berlangsung dan terancam menjadi usang.

Berhadapan dengan kebudayaan modern (lama) yang: kaku, 'totaliter', 'eksklusif', melulu rasional, dan menindas, kita membutuhkan sebuah perspektif yang baru, perspektif yang lebih segar, perspektif yang lebih fleksibel, berspektif yang 'demokratis', perspektif yang 'inklusif', perspektif yang menghargai keberagaman, dan perspektif yang menyediakan ruang bagi suara hati, hati nurani, perasaan, dan kesadaran akan pluralitas sosial. Perspektif inilah yang ingin dibangun oleh gerakan dan pemikiran postmodernisme

melalui kritik-kritik frontal mereka terhadap kebudayaan modern. Maka pada hemat saya perspektif kebudayaan sebagaimana diperkenalkan oleh postmodernisme tidak bisa dilewatkan begitu saja ketika kita ingin membicarakan perihal kebudayaan atau terlebih lagi ketika kita ingin membangun sebuah kebudayaan baru yang lebih manusiawi dan bermartabat.

Sebelum menguraikan lebih jauh visi baru tentang kebudayaan dari perspektif postmodernisme, marilah terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan postmodernisme? Apa perbedaan pokok antara postmodernisme dan modernisme? Kita mulai dengan menguraikan makna istilah postmodernisme sendiri dan hubungannya dengan istilah-istilah lain seperti postmodernitas, modernitas, dan modernisme.

1.2. Modernitas, Modernisme, Postmodernitas, dan Postmodernisme

Sebelum memahami lebih jauh apa yang dikritik oleh postmodernisme terhadap pemikiran modernisme dan praktik kehidupan masyarakat dalam era modern, salah satu pertanyaan pokok yang mesti lebih dahulu dijawab adalah apakah postmodernisme itu?

Pertanyaan tentang apakah postmodernisme itu dan kapan postmodernisme muncul dan berkembang merupakan pertanyaan yang sulit dijawab. Bambang Sugiharto dalam bukunya, *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat* (2002: 15-16, 23-25), menunjukkan beberapa alasan mengapa postmodernisme sulit untuk didefinisikan secara tepat dan memadai. *Pertama*, karena pemakaiannya begitu luas dalam berbagai bidang pengetahuan seperti filsafat, seni, linguistik, psikologi, hukum, sosiologi, politik, lingkungan, antropologi, maupun di luar akademis dalam gerakan-gerakan sosial yang dipelopori aktivis hak asasi manusia, lingkungan, dan feminis. *Kedua*, karena istilah postmodernisme sendiri sering dianggap dangkal dan kosong karena hanya dipakai untuk menunjukan *trend* intelektual yang bersifat reaksioner terhadap pemikiran-pemikiran dominan dan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat 'modern' tetapi tidak memiliki teori yang benar-benar orisinal. *Ketiga*, istilah postmodernisme juga sulit didefinisikan secara ketat karena di antara para pemikir postmodernisme sendiri terdapat berbagai ragam pemikiran yang kadang-kadang saling bertentangan. Gerakan yang dilabeli dengan istilah postmodernisme itu sendiri sangat beragam.

Meskipun kontroversial, ambigu, dan sulit untuk didefinisikan secara jelas mungkin berguna membedakan makna istilah modernisme, modernitas, postmodernisme dan postmodernitas agar lebih mudah memahaminya. Dari perspektif postmodern, modernitas menunjuk pada tatanan atau kondisi sosial-historis masyarakat maju berkat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, kapitalisme, dan kepercayaan penuh pada kemampuan akal budi (*reason*) manusia. Sedangkan istilah modernisme dipakai untuk menunjukkan pemikiran-pemikiran filosofis dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan yang merupakan kelanjutan proyek Pencerahan (*enlightenment*). Pemikiran modernisme menekankan upaya untuk membangun kesatuan (*unity*), universalitas, kepastian, dan kebenaran-kebenaran *high-minded*. Dan kebenaran-kebenaran ini menentukan batas yang diterima secara luas antara apa yang merupakan 'pusat' (*center*) atau 'focus' dari masyarakat dan apa yang merupakan 'margin' atau 'periphery'.

Istilah Postmodernitas menunjuk pada situasi dan tatanan sosial masyarakat produk ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, globalisasi, gaya hidup, konsumerisme berlebihan, deregulasi pasar uang dan sasaran publik, usangnya negara, dan (peminatan) kembali inspirasi-inspirasi dari tradisi. Dengan rumusan lain, istilah postmodernitas dipakai untuk menunjukkan kondisi-kondisi sosiologis, teknologis, politik, dan kebudayaan yang membedakan era modern (*modern age*) dengan era yang muncul setelah kemodernan itu.

Sementara istilah postmodernisme dipakai untuk menunjukkan kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*), epistemologi dan ideologi-ideologi moden. Maka postmodernisme menunjuk pada respon-respon intelektual, kultural, artistik, akademik dan

filosofis terhadap kondisi modernitas, modernisme, dan posmodernitas. Karya-karya artistik dan filosofis postmodernisme cenderung merangkul berbagai ragam perspektif yang berkembang, eklektisisme, dan ironi. Berhadapan dengan pilihan terhadap hal-hal dikotomis, karya-karya postmodern cenderung menaruh perhatian pada apa yang oleh modernisme dianggap subordinat atau inferior. Misalnya, postmodern lebih menekankan *matter* dari pada *mind*, *machine* dari pada *man*, *writing* dari pada *speech*, *form* dari pada *substance*, permukaan dari pada kedalaman, feminim dari pada maskulin, derivatif dari pada original, *kitsch* dari pada *fine art*, dan lokalisme dari pada universalisme.

Pemikiran dan praktik postmodernisme ingin menumbangkan otoritas ideal dalam bidang pengetahuan, filsafat, dan seni melalui ide tentang apa yang disebut David Harvey sebagai fragmentasi, kesementaraan, pluralitas, inorisinalitas, konsumerisme, dan sebagainya. J.F. Lyotard, salah seorang tokoh terkenal gerakan postmodernisme melukiskan postmodernis sebagai '*icredulity toward metanarratives*' (ketidakpercayaan terhadap metanarasi). Maka secara singkat, cukuplah bagi kita untuk merumuskan postmodernisme sebagai perkembangan baru pasca-modern atau postmodern sebagai reaksi kritis atas modernisme dan/atau modernitas.

1.3. Postmodernisme sebagai Kritik terhadap Modernisme

Sebetulnya ada banyak hal dari kemodernan yang dikritik oleh postmodernisme. Anggapan kemodernan tentang seni, tata kota, kebudayaan global, gender, agama, praktek politik, dan sebagainya, tidak luput dari perhatian kritis postmodernisme. Dalam semangat kemodernan, dalam bidang kesenian misalnya, hanya kesenian 'adi luhung' seperti musik klasik misalnya yang dianggap memenuhi kriteria estetika sedangkan musik pop meskipun digandrungi secara masal, dianggap sampah. Kota yang modern adalah kota yang mengikuti standar kota megapolitan dengan kemegahan gedung-gedung pencakar langit yang meruntuhkan bangunan-bangunan tradisional. Bahkan bangunan-bangunan tradisional 'dimuseumkan' untuk mengenang sejarah keteringgalan. Dalam bidang kebudayaan, kebudayaan Baratlah yang dianggap sebagai kebudayaan yang paling beradab sedangkan kebudayaan-kebudayaan lokal dicap 'primitif' bahkan 'biadab'. Dalam soal gender, kaum laki-laki menikmati privilese mereka sebagai 'manusia sungguh-sungguh' dan menjadi 'kepala' tidak hanya dalam wilayah domestik di rumah melainkan juga dalam berbagai wilayah publik. Dalam praktek politik, partai-partai politik yang kecil dan kelompok-kelompok marginal tidak hanya tidak diperhitungkan keberadaannya, melainkan dipinggirkan, dibumihanguskan, bahkan secara sistematis, atas nama 'wewenang' yang monopolistik dan menyelamatkan 'satu' cita-cita yang dirasionalkan sebagai tujuan bersama. Dalam kaitannya dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM), keyakinan terhadap universalisasi HAM memaksa negara-negara berkembang untuk menerima konsep HAM yang dirumuskan dari pengalaman negara-negara maju dan keanekaragaman pengalaman negara-negara berkembang dianggap sepi. Cita-cita postmodernisme ialah merevisi paradigma dan praktik budaya modern ini.

Maka secara singkat kita bisa mengatakan bahwa postmodernisme merupakan pemikiran kritis dan praktik membudaya yang tidak hanya berbeda dengan modernisme melainkan mengkritisi modernisme dan kondisi sosial masyarakat modern. Frederico de Onis pada tahun 1930-an dalam karyanya, *Antologia de la Poesia Espanola a Hispanoamericana*, menggunakan istilah postmodernisme untuk menunjukan reaksi yang muncul dari dalam modernisme. Arnold Toynbee menggunakan istilah postmodernisme dalam bukunya, *A Study of History* (1947) sebagai kategori untuk menunjukkan siklus sejarah berakhirnya dominasi Barat, surutnya individualisme, kapitalisme, dan kristianitas, serta kebangkitan budaya non-Barat. Pada tahun 70-80-an istilah ini menjadi sangat populer dalam bidang seni karena dipakai untuk menunjukan gerakan yang menolak modernisme yang mandek dalam birokrasi museum dan akademi. Pada periode yang sama, dalam bidang arsitektur,

dengan Charles Jenks sebagai pembicara utama, kemudian juga dalam bidang seni visual, pertunjukan (drama/teater), musik dan sebagainya.

Kecenderungan-kecenderungan yang biasanya dikaitkan dengan postmodernisme dalam bidang seni adalah: hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, tumpang-tindih pemisahan antara budaya tinggi dan budaya pop, percampuran gaya yang bersifat eklektik, parodi, kebermainan, mengapresiasi 'permukaan' tanpa peduli 'kedalaman', hilangnya orisinalitas dan kejeniusan, dan sebagainya. Dalam bidang kebudayaan, Jean Baudrillard, menunjukkan fenomena peleburan batas wilayah dan perbedaan antar budaya tinggi dan budaya rendah, penampilan dan kenyataan. Lalu dalam bidang filsafat, istilah postmodernisme diperkenalkan oleh Jean-François Lyotard dalam bukunya *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (edisi bahasa Inggris 1984) yang kemudian berkembang luas dalam diskusi-diskusi filsafat sampai sekarang.

Jean-François Lyotard, salah seorang pembicara utama postmodernisme, dalam bukunya *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1984), mengartikan postmodernisme sebagai ketidakpercayaan pada "metanarasi" atau "grand narasi". Bagi Lyotard, praktik pengetahuan merupakan sekedar permainan bahasa dan jika permainan bahasa-permainan bahasa tersebut dibongkar (istilah Lyotard: didekonstruksi), tampak jelas bahwa pengetahuan tersebut tidak lain dari narasi-narasi yang melegitimasi dirinya sendiri. Maka gerakan pemikiran postmodernisme tidak lagi percaya pada apa yang dianggap sebagai 'grand narasi' atau 'narasi agung' karena narasi tersebut tidak layak untuk selalu dipercayai karena hanyalah permainan bahasa yang melegitimasi dirinya sendiri (apalagi permainan bahasa itu selalu berbeda antara satu masyarakat pengguna bahasa tertentu dengan masyarakat pengguna bahasa yang lain sehingga selalu plural dan 'relatif').

Stanley J. Grenz dalam bukunya *A Primer on Postmodernism* (1996) menunjukkan bahwa gerakan dan pemikiran postmodernisme yang mulai berkembang sejak tahun 1930-an dalam dunia seni dan kemudian "mewabah" sebagai fenomena budaya dalam lingkup yang lebih luas terutama dalam dunia akademik dan kalangan cendekiawan dalam berbagai disiplin ilmu sejak tahun 1970-an, tidak lain dari penolakan terhadap cara berpikir dan praktik kehidupan (budaya) modern (Grenz 1996: 9). Pemikiran modern yang dianggap mencerahkan, menurut kaum postmodernis justru harus dicerahkan kembali. Ilmu pengetahuan (filsafat, agama, moral, politik, hukum, dan sebagainya) yang ingin mencari kepastian yang benar-benar pasti dan tak terubahkan seperti dicanangkan oleh Descartes ternyata hanyalah keinginan utopis yang tidak pernah terwujud. Yang terjadi dalam ilmu pengetahuan justru para ilmuwan dan filsuf saling bertengkar tiada henti. Tidak ada yang pasti. Suatu teori baru muncul justru dengan menggagalkan teori lama yang sudah dianggap usang (Karl Popper). Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri.

Pandangan modern bahwa ilmu pengetahuan bersifat rasional, objektif, absolut, universal, permanen, ahistoris, oleh kaum postmodernis dianggap merupakan cita-cita utopis semata karena semua teori ilmu pengetahuan tidak lebih dari salah satu cerita di antara cerita-cerita lain tentang ilmu dan kehidupan. Richard Rorty, filsuf postmodernis abad ini yang paling kontroversial dan berpengaruh di AS, menegaskan bahwa teori ilmu (dan dengan demikian juga praktik kehidupan) sebaiknya diperlakukan sebagai "percakapan" alias *conversation*. Hidup adalah sebuah teks (penulisan cerita) yang isi dan maknanya tidak hanya ditentukan oleh subjek itu sendiri secara otonom, bebas, dan mandiri, melainkan selalu dalam hubungan dan ditentukan oleh subjek lain, lingkungan sosial, bahkan juga masyarakat global.

Maka istilah postmodernisme juga dipakai untuk menunjukkan kritik-kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*), epistemologi dan ideologi-ideologi modern. Singkatnya pemikiran dan praktik postmodernisme menunjuk pada berbagai respon intelektual, kultural, artistik, akademik dan filosofis terhadap kondisi modernitas, modernisme, dan posmodernitas. Atau secara singkat dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah

gerakan atau pemikiran yang menentang pemikiran 'modernisme' dan praktik kehidupan (praktik membudaya) dalam era modern. Sebagai fenomena kultural, postmodernisme merayakan keberagaman, pluralitas (dalam bidang seni, ilmu pengetahuan) dan sebaliknya menentang 'orisinalitas', absolutisme dan univalensi (Grenz 1996: 37-50).

Sebelum memahami lebih jauh apa yang dikritik oleh postmodernisme terhadap pemikiran modernisme dan praktik kehidupan masyarakat dalam era modern, kiranya perlu memahami terlebih dahulu latar belakang muncul dan berkembangnya postmodernisme.

1.4. Latar Belakang Muncul dan Berkembangnya Postmodernisme

Konsekuensi-konsekuensi negatif dalam tatanan sosial yang dihasilkan oleh pemikiran dan gerakan modernisme pada penghujung akhir abad 20, yang tergambar dalam dominasi sains dan kapitalisme menjadi pemicu utama munculnya gerakan postmodernisme. Beberapa di antaranya:

1. Pandangan dualistik yang membagi seluruh kenyataan menjadi: subjek-objek, spiritual-material, manusia-dunia, dan sebagainya, menghasilkan objektivitas dan eksploitasi alam semesta secara berlebihan sehingga menghasilkan krisis ekologis.
2. Pandangan modern yang bersifat objektivistik dan positivistik akhirnya cenderung menjadikan manusia sebagai objek juga dan masyarakat pun direkayasa bagai mesin, akibatnya masyarakat cenderung tidak manusiawi.
3. Hilangnya nilai-nilai moral dan religius karena standard dan ilmu-ilmu positif empiris dipakai sebagai standard kebenaran tertinggi. Situasi ini melahirkan disorientasi moral-religius yang mengakibatkan meningkatnya kekerasan, keterasingan, depresi mental, dan sebagainya.
4. Materialisme menjadi nilai pokok dalam hidup, Hidup tidak lebih dari usaha untuk memiliki dan mengontrol dunia material dengan cara apa pun: membunuh, korupsi, menguasai pasar, dan sebagainya.
5. Hilangnya norma-norma umum yang objektif dan digantikan dengan kekuasaan beserta ancaman kekerasan untuk mengatur manusia. Spirit militerisme merajalela, termasuk semangat fundamentalis dalam agama yang juga sama koersifnya.
6. Kebangkitan kembali tribalisme dan mentalitas mengunggulkan suku atau kelompok tertentu. Agama-agama yang dulunya berusaha untuk membangun universalisme justru menjadi kategori identitas penting dan mendukung kelompok-kelompok yang saling bertengkar.
7. Semakin intensnya interaksi global berkat kemajuan teknologi informasi semakin menumbuhkan pemahaman atas 'yang lain', kesadaran akan relativitas, relasionalitas, interdependensi, dan pluralitas.
8. Munculnya krisis ilmiah dalam metode dan asumsi-asumsi ilmu pengetahuan yang memunculkan kesadaran bahwa tidak ada satu metode ilmu (baca: ilmu-ilmu alam) yang dapat diterapkan pada semua bidang pengetahuan; tidak ada satu kebenaran tunggal dan universal, bahkan tidak ada satu instansi pun yang berdaulat menentukan kebenaran dan menjadi sumber norma-norma ilmu. Lagi pula, 'janji-janji' pembebasan kehidupan manusia oleh ilmu pengetahuan tak pernah terwujud tanpa eksekusi negatif. Peran sentral ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dipertanyakan.
9. Keroposnya kerangka-kerangka acuan besar (*the end of ideology*) seperti jatuhnya komunisme dan sosialisme di satu pihak dan imperialisme kapitalisme oleh negara-negara maju di negara-negara berkembang semakin tak terbendung. Ambruknya totalitarisme di satu pihak dan rehabilitasi liberalisme dan demokrasi yang semakin beragam mencuatkan skeptisisme terhadap fondamen-fondamen masyarakat termasuk agama.

10. Ambruknya batas-batas identitas: suku, agama, ras, geografis, profesi, keahlian, dan sebagainya. Bahkan identitas-identitas ini tak lagi menentukan. Kekecewaan dan kritik yang tadinya muncul secara kecil-kecilan dalam klaim-klaim relativitas dan 'berakhimya....' menggumpal menjadi gelombang besar dalam sebutan 'postmodernisme'

1.5. Peta Perbedaan antara Modernisme dan Postmodernisme

Sebetulnya sangat sulit untuk menunjukkan secara jelas, peta perbedaan antara kebudayaan modern dan kebudayaan postmodern karena makna istilah kebudayaan modern dan postmodern itu sendiri pun sangat luas. Disamping itu kesadaran tentang perbedaan antara kebudayaan modern dan kebudayaan postmodern justru menguat setelah kritik serampangan postmodernisme terhadap kebudayaan modern. Dan celakanya lagi kritik-kritik itu toh dirumuskan demi memperkuat posisi postmodernis sendiri. Apakah kebudayaan modern dalam kenyataannya persis seperti yang dikritik oleh postmodern? Jawaban atas pertanyaan ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Secara umum, modernisme diidentikkan dengan *the scientific world view of the Enlightenment*. Model pendekatan ilmiah ini mendominasi praktik dan pemahaman atas struktur sosial, ekonomi, moral, politik, filsafat, dan kognisi masyarakat modern. Akal budi manusia ditampilkan sebagai ganti bagi peran agama dan bentuk-bentuk 'irasionalitas' lain. Ada tiga kata kunci dalam modernitas yakni: *reason*, *science*, dan *technology*. Ketiga kekuatan ini dianggap mampu merombak pengetahuan, kesejahteraan dan kebaikan kita sebagai manusia melalui kontrol rasional terhadap alam dan masyarakat. Sementara itu postmodernisme justru tidak lagi percaya kepada akal sebagai kekuatan tunggal dalam menentukan kehidupan manusia dan memahami realitas. Postmodernisme pun skeptis terhadap *grand* narasi (metanarasi), netralitas, dan objektivitas pengetahuan. Kebenaran bagi kaum postmodern bersifat perspektival, hermeneutis, kontekstual, dan subjektif.

Ihab Hassan dalam bukunya *The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature* (1982) membuat bagan yang memetakan perbedaan antara modernisme dan postmodernisme dalam 'oposisi binair' sebagai berikut:

Modernism	Postmodernism
Romanticism/Symbolism	Pataphysics/Dadaism
Form (conjunctive, closed)	Antiform (disjunctive, open)
Purpose	Play
Design	Chance
Hierarchy	Anarchy
Mastery/Logos	Exhaustion/Silence
Art object/Finished work	Process/Performance/Happening
Distance	Participation
Creation/Totalization	Decreation/Deconstruction
Synthesis	Antithesis
Presence	Absence
Centring	Dispersal

Genre/Boundary	Text/Intertext
Semantics	Rhetoric
Paradigm	Syntagm
Hypotaxis	Parataxis
Metaphor	Metonymy
Selection	Combination
Root/Depth	Rhizome/Surface
Interpretation/Reading	Against Interpretation/Misreading
Signified	Signifier
<i>Lisible</i> (readerly)	<i>Scriptible</i> (writerly)
Narrative/ <i>Grande histoire</i>	Antinarrative/ <i>Petite histoire</i>
Master code	Idiolect
Symptom	Desire
Type	Mutant
Genital/Phallic	Polymorphous/Androgynous
Paranoia	Schizophrenia
Origin/Cause	Difference – difference/trace
God the Father	The Holy Ghost
Metaphysics	Irony
Determinacy	Indeterminacy
Transcendence	Immanence

(Hassan, 1982: 267–8)

Secara lebih rinci lagi, perbedaan antara kebudayaan modern dan postmodern, dalam beberapa bidang kehidupan, bisa dipetakan melalui tabel berikut:

Bidang	Modern	Postmodern
Science	Fact, observation, logic, reason, absolute truth, objective truth (science, math history...)	Fact and truth are created by assumptions. Feelings, imagination (vision), speculation, reject absolute truth-construct your own meaning, rejects objective knowledge (fill vacuum with evolving visions driven by subjective want and group thinking), theory/science book is an autobiography.
Religion	'Biblical' monotheism - only know God through holy <i>scriptura</i> .	Spiritual pluralism - all religion are equal (because there is no absolute truth or it cannot be known).
Relation	Personal relationship	Group relation (spiritual community)
Ethics	Follow cultural standards/ doctrines which are considered inherently correct. Moral absolutism: base beliefs, values and hope on a revealed doctrine (bible)	Moral relativism: base beliefs, values and hope on agreed upon doctrine. Create your own standards and values- no right, wrong, sin
	Sexual boundaries fixed by god	License to choose one's own sexual identity
	Logical, scientific perspective	Open to mysticism and spiritual exploration
	Emphasize doctrine, logical proposition	Emphasize story, personal discovery, journey
	'Other gods' are forbidden	Other gods and cultures encourage spiritual growth
	Seriousness	Irony
	Linearity	Complex narrative
	Form	Content
Reality	Natural ('true reality') Depth (meaning) Real	Constructed (all our ways of understanding the world are really constructions) Surface (connection between things) Hyper-real (or simulacrum) (exp. Disneyworld)

History	Uniformity	Plurality
	Hostile to history	Respect for history
Language	Referential	Meaning in social context through usage ('language game')

1.6. Postmodernisme sebagai Visi Baru tentang Kebudayaan

Koentjaraningrat mengartikan kebudayaan sebagai "keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar". Sementara Edward Burnet Taylor mengartikan kebudayaan sebagai "keseluruhan atau kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, keserian, moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat". Di samping itu, Ralph Linton mengartikan kebudayaan sebagai "gabungan dari semua pengetahuan, sikap dan pola-pola perilaku yang merupakan kebiasaan, yang dianut dan diwariskan oleh anggota-anggota masyarakat tertentu".

Dengan pemahaman kebudayaan yang mencakup berbagai bidang pengetahuan dan kehidupan seperti ini, tampak jelas bahwa gerakan, pemikiran, dan praktik kehidupan yang diperjuangkan oleh postmodernisme melalui kritik-kritik frontal mereka terhadap pemikiran modernisme dan praktik kehidupan dalam era modern dapat dipahami sebagai upaya membangun kebudayaan atau kultur baru dalam kehidupan masyarakat dewasa ini.

Bila kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, pemikiran, ide, teori, nilai, tindakan, aktivitas, dan hasil karya manusia, entah material atau nonmaterial, dalam segenap dimensi kehidupannya (ilmu pengetahuan, agama, filsafat, seni, hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya), maka pemikiran dan gerakan yang dilabeli modernisme dan postmodernisme bisa dianggap sebagai suatu model kebudayaan. Maka, dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kebudayaan modern adalah segala macam ide, pemikiran, nilai, aktivitas, dan produk-produk kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat modern. Termasuk di sini, segala proses dan hiruk-pikuk kehidupan individu dan masyarakat yang berlangsung dalam era modern dalam berbagai dimensi kehidupannya. Sebaliknya segala macam ide, pemikiran, nilai, aktivitas, tatanan masyarakat dan segala hiruk-pikuk kehidupan manusia dalam zaman postmodern bisa disebut sebagai kebudayaan postmodern. Namun, mengingat apa yang disebut sebagai kebudayaan postmodern itu sangat beragam dan lebih menunjuk pada reaksi kritis terhadap praktik kebudayaan modern (terutama pemikiran modern atau modernisme), maka yang dimaksud dengan kebudayaan postmodernisme, dalam konteks pemakaian di sini, adalah pemikiran-pemikiran kritis dari gerakan sosial dan intelektual yang menamakan diri postmodernisme terhadap pemikiran modernisme dan praktik kehidupan dalam era modern.

Muncul dan berkembangnya pemikiran postmodernisme pertama-tama harus dilihat sebagai sebuah fenomena budaya. Kaum postmodernis ingin mengembangkan suatu model kebudayaan yang baru khususnya dalam bidang pemikiran dan pola hidup yang berbeda dengan pemikiran dan pola hidup modern yang dicap sudah usang dan ketinggalan zaman. Namun, menurut kaum postmodernis, jalan ke arah perubahan kebudayaan tersebut mesti berangkat dari evaluasi kritis terhadap pemikiran dan pola

hidup modern agar kemudian bisa melampauinya. Mereka ingin mengoreksi budaya modern yang sudah dianggap usang dengan memperkenalkan budaya (pemikiran) baru dalam memahami sesama, dunia, ilmu pengetahuan, dan hasil-hasil kegiatan manusia dalam bidang seni, filsafat, politik, hukum, bahkan juga Allah (agama).***

Bab 2 Postmodernisme sebagai Gerakan Budaya

2.1. Pengantar

Kita hidup dalam dunia sosial dan budaya yang berubah. Jim McGuigan dalam bukunya, *Modernity and Postmodern Culture* (2006) menyebut dunia kehidupan dewasa ini sebagai dunia post-modern atau *post-traditional world*. Sebuah dunia yang terus mengalami revolusi dalam produksi, konsumsi, ketidakpastian, agitasi, dan semua kondisi sosial. Ciri masyarakat modern yang dilambangkan dengan ungkapan, "*All that is solid melts into air*" (semua yang padat menguap ke udara) dari Marshal Berman kini benar-benar terwujud dalam era postmodern. Di penghujung abad 20, masyarakat dan kebudayaan berkembang ke era yang disebut dengan era atau kebudayaan postmodern. Proyek modernisasi dan kondisi kemodernan dikudeta oleh postmodernisme. Modernitas dan modernisme dianggap sudah usang. Bentuk-bentuk atau praktik-praktik budaya dan identitas sosial berubah. Perubahan-perubahan tersebut mencakup: budaya hirarkis elite ke budaya massa, budaya serius ke budaya populer, seni untuk seni ke seni untuk pasar, budaya real ke hiperreal atau virtual (dimana batas antara realitas dan representasi runtuh). Perubahan kultural dan manifestasi ketidakpastian epistemologis dari 'postmodern' menggambarkan perubahan pola peradaban dari modernitas dan postmodernitas.

2.2. Dasar-dasar Filsafati Modernisme dan Kritik terhadap Modernisme

Fuat Firat dan Alladi Venkatesh melalui artikel mereka "*Liberatory Postmodernism and the Reenchantment of Consumption*" dalam *Journal of Consumer Research*, Vol. 22, Desember 1995, menunjukkan dasar-dasar filosofis modernisme dan postmodernisme serta kritik kultural terhadap modernisme, misalnya perbedaan antara produksi dan konsumsi atau prioritas produksi dari pada konsumsi. Tetapi menurut pemikir ini, pasar, budaya konsumsi dan sebagainya didasarkan pada dasar-dasar filosofis dan budaya tertentu yang berakar pada kerangka pemikiran modernisme (Lash 1991; Ross 1988). Maka postmodernisme, menurut pemikir-pemikir ini, muncul bukan hanya sebagai kritik terhadap modernisme dan dominasinya dalam mengkonstruksikan budaya konsumsi, melainkan justru sebagai gerakan filsafat dan kultural baru (Borgmann 1992; Vattimo 1992, sebagaimana dikutip Venkatesh 1995: 239). Agar dapat memahami gerakan kultural baru yang diperjuangkan oleh postmodernisme, perlu terlebih dahulu dipahami modernisme dan nilai-nilai kultural yang diperjuangkannya.

Label 'modernitas' umumnya menunjuk pada periode dalam sejarah Barat yang dimulai sejak akhir abad 16 atau awal abad 17 sampai dengan penghujung abad 20 (Borgmann 1992: 22) bahkan juga sampai sekarang. Istilah modernisme menunjuk pada periode waktu tertentu. Sementara 'modernisme' menunjuk pada ide-ide sosio-kultural dan filosofis serta kondisi-kondisi yang menandai periode tersebut. Kondisi-kondisi yang menandai modernisme itu antara lain:

1. Kepercayaan pada akal budi dan keamanan dari tatanan rasional,
2. Munculnya subjek kognitif
3. Muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekanan pada kemajuan material melalui penerapan teknologi-teknologi ilmiah,
4. Realisme, representasi, dan kesatuan tujuan dalam seni dan arsitektur,
5. Munculnya kapitalisme industrial,
6. Pemisahan bidang produksi, yang secara institusional dikontrol dan publik, dari bidang konsumsi, yang domestik dan privat (Firat dan Venkatesh 1995: 240).

Evolusi sejarah dan kebudayaan Barat menunjukkan kesuksesan besar jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Sejarah dan kebudayaan modern dimungkinkan

berkat kemajuan ilmiah, teknologis, dan produksi material yang dapat diciptakan. Meskipun mengakui kemajuan-kemajuan tersebut, skeptisisme postmodern mempertanyakan dan mengkritisi klaim-klaim modernisme dalam kerangka filsafati, kultural, dan empiris.

Kaum postmodernis menawarkan suatu pandangan dunia yang berbeda dari modernisme. Meskipun memiliki beberapa tema dan karakteristik yang sama, pandangan dunia dari perspektif postmodernisme tidak hanya sangat beragam melainkan juga sering *overlapping* dengan modernisme. Bahkan soal berakhirnya era modernitas dan permulaan era postmodernitas pun tidak bisa ditentukan secara pasti. Tetapi kondisi-kondisi sosio-kultural yang umumnya dikaitkan dengan postmodernitas dapat diuraikan di sini. Firat dan Venkatesh (1995) menunjukkan beberapa ide atau asumsi pokok tentang modernisme dan kritik postmodernisme atas asumsi-asumsi tersebut. Ide atau asumsi tersebut adalah:

1. Modernisme, sebagai konstruksi sosial atau historis, didasarkan pada prinsip-prinsip Pencerahan. Prinsip tersebut menyatakan bahwa individu dan masyarakat modern diatur menurut prinsip-prinsip rasional (rasionalisme), ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Kaum postmodern justru beranggapan bahwa individu dan masyarakat dibentuk berdasarkan apa yang kita saksikan di sekitar kita bukan melulu sebagai produk sains dan teknologi. Proses dan kehadiran kultural dalam estetika, bahasa, wacana, dan praktik-praktik kultural sehari-hari itulah yang mengatur jalannya masyarakat dan bukan rasio. Bahkan proses-proses dan praktik-praktik kultural ini jugalah yang mewarnai perkembangan produksi dan konsumsi sebagai kekuatan ekonomi. Kaum postmodernis beranggapan bahwa asumsi modernisme itu sempit, dogmatis, reduksionistik bahkan juga unidimensional dalam filsafat kerjanya. Modernisme, menurut kritik ini, tidak mampu melihat kekayaan pengalaman manusia, menganggap tatanan sosial begitu transparan, dan berurusan dengan realitas permukaan dan solusi-solusi yang sederhana (Vattimo 1992). Konsekuensinya, modernisme memberikan pandangan yang terbatas tentang individu hanya sebagai agen kognitif. Dengan memberi privilese pada ilmu pengetahuan dan teknologi dari pada representasi kultural dan simbolik, ia mencurigai pluralisme.
2. Modernisme keliru karena ia ingin mencari tatanan yang etis; dikonstruksikan secara rasional; berorientasi teknologis; dan kelihatannya progresif dan dengan demikian ingin mempersatukan semua tatanan sosial dalam pola tertentu yang rasional (Rosenau 1992). Tentu saja anggapan ini, menurut perspektif postmodernisme, dianggap keliru karena kemajuan material yang dijanjikan terancam menjadi ilusif karena kenyataan menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan, kejahatan, dan kesengsaraan manusia, tetap menandai kehidupan dan kebudayaan modern. Kasus Holocaust sering dianggap sebagai titik balik rasionalisme; sebuah irasionalitas dari apa yang dianggap rasional. Tatanan ekonomi yang rasional misalnya, pada dasarnya tak lepas dari krisis juga. Habermas bahkan mengatakan bahwa modernisme itu memarginalisasi dunia kehidupan (Habermas 1984). Pencarian postmodernis dengan demikian memuliakan kehidupan manusia dan membebaskan manusia dari skema represif teknologis-rasional modern.
3. Modernisme, menurut kaum postmodernis, menyederhanakan dan mereduksi dunia ke dalam kategori dikotomi: subjek-objek, laki-perempuan, produsen-konsumen, kebudayaan-alam, penanda-yang ditandakan, aksidensi-orientasi, sakral-profani, rohani-jasmani, jiwa-tubuh, benar-salah, sains-seni, rasional-irasional, dan sebagainya. Setiap bagian merepresentasikan perbedaan dan yang pertama dianggap superior terhadap yang lain. Kaum postmodern menganggap dikotomi-dikotomi ini

sebagai upaya historis yang ingin melegitimasi kebenaran-kebenaran parsial. Vattimo (1988) menyebut postmodernisme sebagai gerakan yang mengkonfigurasi 'filsafat perbedaan' yang melampaui dogma-dogma modernis. Manusia misalnya dianggap sebagai subjek dan objek sekaligus; kebenaran selalu parsial dan terancam menjadi salah maka tidak perlu diuniversalisasi; realitas tak pernah tunggal melainkan begitu kaya dan plural karena selalu dikonstruksikan, dan sebagainya.

4. Kritik keempat diarahkan terhadap karakter inkonsistensi-paradoks dari modernisme. Berkaitan dengan idealitas dan realitas dalam kehidupan kita, dimana yang real menjadi imajiner, dan representasi menjadi interpretasi, substansi menjadi bentuk, dan objek menjadi gambaran. Modernisme disamping meleburkan keunikan, nyata-nyata mengusahakan konformitas dan keseragaman (Ross 1988). Maka paradoks modernisme itu adalah ketakterhubungannya idealitas dan realitasnya.
5. Dalam bidang seni dan arsitektur, pandangan modernis dianggap sangat sempit dan represif karena tekanan utamanya pada rasionalisme, fungsionalisme dan universalisme (Jencks 1987). Sebaliknya gerakan postmodernisme menekankan bentuk-bentuk ekspresif, representasi simbolik, dan percampuran *genre*. Transformasi pembebasan ini membuka kemungkinan bagi kemungkinan-kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di dunia seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur adalah sebuah permainan, sebuah impuls untuk bermain.

Maka yang sentral bagi postmodernisme adalah cita-cita kebudayaan, bahasa, estetika, narasi, ciri simbolik dan ekspresi literer dan makna. Dalam modernisme, semua ini dianggap sekunder bagi ekonomi, ilmu pengetahuan, objektifikasi konkret, konstruksi analitik, esensi, dan representasi metaforis.

Dalam kaitannya dengan proses, modernisme lebih menekankan kontinuitas, *progress*, tatanan yang stabil, dan harmoni. Postmodernisme justru lebih melihat proses-proses ini sebagai ilusioner dan fiksional dan bahwa kondisi kehidupan manusia justru diwarnai dengan praktik-praktik kecil, diskontinuitas, pluralitas, *chaos*, instabilitas, perubahan yang konstan, cair, bahkan paradoks (Firat dan Venkatesh 1995: 243). Postmodernisme menolak batas-batas disipliner yang kaku dan sebaliknya menghidupi kemungkinan-kemungkinan pilihan dalam pemikiran dan praktik.

Dalam teori sosial dan politik, postmodernisme menerima kemungkinan berbagai teori, entah saling mendukung atau tidak, bisa melegitimasi posisi dalam wacana tentang manusia. Dalam bidang ekonomi dan kehidupan, postmodernis melihat produksi dan konsumsi merupakan bidang utama partisipasi komunitas, seperti dinyatakan oleh Soja (1989), "*the political economy of land as a factor of production has now been replaced by a different discourse-the cultural economy of space. Similarly, it includes multiple voices in its discourse based on gender, race, and colonial past*".

Namun di atas semua itu, posisi subjek dalam kebudayaan modern seperti yang tampak pada pemikiran Cartesian, memegang peranan sentral dalam kebudayaan modern. Visi alternatif postmodernis justru tidak saja melihat manusia dan kebudayaan tidak semata-mata dari unsur kognitif, melainkan dari berbagai kemungkinan: intuitif, reflektif, komunikatif, pluralitas, dan sebagainya. Ide-ide postmodernis itu membuka kemungkinan atau menjadi momentum untuk mencermati kehidupan manusia dalam era informasi karena peran teknologi dan komunikasi elektronik begitu sentral dalam meningkatkan kehidupan manusia.

Menurut Firat dan Venkatesh (1995) kehidupan dan budaya masyarakat saat ini ditandai dengan estetikalisisasi dan signifikansi kultural hampir dalam semua aspek kehidupan. Featherstone (1988) juga menyatakan bahwa kita sekarang memang hidup

dalam era dimana signifikansi kultural demikian tinggi. Dalam bidang pengetahuan misalnya, semua jenis pengetahuan merupakan konstruksi pribadi dan sekaligus juga sosial. Bahkan pengetahuan itu sendiri merupakan produk bahasa dan wacana. Derrida misalnya menyatakan bahwa tidak ada realitas yang abadi, tidak ada kebenaran yang abadi atau kebenaran yang transendental. Lyotard menyatakan bahwa tidak ada metanarasi atau satu visi tunggal tentang sejarah (Vattimo) (Firat dan Venkatesh 1995: 244). Kaum postmodernis beranggapan bahwa ada banyak narasi. Modernisme memang merupakan salah satu bentuk narasi karena ia secara historis terikat pada ruang-waktu juga. Tetapi kesalahan modernisme, menurut kaum postmodernis, adalah status universal dan transendental yang ingin ditegakkannya berdasarkan kategori seperti subjek, satu, akal, kebenaran, ilmu, pengetahuan, rasionalisme, kemajuan, dan sebagainya. Kategori-kategori ini, oleh modernisme, dianggap fondasi. Postmodernisme menganggap fondasi ini sebagai sesuatu yang nihil, bahkan destruktif. Sebagai ganti dari universalisme dalam pemikiran dan praktik, postmodernisme menawarkan lokalisme dan partikularisme. Dari pada akal yang berpusat pada subjek (*subject-centered*) postmodernisme menawarkan pengalaman-pengalaman yang justru berlangsung di luar subjek.

2.3. Transformasi Masyarakat dan Kebudayaan Postmodern

Kebudayaan postmodern seharusnya dimengerti dalam lingkup yang sangat umum dan mencakup berbagai bidang: budaya massa-populer, media, tekstual, dan seluruh pengalaman kehidupan sehari-hari. Dominic Strinati (1992: 2-3, seperti dikutip McGuigan 2006: 6) merumuskan 5 karakteristik dari kebudayaan postmodern. Kelima karakteristik tersebut, adalah:

1. Runtuhnya distingsi antara kebudayaan dan masyarakat,
2. Penekanan pada gaya (*style*) dengan mengorbankan substansi dan isi (*content*)
3. Hilangnya perbedaan antara budaya tinggi (seni) dan budaya populer,
4. Ambuknya batas-batas ruang dan waktu, dan
5. Berakhirnya 'meta-narasi'.

Sesungguhnya ciri-ciri ini akan dibahas secara terpisah pada bidang-bidang yang relevan secara terperinci dalam bab-bab berikut. Tetapi karena semua ciri ini merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, cukuplah beberapa ide pokok yang secara langsung relevan dengan kebudayaan disinggung di sini.

Jean-Francois Lyotard, mendeklarasikan berakhirnya *grand* narasi atau meta-narasi. Marxisme sebagai salah satu narasi besar tentang masyarakat tanpa kelas yang dibangun melalui revolusi proletar untuk mengambil alih hak milik pribadi dari pemilik modal dan dengan cara semacam itu kapitalisme diakhiri dan kesejahteraan sosial terwujud, dianggap tidak lagi bisa dipercayai. Bagi Lyotard, budaya postmodern itu adalah budaya berpikir, budaya gagasan, atau tepatnya sebuah kondisi dan praktik epistemologis yang membuka kepalsuan praktik legitimasi pengetahuan. Di bidang Arsitektur, orisinalitas gaya dipertanyakan dan percampuran gaya semakin dimungkinkan. Dalam dunia hiburan hiperrealitas Disney, McDonaldisasi, dan sebagainya menandai ciri superfisial dan penampilan dari pada isi dan kedalaman.

Masyarakat postmodern dipahami melalui tulisan-tulisan kaum postmodernis yang menunjukkan bahwa masyarakat dan kebudayaan sekarang tidak lagi bisa dipahami dengan menggunakan kerangka berpikir modern yang sudah ketinggalan zaman. Perubahan tersebut sejatinya berlangsung dalam ranah kebudayaan (*culture*) dari pada dalam masyarakat (*society*). Artinya perubahan masyarakat tidak lain dari perubahan kebudayaan. Yakni perubahan dari penekanan terhadap tekstual ke percakapan, dari teori ke refleksi, dari kebebasan ke emansipasi, dari idea ke tindakan, dari universalisasi ke partikularisasi, dari totalisasi ke pluralitas, dari *uniform* ke keberagaman. Tentang

penekanan terhadap pengetahuan yang reflektif itu, Ulrich Beck, Anthony Giddens, dan Scott Lash (1994 : vii) dalam karya kolaboratif mereka menegaskan, "*The social and cultural worlds today are thoroughly infused with reflexive knowledge*" (McGuigan 2006: 139). Model pengetahuan reflektif itu tampak ketika institusi-institusi sosial sekarang menerapkan *self-monitoring*, semacam 'pemeriksaan bathin', dalam mengelola institusi dan praktik sosial sehari-hari.

Salah satu ciri utama masyarakat dan kebudayaan postmodern adalah diferensiasi bidang sosial dan kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki sistem nilainya sendiri sehingga tidak ada masyarakat yang mengklaim menjadi model tunggal bagi perkembangan masyarakat mana pun. Modernisasi dalam masyarakat modern selalu mengambil model masyarakat dan kebudayaan Barat sebagai referensi atau patokan dalam membangun masyarakat. Bagi kaum postmodernis, setiap masyarakat memiliki kondisi sosial dan historis yang berbeda sehingga pengembangan masyarakat mesti berangkat dari kondisi lokal masyarakat tersebut.

Keberagaman budaya tidak hanya perlu diakui secara legal dan dilestarikan melainkan juga harus diberi ruang yang seluas-luasnya untuk berkembang dalam kebersamaan dengan kebudayaan lain. Yang perlu diupayakan adalah apa yang disebut Lash (1990) sebagai '*dialectic differentiation*'. Suatu kondisi dimana setiap kebudayaan yang berbeda hidup berdampingan secara harmonis dan produktif dalam masyarakat.

2.4. Masyarakat dan Kebudayaan 'Risiko'

Salah satu ciri utama masyarakat postmodern adalah pengakuan adanya ketidakpastian (McGuigan 2006: 1). Dalam seluruh bidang kehidupan tidak ada yang pasti. Mungkin satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang penuh dengan risiko, hasil dari kontradiksi-kontradiksi struktural dalam masyarakat industri modern. Kontradiksi-kontradiksi tersebut bukan terutama lahir dari krisis melainkan karena ditegaskannya sisi kehidupan tertentu dan dengan demikian menenggelamkan sisi kehidupan yang lain. Praktik budaya yang materialis misalnya, pada gilirannya menyingkirkan nilai dan praktik kehidupan yang spiritual. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mau tak mau mesti menguras kekayaan alam. Ketegangan terjadi antara eksploitasi dan konservasi, antara keamanan dan kecemasan, antar kehidupan sosial dan kehidupan pribadi, antara masyarakat dan individu, antara publik dan privat.

Segala sesuatu yang tidak diharapkan dapat saja terjadi. Tidak ada keyakinan atau sistem yang tidak dipertanyakan. Agama, keyakinan, pengetahuan, pendidikan, politik, hukum, dan sebagainya tak luput dari serangan. Menurut McGuigan, satu-satunya sistem ekonomi yang terus bertahan meskipun hegemoni pasar dan pencarian keuntungan dan akumulasi tanpa henti dalam dunia terus dikritik, ia mampu memperbarui dan memodifikasi dirinya sendiri. Itulah sistem ekonomi kapitalisme. Gerakan yang ingin menegakkan keadilan global dengan memprotes ketamakan kapitalisme negara-negara kaya yang menggembosi kapitalisme lokal melalui investasi kapital global dan multinasional seakan tak bisa menghentikan gurita kapitalisme global. Itulah sebabnya, menurut McGuigan, sekarang ini sedang berlangsung upaya kapitalisme sendiri untuk menormalisasi dirinya sendiri guna merealisasikan cita-cita kebebasan dan kesamaan kesempatan untuk berkembang.

Runtuhnya sosialisme dan totalitarisme di satu sisi dan semakin mengglobalnya kapitalisme dan demokrasi sebagai budaya politik-ekonomi postmodern, menurut McGuigan, bukanlah sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Budaya dan peradaban kapitalis yang menemui momentumnya dalam revolusi industri pada akhir abad 18 sudah berakar lama dalam situasi dunia ratusan tahun silam. Bahwa kapitalisme muncul sebagai perangkat canggih dalam menjalankan ekonomi, menjalankan bisnis, dinamis secara

teknologis, dan revolusioner secara sosial dan kultural merupakan salah satu tonggak penting perjalanan modernitas. McGuigan menyatakan bahwa memang sedang terjadi perubahan postmodernisasi kebudayaan, tetapi basisnya memang ekonomi (McGuigan 2006: 3). Kebudayaan dan peradaban modern adalah kebudayaan dan peradaban kapitalis. Dengan demikian kebudayaan postmodernisme dianggap sebagai perkembangan lanjut modernisasi (mostmodern). Dalam bahasa Fredric Jameson, postmodernisme merupakan 'logika kultural dari kapitalisme lanjut' (*the cultural logic of late capitalism*).

Salah satu ciri masyarakat postmodern adalah penciutan ruang kehidupan dan budaya berkat globalisasi. Tetapi globalisasi, misalnya, seperti tampak pada pemikiran Anthony Giddens, bukanlah bagian dari kondisi kehidupan dan budaya postmodern melainkan dinamika transformatif dalam tubuh modernisme sendiri. Budaya postmodern dipahami sebagai perkembangan paling baru dari modernitas. Giddens menulis, "*Postmodernism, if it means anything, is best kept to refer to styles or movements within literature, painting, the plastic arts, and architecture. It concerns aspects of aesthetic reflection upon the nature of modernity*" (Giddens: 1990: 45, dikutip McGuigan 2006: 5).

Tetapi harus diakui bahwa banyak aspek kebudayaan modern sekarang ini, mulai ditinggalkan. Menurut McGuigan dan terutama pada pemikiran Harvey, hadirnya postmodernisme tidak mengakhiri kapitalisme (modernitas). Meskipun bagi kaum Neo-Marxis seperti Jameson dan Harvey bahwa ekonomi dan kapitalisme itulah yang menjadi basis material bagi perubahan pengetahuan, kebudayaan, seni, nilai, agama, dan sebagainya, menurut McGuigan, perubahan ekonomi justru dimungkinkan oleh pengetahuan dan kebudayaan dan bukan sebaliknya, seperti ditegaskan McGuigan, "*If there was a transition occurring from one civilizational form to another, from modernity to postmodernity, the transformation was wrought by knowledge and culture, different ways of knowing, representing and identifying, rather than the more conventionally material factors of economics and the use of nature*" (McGuigan 2006: 2).

Maka perubahan dari kebudayaan modern ke kebudayaan postmodern tidak sekedar perubahan kondisi ekonomi yang materialistik melainkan justru pada tataran kebudayaan idea, gagasan, subjektivitas, atau yang 'spiritual'. McGuigan menegaskan, "*The postmodern declaration is, then, first and foremost, to do with ideas and subjectivity, how we think and signify: it is not primarily a claim concerning 'material reality'*" (McGuigan 2006: 2). Itulah sebabnya mengapa, secara ekstrem, postmodernisme, dari perspektif kebudayaan, bisa dilihat sebagai idealisme filsafati tentang bagaimana kebudayaan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dialektikanya dengan ekonomi, dikembangkan.

2.5. Kebudayaan Simbolik dan Pertunjukan

Firat dan Venkatesh (1995: 250) menunjukkan bahwa era postmodernitas dikenal dengan era simbolik dan pertunjukan (*spectacle*). Vattimo (1992: 24) berpendapat bahwa teknologi informasi dan komunikasi yang baru memungkinkan spektakularisasi apa yang sebelumnya kelihatan tidak mungkin. Apa yang dulunya mungkin sekedar dongeng, sekarang divisualisasi dan dipertunjukan seolah-olah real.

Appadurai (1990) menghubungkan perkembangan budaya simbolik dan pertunjukan tersebut dengan perkembangan spektakuler budaya konsumsi yang tidak hanya berlangsung dalam lingkup lokal melainkan global. Perkembangan budaya konsumsi pada gilirannya menegaskan dominasi konsumsi terhadap produksi. Mourrain (1989) menegaskan, "*living the spectacle reinforces the dominance of consumption over production. In postmodernism, production is considered neither the most meaningful activity nor the domain of creation of value as it was in modernism. Postmodernism has displaced the locus of analysis from the domain of production to the realm of consumption*".

Konsumsi merupakan momen dimana pertukaran simbolik menentukan dan mereproduksi tatanan sosial melalui penciptaan simbol dan makna. Implikasi dari proses ini

adalah bahwa konsumsi tidak lagi dilihat sebagai tujuan melainkan momen dimana banyak hal dapat diciptakan dan diproduksi. Konsumsi bukanlah tindakan personal, atau tindakan privat konsumen melainkan suatu tindakan sosial di mana makna-makna sosial, kode sosial, ideologi politik, dan relasi diproduksi dan direproduksi kembali (Breen 1993). Insight-insight postmodernis mengantarkan kita untuk menyimpulkan bahwa produksi tidak pernah berhenti; ia merupakan proses terus-menerus; setiap momen mengkonsumsi sesuatu sekaligus merupakan proses produksi entah objek, barang, individu, penanda, gambaran, simbol, atau apa saja. Produksi simbol yang menandai kebudayaan postmodern lalu menjadi aktivitas yang hadir di mana-mana.

Simbol-simbol yang merupakan salah satu karakter utama kebudayaan tidak memiliki asal spesifik tertentu dan dapat dimanipulasi melalui sistem tanda. Dalam proses ini, konsumen menjadi seorang konsumen simbol/penampilan yakni bagaimana objek dipresentasikan kepadanya. Dalam proses pemakaian simbolik ini, konsumen mencari makna, pengalaman dan pasar yang memproduksi penampilan.

Debord (1983) menunjukkan bahwa masyarakat kontemporer merupakan *"the society of the spectacle"* (Firat dan Venkatesh 1995: 251). Dalam masyarakat ini, yang real adalah segala yang bergerak dari pengalaman real dan menjadi sebuah representasi itu sendiri. Masyarakat dimana *"The spectacle circumscribes reality, and any experience or discourse that arises within it becomes a spectacle"*. Dalam pasar kontemporer, gestur yang biasa dan aktivitas kehidupan sehari-hari dikemas secara glamor dan mengiurkan, komoditi disempurnakan dengan peran yang dimainkan dan gaya hidup; bahkan perbedaan pendapat dan kritik dikomodifikasi dan dijual kepada mereka yang mengalami dan memproduksi mereka. Seperti ungkapan Hegel, "yang rasional itulah yang real dan real itulah yang rasional", Debord menegaskan bahwa kebudayaan masyarakat kontemporer, *"Reality rises up within the spectacle, and only the spectacle is real"* (Firat dan Venkatesh 1995: 251).

Baudrillard (1983) memperluas tesis Debord dengan menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan wacana kritis dalam pemujaan terhadap yang spektakuler tersebut. Maka Baudrillard kemudian mengembangkan pandangan tentang hiperrealitas. Dunia simbol dan gambaran dianggap lebih real dari pada realitas, *"more real than reality itself"* (Baudrillard 1983: 147). Baudrillard menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat kontemporer selalu berusaha untuk mencari visi yang lebih baik apa yang dianggap sebagai realitas (yang merupakan konstruksi sosial) dan apa yang mengkonstitusikan ontologi dasar masyarakat kontemporer.

Bagi Baudrillard (1981) masyarakat *spectacle* adalah masyarakat signifikansi. Sebuah objek konsumsi layak dikonsumsi kecuali ia dilepaskan dari determinasi fisiknya dan memiliki makna dan simbol. Yang terpenting dari suatu objek bukanlah determinasi fungsionalnya sebagai suatu instrumen, nilai komersialnya sebagai produk, melainkan dibebaskannya dari unsur-unsur ini dan berperan sebagai tanda (*sign*) yang ditangkap oleh logika formal *fashion*, misalnya oleh logika diferensiasi (Baudrillard 1981: 67). Melampaui analisis Marxian tentang nilai guna dan nilai tukar, ia melihat semua relasi manusia didasarkan pada nilai tanda (*sign value*) (Firat dan Venkatesh 1995: 151). Dunia bukanlah sesuatu yang representasional atau material melainkan murni simbolik. Bahkan lebih dari simbolik, dunia itu adalah signifikansional. Konsumen-objek menjadi sebuah kode atau penanda makna yang selalu berubah melalui logika *fashion* atau diferensiasi.

2.6. Hiperrealitas Kebudayaan

Salah satu konsep yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan kebudayaan yang sedang berlangsung sekarang ini adalah hiperrealitas kebudayaan dari Baudrillard. Hiperrealitas memang agak sulit diberi definisi yang tepat. Tetapi definisi yang diberikan oleh beberapa pemikir berikut agak sedikit menggambarkan makna konsep tersebut. Jean Baudrillard, mengartikan hiperrealitas sebagai *"A real without origin or reality"*, suatu realitas

tanpa realitas. Atau, dalam istilah Umberto Eco, suatu kepalsuan otentik, "*the authentic fake*", suatu realitas yang tidak otentik tetapi dianggap sebagai sesuatu yang otentik. Realitas semacam ini sangat jelas tampak dalam perkembangan masyarakat teknologi-informasi seperti internet yang mampu menciptakan dunia maya. Maka, pemikir seperti Pater Sparrow, menyebut hiperrealitas itu sebagai "*the virtual irreality*" (irealitas maya).

Dalam pandangan Baudrillard, masyarakat modern (dan terutama postmodern) tidak mampu membedakan realitas dari simulasi tentang realitas (fantasi), atau representasi dari simulasi, kenyataan dari citra, terutama dalam perkembangan kebudayaan yang dipengaruhi oleh teknologi media. Orang tertipu oleh fantasi, citra dan simulasi tanpa mampu melihat kenyataan sesungguhnya. Perdebatan hukum di TV, banyak kasus hukum diselidiki dan divonis, banyak produk hukum dibuat, institusi-institusi hukum baru dibentuk (KPK dan KY), tapi semua ini hanyalah citra, simulasi, fantasi, tentang esensi keadilan yang seharusnya direpresentasikan oleh hukum. Maka hukum sekarang ini tidak lain dari sepasukan citra, simulasi dan fantasi. Semua itu sekedar *copy* dari realitas tapi bukan realitas itu sendiri. Itulah yang disebut Baudrillard, 'hiperrealitas', 'realitas dibalik realitas', 'realitas yang bukan realitas'.

Peta misalnya, adalah suatu citra, 'gambar' tentang realitas tapi bukanlah realitas itu sendiri. Tetapi peta itulah yang seolah lebih penting dari pada batas riil geografis. Baudrillard menulis, "*Henceforth, it is the map that precedes the territory - precession of simulacra - it is the map that engenders the territory and if we were to revive the fable today, it would be the territory whose shreds are slowly rotting across the map.*"

Hiperrealitas kebudayaan adalah 'realitas yang diwakili' (*reality by proxy*). Misalnya "M" bagi MacDonalds. Dalam kenyataan 'M' tidak merepresentasikan apa pun tentang makanan. Produksi makanan sama sekali tidak identik dan tak terbatas. Tetapi label "M" tidak saja selalu dan melambangkan restoran *fast food MacDonalds* melainkan juga 'selera global', 'anak gaul', dan sebagainya.

Konsep hiperrealitas penting sebagai paradigma untuk menjelaskan kondisi-kondisi kultural yang sedang berlangsung sekarang ini. Konsumerisme, merupakan faktor yang turut menciptakan hiperrealitas atau kondisi hiperreal. Misalnya merek 'X' menunjukkan bahwa sesuatu itu modern atau sesuai dengan mode terakhir, atau mobil 'y' mengindikasikan kemakmuran seseorang. Hiperrealitas mensiasati (tipu daya) kesadaran agar lepas dari keterlibatan emosional real apa pun, sebaliknya memilih simulasi artifisial dan mereproduksi terus-menerus penampilan yang pada dasarnya kosong. Pada intinya (meskipun Baudrillard sendiri menolak menggunakan istilah ini) pemenuhan (*fulfillment*) dan kebahagiaan (*happiness*) diperoleh melalui simulasi dan imitasi simulakrum sementara/temporer dari realitas dari pada interaksi dengan yang 'real' dari realitas.

Berinteraksi di tempat hiperreal seperti Casino misalnya, memberi kesan pada subjek bahwa orang berjalan bersama dunia fantasi dimana setiap orang itu terus bermain. Dekor atau hiasan tidak otentik, semuanya hanyalah suatu *copy* dari realitas dan semua hal terasa seperti mimpi.

2.7. Kebudayaan Hiburan: McDonaldisasi, Disneysasi, dan Barby

Budaya hiburan merupakan contoh paling tepat untuk menunjukkan perkembangan kebudayaan postmodern sebagai imbas dari penolakan postmodernisme atas substansi, esensi, kedalaman, dan orisinalitas. McDonald, Disney, dan Barby merupakan contoh paling tepat untuk menunjukkan tidak adanya substansi, tidak adanya esensi, tidak adanya kedalaman, dan tidak adanya orisinalitas realitas dan minat kebudayaan postmodern. Dengan mengikuti apa yang disebut Ritzer sebagai McDonaldisasi, Bryman (2004), seperti dikutip Jim McGuigan dalam bukunya *Modernity and Postmodern Culture* (2006), menunjukkan bahwa budaya postmodern tampak sangat jelas dalam perkembangan dunia hiburan seperti dunia Disney. Venturi, Eco, dan Baudrillard menunjukkan bahwa

dunia hiburan semacam Disney mempertontonkan *pastishe* dan meruntuhkan tembok pemisah antara fantasi dan realitas. Dunia tersebut mempertontonkan era 'post-turis', sebuah era dimana hiburan bukan lagi pada apa yang alamiah melainkan pada 'rekaan', 'fantasi', dan imajinasi. Dunia hiburan semacam ini tunduk hanya berkaitan dengan korporasi, konsumerisme, kemajuan teknologi, dan individualisme melainkan juga propaganda kepentingan diri individu-individu dan perusahaan.

Disneysasi (*Disneyzation*), seperti pada McDonaldisasi, tidak lain dari upaya menerjemahkan atau mentransformasi suatu objek ke dalam sesuatu yang superfisial bahkan simplistik (McGuigan 2006: 30). Bryman menguraikan empat karakter Disneysasi, yakni:

1. *Theming*: melukiskan institusi atau objek dalam suatu narasi yang sebagian besar tidak berhubungan dengan institusi atau objek yang dilukiskan, seperti *cuisine* atau restoran dengan narasi alam Barat.
2. Konsumsi *hybrid*: sebuah trend umum dimana bentuk-bentuk konsumsi dikaitkan dengan bidang-bidang institusional yang berbeda tetapi saling berhubungan dan semakin sulit untuk dibedakan.
3. *Merchandising*: promosi dan penjualan barang dalam bentuk hak cipta *image* dan atau logis, termasuk proyek-proyek berlisensi.
4. Pekerja pertunjukan (*performative labour*): berkembangnya kecenderungan untuk pekerjaan bidang jasa pertunjukan sebagai profesi baru.

Menurut McGuigan, tema performatif atau pertunjukan ini merupakan bagian dari perkembangan budaya postmodern. Arlie Russell Hochschild menyebutnya sebagai *emotional labour* atau pekerja yang bergelut dengan emosi masyarakat (McGuigan 2006: 31). Kapitalisme konsumsi, menurut Hochschild, membutuhkan pekerja jasa yang selalu mempertontonkan yang positif dan menyenangkan emosi konsumen.

Susan Davis (1996 dan 1997) mendiskusikan tema fenomena taman (*park phenomenon*) sebagai representasi dalam pertunjukan Disney. Tema itu tidak hanya menghibur dan membahagiakan jutaan anak di seluruh dunia melainkan juga menjadi salah satu poin penting yang menguntungkan dalam konglomerasi dan monopolisasi media. Konglomerat media seperti Universal Studios menikmati keuntungan luar biasa dari integrasi vertikal dan eksploitasi sinergis produk dalam era informasi.

Yang jelas, Disney kemudian menjadi *brand images* yang sangat kuat dengan karakter Mickey Mouse yang begitu mendunia. Bahkan tidak hanya karakter dan citra Mickey Mouse yang mendunia melainkan dunia Disney itu sendiri kini hadir dimanamana. Ada Disneyland Tokyo, Disneyland Paris, dan Disneyland Hong Kong. Ia bukan sekedar hegemoni kapitalisme ekonomi global melainkan terlebih hegemoni kultural global, seperti ditegaskan oleh McGuigan, "*The cultural-economic-political complex, of which Disney is a prime example, is spreading rapidly around the world, capturing the attention of middle-class consumers wherever great wealth is being created. It tells a story, indeed a grand narrative, about triumph of capitalism and the joys of sovereign consumption, and, in this sense, may be seen as modern*" (McGuigan 2006: 32).

2.8. Postmodernisme sebagai Kritik terhadap Kebudayaan Modern

David Morley dan Kuan-Hsing Chen dalam buku pengantar untuk buku yang diabdikan untuk Stuart Hall, *Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural Studies* ([1996]2005), melihat berbagai versi postmodernisme. Tetapi semua versi itu merupakan upaya untuk menghidupkan visi dan praktik kebudayaan baru untuk mengganti visi dan praktik membudaya modern yang dianggap sudah usang. Postmodernisme bahkan tidak sekedar dianggap sebagai visi baru yang memberi tempat bagi perhatian terhadap kebudayaan di luar Barat melainkan juga bagaimana kebudayaan Barat bermimpi dan merefleksikan

dirinya sendiri. Maka Hall kemudian mengingatkan agar bentuk orientalisme (Said), egologi, atau 'imperialisme ontologis' sebagaimana diperkenalkan oleh Levinas jangan sampai terkungkung hanya bagi pemahaman terhadap kebudayaan Barat melainkan juga seharusnya bagi semua kebudayaan lain di luarnya (Morley dan Chen 2005: 14). Bukankah salah satu kata kunci postmodernisme adalah *decentering*? *Decentering* subjek, *decentering* filsafat, *decentering* nilai, *decentering* ideologi, dan sebagainya. Atau dalam bahasa Marshall Berman, *All That Is Solid Melts into Air*. Postmodernisme merupakan nama untuk segala perubahan yang berlangsung saat ini (meskipun memiliki akar pada modernisme dan modernitas sejak abad 18 bahkan terutama abad 19).

Lawrence Grossberg dan dengan demikian juga Hall dalam artikel *On Postmodernism and Articulation: An Interview with Stuart Hall*, dalam buku Morley dan Chen (2005), melihat postmodernisme sebagai konfigurasi kultural baru. Postmodernisme bukan sekedar kelanjutan dari proyek budaya Pencerahan dan Modernisme yang belum selesai melainkan pemahaman baru terhadap perubahan-perubahan kebudayaan masyarakat kontemporer terutama dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi sebagaimana ditegaskan oleh Marshall McLuhan sebagai '*medium is the message*'. Berhadapan dengan perkembangan kebudayaan baru tersebut, kita memang tidak lagi menghidupi kebudayaan modern melainkan juga cenderung beradaptasi atau menggabungkan diri secara tidak kritis dengan kebudayaan postmodern. Meskipun demikian, John Wyver dalam bukunya *Television and postmodernism* (1986) misalnya menyatakan bahwa budaya massa saat ini justru tidak sekedar menyerah pada gambaran, narasi, dan keinginan berhadapan dengan pengalaman nyata dunia real melainkan juga selalu menghidupkan kembali, menggunakan kembali, memperbincangkannya, dan bahkan memfantasikan kembali dalam setiap aspek pengalaman hidup kita (Wyver 1986:54).

Hans Bertens dalam bukunya *The Idea of the Postmodern: A History* [1995 (2005)] menyatakan bahwa pemikiran dan gerakan dekonstruksi postmodernisme yang menjamur dalam berbagai disiplin sejak tahun 1970-an tidak lain dari suatu politik membudaya. Postmodernisme adalah suatu gerakan formasi sosial-budaya baru. Pertanyaan pokoknya adalah model kebudayaan mana yang dikembangkan oleh postmodernisme sebagai kritik terhadap modernisme dan modernitas?

Postmodernisme adalah sebuah politik kebudayaan. Dalam bidang seni, entah seni visual atau fotografi, berkembang inovasi radikal dalam berbagai gaya dan bentuk. Dalam proses tersebut kaum postmodernis menyerang dan menolak representasi dan orisinalitas suatu karya seni serta museum sebagai institusionalisasi kekuasaan seni (Bertens 2005: 84). Budaya seni postmodern berusaha menghapus dikotomi antara pusat dan margin, elit dan populer/pluralisme, solidaritas dan ironi (Rorty); mentransformasi kondisi sosial-politik dan ekonomi dengan mengembangkan kebudayaan (ekonomi) baru (Harvey). Seni postmodern merupakan sebuah transisi kebudayaan dari penekanan pada unsur diskursif ke figural/visual, dari menjelaskan ke pemahaman, dari esensi/substansi/ontologis ke gambaran, penampilan, dan sensasi; dari kontinuitas ke diskontinuitas, dari sentralisasi ke fragmentasi.

David Harvey, dalam bukunya *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change* (1989), menyatakan bahwa postmodernisme tidak menunjukkan sesuatu yang lain selain perluasan logis dari kekuasaan pasar terhadap seluruh lingkungan produksi kultural (Harvey 1989: 62). Dalam ekonomi, berlangsung apa yang disebut Harvey sebagai peralihan dari ekonomi Fordisme yang kaku ke regulasi ekonomi post-Fordisme dengan akumulasi yang lebih fleksibel. Tentang regulasi ekonomi baru tersebut, Harvey menulis, "*the contrast between present political-economic practices and those of the post-war boom period are sufficiently strong to make the hypothesis of a shift from Fordism to what might be called a "flexible" regime of accumulation a telling way to characterize recent history*" (Harvey 1989: 124). Perbedaan antara ekonomi baru dengan ekonomi modern (lama) dijelaskan oleh Harvey

demikian, "This 'flexible accumulation' is marked by a direct confrontation with the rigidities of Fordism. It rests on flexibility with respect to labour processes, labour markets, products, and patterns of consumption. It is characterized by the emergence of entirely new sectors of production, new ways of providing financial services, new markets, and, above all, greatly intensified rates of commercial, technological, and organizational innovation" (Harvey 1989: 147). Regulasi budaya ekonomi baru itu, justru dilakukan berhadapan dengan kompresi ruang-waktu dalam era teknologi komunikasi dan informasi yang berusaha 'mengatasi' ruang melalui waktu.

Tetapi Zygmunt Bauman dalam bukunya *Intimations of Postmodernity* (1992) justru melihat postmodernisme sebagai modernism yang sadar akan dirinya sendiri, *modernity for itself*. Pluralisme, keberagaman, kontingensi, solidaritas, lebih dilihat sebagai upaya mengoreksi kelemahan modernisme sendiri yang secara ekstrem ingin menegakkan universalitas, homogenitas, monoton dan klaritas. Bauman menegaskan, "The postmodern condition can be therefore described, on the one hand, as modernity emancipated from false consciousness; on the other, as a new type of social condition marked by the overt institutionalization of the characteristics which modernity—in its designs and managerial practices—set about to eliminate and, failing that, tried to conceal" (Bauman 1992:187-8).

2.9. Budaya Kritis

Bagaimana pun harus diakui bahwa spirit yang dikembangkan oleh postmodernisme adalah secara kritis mempertanyakan kembali apa yang sejauh ini dianggap mapan, benar, atau fondamen yang dijadikan patokan dalam memahami sesuatu. Metode kritis yang dikembangkan oleh postmodernisme adalah dekonstruksi. Dengan metode ini apa yang dianggap benar dipertanyakan kembali guna mengungkap kepalsuannya dan menyusun kebenaran-kebenaran baru. Metode dekonstruksi ini mirip dengan metode kesangsian Descartes.

Stephen R.C. Hicks dalam bukunya, *Explaining Postmodernism: Scepticism and Socialism from Rousseau to Foucault* (2004: 18-20) memerinci beberapa persoalan budaya yang dipertanyakan oleh postmodernisme. Persoalan-persoalan tersebut antara lain: apakah kebudayaan Barat perlu menjadi kanon yang menyuling kebudayaan lain dan dengan demikian secara ideologis menjadi eksklusif, sempit dan intoleran? Apakah Kristopher Columbus adalah seorang pahlawan modern atau justru seorang imperialis yang menghapus keyakinan pribumi atas nilai-nilai yang mereka dianut? Apakah AS progresif dalam hal kebebasan, kesamaan derajat dan kesempatan bagi semua orang atau justru rasis, kelas, bias jender, misalnya dengan pasar pornografi yang begitu massal? Apakah konflik-konflik sosial harus dipecahkan berdasarkan prinsip bahwa individu seharusnya diganjar menurut jasa-jasa individual dan bukan menurut karakter moral yang relevan seperti ras atau jenis kelamin? Apakah Barat yang liberal itu lebih membebaskan dunia dan masa depan umat manusia yang lebih baik atau justru malah menghancurkan potensi-potensi kultural masyarakat pribumi atau lokal? Apakah *reason*, *science*, dan teknologi sepenuhnya memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta dan membuat dunia lebih sehat, lebih bersih, dan lebih produktif atau justru semakin elitis, eksploitatif, dan destruktif? Apakah liberalisme, pasar bebas, teknologi dan kosmopolitanisme merupakan prestasi sosial yang dapat dinikmati oleh semua kebudayaan, termasuk kebudayaan non-Barat yang hidup secara sederhana dan harmoni dengan alam? Apakah kebudayaan Barat buta terhadap kenyataan bahwa Barat yang elitis dan imperialis dengan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan kapitalisme sebagai basis ideologis kulturalnya mampu menampung eksistensi semua kebudayaan lain?

Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa postmodernisme bukan sekedar gerakan pemikiran teoretis entah dalam bidang filsafat, agama, seni, arsitektur, literer, dan sebagainya melainkan sebuah keprihatinan terhadap persoalan-persoalan sosial budaya yang ada dalam masyarakat kontemporer dewasa ini. Hicks menyebut postmodernisme

sebagai gerakan filosofis dan kultural yang sangat komprehensif. Target gerakan postmodernisme adalah modernisme dan realisasinya dalam Pencerahan beserta turunannya. Postmodernisme ingin menentang elemen-elemen kunci pemikiran Pencerahan dan modern (Hicks 2004: 21).

Adanya gerakan-gerakan kultural Pencerahan dan modernisme memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah intelektual, kedudukan teori, dan segala persoalan lain berkaitan dengan agama, epistemologi, seni, arsitektur, politik, metafisika, termasuk juga nilai, moralitas, dan hakikat manusia. Bab-bab selanjutnya akan menguraikan nilai-nilai kultural yang diperjuangkan oleh postmodernisme dalam upayanya mengatasi kelemahan-kelemahan modernisme tersebut.***

Bab 3

Postmodernisme dalam Seni

3.1. Pengantar

Steven Best dan Douglas Kellner dalam buku mereka, *The Postmodern Turn*, mengutip pandangan Frederic Jameson, menyatakan bahwa pemikiran dan praktik modern dalam bidang seni, filsafat, novel, dan film sudah berakhir. Generasi baru yang berkiprah tahun 1960-an tidak hanya menolak prinsip dan praktik modern melainkan juga menganggapnya sebagai mimpi buruk yang harus disingkirkan. Jameson menulis, "*expressionism in painting, existentialism in philosophy, the final forms of representation in the novel, the films of the great auteurs, or the modernist school of poetry (as institutionalized and canonized in the works of Wallace Stevens): all these are now seen as the final, extraordinary flowering of a high modernist impulse which is spent and exhausted with them. . . . the younger generation of the 1960s will confront the formerly oppositional modern movement as a set of dead classics, which 'weigh like a nightmare on the brains of the living'.*"

Dalam bidang seni, muncul dan berkembangnya 'sensibilitas' dan tendensi-tendensi baru dalam bidang seni dalam hal metode, gaya (*style*), dan kesadaran seni. Sensibilitas dan kesadaran baru tersebut tampak dalam kritisisme dan karya-karya seni yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap bentuk-bentuk dan ideologi seni modern. Pemikiran, kesadaran, dan karya-karya seni modern (terutama di Eropa dan Amerika) dilihat sebagai sesuatu yang sudah basi, menjemukan, ambisius, dan elitis dan dengan demikian ditolak. Para pengkritik seni modern lalu merayakan datangnya kesadaran, pemikiran, dan karya seni baru dalam bendera 'postmodernisme'. Seni modern dianggap sudah mati. Pemikiran dan kesadaran estetik yang baru tersebut diwujudkan dalam karya-karya seni seperti novel-novel William Burroughs, musik John Cage, tari Merce Cunningham, lukisan Andy Warhol, seni populer, dan karya arsitektur Robert Venturi dan Philip Johnson. Postmodernisme tidak hanya membawa perubahan-perubahan dramatik dalam bidang arsitektur, literatur, lukisan, film, musik, dan tari melainkan juga memunculkan bentuk-bentuk seni baru seperti seni pertunjukan, konfigurasi multimedia, dan seni komputer yang memang menunjukkan bahwa kita dewasa ini menghidupi suatu kebudayaan baru khususnya dalam bidang seni. Meminjam istilah Baudrillard, model kebudayaan (baca: seni) simulakrum (Baudrillard, 1983a, 1993, 1994).

Dalam bab ini, akan diuraikan kritik postmodernisme terhadap seni modern. Tetapi sebelum membahas kritik postmodernisme terhadap seni modern, akan terlebih dahulu diuraikan ciri khas seni modern yang kemudian dikritik oleh postmodernisme dalam bidang seni.

3.2. Seni Modern

Untuk memahami pembalikan seni postmodern dari seni modern, kita perlu terlebih dahulu memahami karakteristik seni modern yang ingin ditolak oleh kaum postmodernis. Seni modern yang mulai berkembang sejak abad 18 dan terutama dalam abad 19 menunjukkan *style/gaya*, bentuk, teknologi, bahkan juga ideologi-ideologi artistik baru. Fungsi dan peran seni dan seniman dalam masyarakat modern pun tak luput dari kritik seni postmodern.

Seni modern berusaha untuk mengubah fungsi seni dari seni sebagai praktik publik ke seni sebagai karya privilese sang seniman. Seni modern ingin menyuarakan pengalaman dan ekspresi estetik personal sang seniman. Pada tahun 1980-an, penyair Paris Charles Baudelaire menyuarakan bentuk puisi modern yang menurut Baudelaire perlu menyuarakan keunikan pengalaman modern, khususnya guncangan-guncangan kehidupan perkotaan. Suksesor Baudelaire, Arthur Rimbaud juga menuntut agar seni harus menjadi

benar-benar modern. Sementara penyair Ezra Pound menyatakan bahwa seniman berkewajiban untuk memperbaruinya. Maka seniman modern berusaha untuk mencari inovasi, menciptakan sesuatu yang baru, bergelut dengan tema-tema kontemporer yang relevan dengan kehidupan masyarakat, dan menolak tradisi karena dianggap sudah usang. Tetapi semua upaya tersebut menciptakan privilese khusus bagi sang seniman.

Dengan menegasi bentuk-bentuk estetik lama kaum modernis ingin mengusahakan bentuk-bentuk seni baru. Dalam arti ini, modernisme dalam seni mengikuti proses modernisasi yang berlangsung dalam masyarakat. Modernisasi adalah proses menegasi tatanan masyarakat lama dengan menciptakan tatanan yang baru, tatanan yang diorganisasi secara rasional, memproduksi originalitas baru. Berman menyebut proses modernisasi sebagai "*creative destructive*". Destruksi kreatif itu berlangsung dalam seluruh bidang kehidupan (Berman 1982).

Sebagai respons terhadap kelemahan romantik dalam melihat peran progresif seni dalam masyarakat modern (kapitalis) dan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi massa dan pasar dalam dunia seni, kaum seniman modernis mengupayakan otonomi dalam bidang seni, menginspirasi pembebasan seni dari agama, moralitas, dan politik, sehingga seniman dapat mengejar tujuan-tujuan estetik secara murni dan otonom. Maka, karakter utama modernisme seni adalah kepercayaan pada otonomi seni. Seni, menurut kaum modernis, harus melepaskan diri dari ideologi sosial supaya tetap fokus pada medium estetik itu sendiri. Kaum modernis dalam bidang seni memegang prinsip seni untuk seni (*art for art's sake*). Otonomi seni ini pada akhirnya men-decentering proyek estetik. Orientasi estetik beralih dari penekanan terhadap karya estetik sebagai representasi dan imitasi realitas ke perhatian terhadap aspek-aspek formal karya seni.

Tidak hanya visi dan fungsi seni yang ingin diubah oleh seniman modern, melainkan juga mengeksplorasi bentuk-bentuk seni baru. Seni modern berusaha untuk memperbarui seni abad pertengahan dan romantik dengan bentuk-bentuk seni baru. Mulai dengan impresionisme di Perancis, seni modernis ingin meninggalkan konsep seni sebagai representasi realitas, seni sebagai mimesis, atau seni sebagai imitasi realitas. Sebagai gantinya, seni modern ingin mengeksplorasi bentuk-bentuk seni baru, original, memberi ruang sebesar-besarnya bagi visi alternatif dan eksperimen kemungkinan-kemungkinan estetik baru dengan menggunakan media artistik yang baru. Bentuk-bentuk dan style-style baru tersebut dianggap sebagai hasil eksplorasi kreativitas dan intuisi estetik sang seniman sendiri. Guna mengembangkan karya seni yang baru, seniman modernis berusaha mengambil jarak atau tepatnya memutuskan hubungan dengan seni sebelumnya. Produk seni yang dihasilkan seniman modern dianggap sebagai produk yang original sang seniman, hasil dari eksplorasi kemungkinan dan kapasitas estetis sang seniman sendiri.

Visi dan karya seni dengan demikian bercirikan *self-reference*. Artinya bentuk, teknik, dan visi baru tersebut tidak lagi dicari di luar diri sang seniman melainkan justru dari dalam diri sang seniman sendiri atau bahkan tentang diri sang seniman sendiri dan bukan tentang dan dari dunia sosial sekelilingnya. Karya seni dianggap sebagai hasil karya berdasarkan visi estetik dan pengalaman sang seniman sendiri. Dalam musik misalnya, Schoenberg dan para pengikutnya menghasilkan sistem musik *atonal* (tanpa nada) yang benar-benar baru yang memberi setiap not/nada dalam kesamaan skala musik chromatik dalam dua belas nada yang bisa diaktifkan sekaligus sebelum diulang. Tatanan not yang sewenang-wenang ini disebut '*tone row*' yang berfungsi seperti melodi dalam musik tradisional. Ketika ide yang sama diterapkan pada elemen-elemen lain pada bahasa musikal (ritme, dinamika, dan timbre) akan menghasilkan apa yang disebut sebagai musik '*serial*' (Glass, 1987: 13). Praktik ini menghasilkan musik modern yang abstrak yang suaranya diatur oleh teknik yang inventif dan formalisme yang ketat.

Dalam bidang seni lain, seniman modernis berusaha untuk menemukan apa yang khusus dan khas dalam melukis, menulis, memahat, dan sebagainya. Tetapi dalam proses

tersebut seniman modernis ingin tetap fokus untuk menggali kekayaan dari dalam seni itu sendiri. Elemen-elemen dari luar dibatasi. Pelukis-pelukis modernis misalnya, berusaha untuk mengeluarkan *literacy* (tulisan) dari lukisan. Seniman seperti Cézanne dan Picasso bereksperimen dengan bentuk-bentuk abstrak dan geometrik yang tak lagi berkaitan dengan representasi naturalistik. Komposer seperti Schoenberg dan Webern menciptakan suara ton dan sistem formal musik baru. Penulis seperti Pound dan Joyce menggunakan bahasa dengan cara yang sangat inovatif dan menghasilkan cara menulis baru. Para arsitek modern memunculkan desain dan bentuk rumah baru, mengeluarkan dekorasi estetik dengan berpaling ke fungsi dan kegunaannya. Kelompok seniman modern dalam hampir setiap bidang seni menciptakan secara dramatis karya-karya dan teknik-teknik seni yang inovatif.

Namun jika ditelaah lebih jauh, dorongan inovasi dan upaya mempertahankan kemurnian gaya seni kaum modernis sebetulnya dalam konteks yang lebih luas merupakan upaya melipatgandakan logika kultural modernitas. Motivasi penciptaan karya seni yang inovatif dan orisinal merupakan bagian dari upaya memproduksi 'tradisi baru' dan mengembangkan diferensiasi kultural yang berbeda dari era sebelumnya. Seni hanyalah bagian dari upaya penciptaan diferensiasi kultural tersebut. Di luar itu, masih ada diferensiasi kultural lain, misalnya soal nilai, moralitas, sains, dan sebagainya. Habermas, misalnya, melihat modernisasi dan modernitas sebagai upaya mendiferensiasi nilai dan putusan etis dalam kerangka logis dan rasional. Maka pencarian otonomi seni yang diupayakan modernisme, tidak lain dari upaya untuk merasionalisasi seni berdasarkan standar sains.

Dalam arti tertentu desakan perubahan dalam visi, kesadaran, bentuk dan gaya seni tidak bisa dilepaskan dari imperatif kapitalisme modern. Seni adalah salah satu komoditi yang dapat menjadi basis bagi keuntungan. Maka upaya kaum modernis menciptakan produk seni yang semakin variatif dan baru tidak lepas dari semangat mencari keuntungan. Variasi produk seni tidak hanya memperluas pasar, menciptakan kebutuhan dan 'rasa' baru, melainkan menciptakan margin keuntungan baru. Kondisi ini menciptakan kontradiksi internal dalam seni itu sendiri. Di satu sisi, produk-produk 'seni' harus disesuaikan dengan selera dan kebutuhan pasar tetapi di sisi yang lain dorongan untuk memurnikan seni dengan melepaskan pertimbangan-pertimbangan lain di luar seni (termasuk pertimbangan ekonomi) tidak pernah bisa diwujudkan. Konflik antara dorongan untuk inovasi dan menjaga kemurnian seni dan keinginan mengikuti 'selera pasar' semakin kompleks dan tak dapat diselesaikan oleh gelombang seni dalam era modern sendiri.

Tetapi keinginan untuk menarik batas yang tegas antara seni tinggi (yang dianggap murni karena masih menganut prinsip 'seni untuk seni') dan seni rendah alias seni populer (menganut prinsip 'seni untuk selera pasar') menunjukkan bahwa seniman modern masih tetap teguh mempertahankan prinsip seni murni meskipun dalam praktik tidak dapat diwujudkan. Seni tinggi dianggap memiliki privilese tersendiri, elitis, dan menunjukkan kegeniusan dan kemurnian visi sang seniman. Seni semacam itu tampak misalnya dalam musik klasik atau lukisan-lukisan monumental yang dianggap sebagai tonggak seni pada zamannya. Seni tinggi dianggap tidak dapat dikonsumsi oleh 'massa jelata'. Seni tinggi ini dianggap sebagai wujud dari visi, gaya, dan ekspresi individual masing-masing seniman yang khas, unik, singular, dan dengan bahasa privat mereka sendiri. Pencarian kode privat dalam seni tersebut secara tak langsung mengalienasi massa (seperti tampak pada puisi Baudelaire). Seni menjadi produk elitis. Douglass dan Kellner menulis, "seniman modernis mendorong menciptakan karya-karya monumental (*the great work*), karya-karya *masterpiece*, dan keunikan gaya individualnya sendiri. Gaya dan visi genius, monumentalitas, dan distingtif merupakan ciri khas estetika modernis". Lukisan Monet atau van Gogh; gaya prosa Kafka atau Hemingway; musik Schoenberg atau Stravinsky; teater Pirandello atau Brecht; atau bangunan dengan Gaya Internasional (*the International Style*), merupakan

contoh-contoh karya seni modern yang menunjukkan visi personal sang seniman; pandangan unik masing-masing seniman tentang dunia.

Meskipun selama abad 20 modernisme estetik berusaha untuk memperbarui diri agar bisa menjadi wadah transformasi masyarakat, spirit dasarnya yang selalu menekankan dominasi individual, otonomi seni, dan kreativitas orisinal sang seniman sendiri, membuatnya tetap elitis, dominatif, bahkan juga alienatif. Gerakan garda-depan yang berkiprah dalam bidang seni berkeinginan mereformasi masyarakat, budaya, dan kehidupan sosial sehari-hari dengan mengampulasi dominasi institusi seni dan kapitalisme serta pasar yang didominasi oleh kaum borjuis. Tetapi sayangnya lagi-lagi upaya itu bersandar pada kreativitas dan bakat-bakat personal individu. Tidak ada gerakan sosial yang mampu mempersatukan mereka dalam wadah sosial untuk melakukan perubahan sosial melalui seni. Semua upaya mereformasi kehidupan sosial sepenuhnya bergantung pada kreativitas individual sang seniman sendiri. Tidak jarang muara dan tujuan akhir dari gerakan tersebut bukan untuk mereformasi kehidupan sosial masyarakat melainkan bentuk lain dari upaya membentengi diri dan kepentingan sosial, politis, atau teknologis sang seniman sendiri. Kekuatan emansipatif seni tidak mendapat tempat yang memadai untuk berkembang dalam era modern.

Dalam tataran teoretis gerakan-gerakan *avant-garde* seperti ekspresionisme, futurisme, dada, dan surealisme yang didasarkan pada eksperimentalisme, tidak berhasil membersihkan diri dari kontaminasi pertimbangan ekonomi. Demi otonomi estetik, mereka menolak 'institusi seni' borjuis yang dianggap menghambat pada pasar. Karya seni dianggap hanya diproduksi, didistribusikan, dan dipasarkan seperti komoditi lain yang mengandalkan selera pasar. Bahkan tidak jarang seni menjadi sarana melegitimasi kepentingan politik (Burger 1984). Jelas bahwa garda-depan (*the avant-garde*) gagal memenuhi janjinya untuk menghapus ideologi, institusi sosial, serta institusi seni yang opresif dan mendorong peran seni sebagai wahana transformasi sosial yang progresif. Gerakan reformasi seni tak mampu berhadapan dengan ideologi sosial dominan dalam era modern seperti fasisme, sosialisme, birokratisasi, kapitalisme, bahkan juga perang. Di AS sekitar tahun 1950-an kanonisasi modernisme seni di universitas-universitas dan museum-museum di satu sisi memperluas pasar seni (mengkomodifikasi seni). Tetapi di sisi lain, gerakan itu bisa dianggap sebagai upaya membungkam daya kritis dan oposisional seni. Seni hanya dianggap sebagai salah satu ornamen atau hiasan dalam gegap gempita pasar konsumsi. Bahkan seni lalu 'turun gunung' hanya sekedar mengurus iklan, *packing*, dan desain produksi.

Salah satu sisi dari seni modern yang dikritik oleh postmodernisme adalah bias gender. Sebagian besar seni modernis didominasi laki-laki, meskipun kaum perempuan pun berpartisipasi dalam gerakan garda-depan abad-20. Pelukis wanita seperti Mary Cassatt dan Berthe Morisot merupakan sedikit dari wanita yang aktif dalam gerakan impresionis. Paula Modersohn-Becker dan Käthe Kollwitz adalah figur-figur lain dari gerakan ekspresionisme. Beberapa wanita lain berpartisipasi aktif dalam kelompok seniman seperti lingkaran Bloomsbury, gerakan dada dan surealis, serta komunitas seni Paris. Meskipun subkultur modernis memberi kesempatan kepada kaum wanita untuk berpartisipasi dalam penciptaan kebudayaan dalam berbagai bidang seni - yang sebelumnya kurang mengikutsertakan wanita, 'prasangka' dan keraguan terhadap kemampuan estetik wanita tetap mewarnai langkah mereka. Nasib yang sama dialami pula oleh orang kulit berwarna atau seniman non-Barat. Kiprah kelompok ini, dalam kancah seni global, tidak diperhitungkan.

Berhadapan dengan kelemahan-kelemahan seni modern inilah kaum postmodernis ingin mengembangkan seni, tentu menurut perspektif kaum postmodernis sendiri. Tetapi yang jelas kritik-kritik yang sudah mulai muncul dalam era modern disuarakan kembali secara lebih frontal dan oposisional oleh perspektif postmodernisme.

3.3. Seni Postmodern

Pembalikan postmodern dalam bidang seni sebetulnya memelihara beberapa hubungan dengan tradisi estetika sebelumnya sambil juga memecah secara tajam elitisme borjuis, modernisme tinggi, dan sejenis *avant-garde*. Dengan modernisme dan *avant-garde*, postmodernis menolak realisme, mimesis, dan bentuk-bentuk naratif linear dalam seni. Tetapi sementara modernis tinggi membela otonomi seni dan mencela budaya massa, kaum postmodernis justru menolak elitisme seni dan mengkombinasikan bentuk kultural 'tinggi' dan 'rendah' dalam suatu pluralisme atau populisme estetis.

Melawan dorongan ke arah inovasi dan orisinalitas militan, kaum postmodernis merangkul tradisi dan teknik-teknik kutipan dan *pastiche*. Kalau seniman modern terinspirasi untuk menciptakan karya-karya monumental, personal, dan unik, kaum postmodernis justru menekankan sisi ironik dan *playful* (tidak seperti proyek ambisius *avant-garde* modernis yang ingin mereformasi kehidupan sosial melalui seni). Kaum postmodernis dalam bidang seni ingin melepaskan konsep-konsep seperti 'genius', 'kreativitas', dan bahkan 'author'. Seniman adalah seorang 'peramu' yang baik. Menciptakan suatu karya seni, menurut kaum postmodernis, sama dengan menulis suatu karya ilmiah. Suatu karya ilmiah yang baik mesti menunjukkan, misalnya dalam catatan kaki, apa yang merupakan ide penulis dan apa yang merupakan ide orang lain yang dipinjam dalam karya tersebut. Tidak ada satu karya ilmiah yang sepenuhnya merupakan ide penulis. Begitu juga dengan karya seni. Tidak ada karya seni yang orisinal dan 'genius' karena selalu ada 'sumbangan' dari pihak lain. Menciptakan suatu karya seni tidak lain dari meramu berbagai sumber estetika (seperti menulis dengan mengutip kutipan demi kutipan di antara kutipan-kutipan lain).

Jika seni modern berusaha untuk mengeksplorasi makna dan signifikansi suatu karya seni, terutama dari sudut pandang sang seniman, seni postmodern justru 'menolak' makna, esensi, dan signifikansi seni untuk memberi tempat pada 'proses' dan impuls untuk bermain. Seni postmodern berorientasi lebih pada permukaan (*surface*), meninggalkan visi moral, menolak *grand-narasi* estetika atau dasar filosofis tertentu (Jameson 1991). Bahkan aktivis postmodernisme sayap kiri mengkritik spirit anarkis garda-depan melalui dekonstruksi dan demistifikasi makna. Seni pun, menurut perspektif postmodernis, tidak perlu mengembangkan 'bahasa' estetika khusus untuk menegaskan status privilese mereka. Seperti sebuah teks, kalau pun bermakna, makna tersebut ditentukan oleh pembaca (publik seni) dan hubungannya dengan seni-seni atau teks-teks lain. Makna estetika itu pada hakikatnya merupakan intertekstual dan konstruksi sosial.

Maka secara umum, pembalikan postmodern dalam bidang seni merupakan reaksi menentang modernisme seni yang hanya menghargai dan menilai tinggi seni yang diinstitusionalisasi. Sebaliknya kaum postmodern dalam bidang seni merayakan keberagaman seni, mengapresiasi seni populer, menekankan impuls bermain (*playful*), demokratis, dan menentang oposisi seni tinggi dan seni populer atau seni rendahan. Berhadapan dengan modernisme seni yang menjemukan, Susan Sontag, misalnya, mempublikasikan koleksi esai berpengaruh berjudul *Against Interpretation* (1967), menentang elitisme seni modern dan mempromosikan budaya populer, bentuk-bentuk artistik baru, dan sensibilitas baru terhadap "budaya massa".

Sensibilitas terhadap kemungkinan gaya dan bentuk estetika baru tersebut berkembang pada hampir semua bidang seni: lukisan, arsitektur, tari, teater, film, musik, dan literatur. Pada bidang-bidang ini, jarak antara seniman dan penonton, antara seni tinggi dan seni populer, antara master dan awam, antara teori dan praktis kehidupan, antara kontemporer dan tradisional, antara orisinal dan parodi, diruntuhkan. Seni modern yang dianggap 'mengkolonialisasi kehidupan' dibebaskan. Bersamaan dengan itu, bentuk-bentuk seni populer yang tampak pada media massa semacam radio, film, televisi, iklan,

dan komik, tidak hanya menemukan momentumnya untuk berkembang melainkan diasimilasikan dengan seni tinggi.

Dalam bidang seni lukisan, misalnya, banyak seniman semakin gencar berbicara tentang 'the end of painting', berakhirnya lukisan. Yang dimaksud adalah bahwa tidak ada lukisan yang benar-benar merupakan hasil kegeniusan pelukisnya. Bahkan lukisan para maestro pun harus dipahami sebagai proses dan hasil daur ulang berbagai bentuk dan gaya yang berbeda. Tidak ada seni yang benar-benar orisinal, inovatif, atau murni. Semua karya seni merupakan hasil dari proses eklektisme, *pastiche*, dan parodi. Seperti ditegaskan oleh arsitek postmodern Venturi, 'Creating the new means choosing from the old.' Pencarian seniman modern akan sesuatu yang baru dan orisinal paralel dengan keyakinan filsafat modern bahwa setiap orang (termasuk seniman) adalah unik, otonom, dan transenden. Seniman dengan daya imajinasi yang dimiliki seolah-olah bisa berada di luar kategori ruang dan waktu. Pada hal diri atau seniman semacam itu tidak pernah ada. Otonomi individu tidak pernah total karena ia dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berada di sekelilingnya.

Seniman bukanlah diri yang original, otentik dan unik. Ia ditentukan oleh kebudayaan dan sejarah yang melingkupinya. Maka menurut kaum postmodernis, dari pada memperluas tema-tema kedirian, otentisitas, orisinalitas dan kebebasan, marilah berbicara tentang kebersamaan, keberagaman, relasi, kompromi, parodi, dan *pastiche* (menggabungkan berbagai fragmen menjadi satu kesatuan). Maka, jika modernisme seni berusaha menciptakan karya seni monumental, agung, dan original, kaum postmodernis justru bergelut dengan tema ironi dan kebermainan. Sensibilitas postmodern mengarah ke 'wafatnya sang pengarang' dan berakhirnya karya-karya agung.

Karakter ke-bermain-an dalam seni postmodern merupakan inovasi bentuk kultural yang berbeda dari seni modern. Bentuk-bentuk kultural yang dipromosikan oleh postmodernisme adalah: penolakan terhadap struktur, tatanan, kontinuitas, dan relasi sebab-akibat dan sebaliknya berpaling ke ketakteraturan (*disorder*), *chaos*, kemungkinan, diskontinuitas, indeterminasi, dan parsial. Dalam musik, John Cage (1961) misalnya, menggunakan paradigma indeterminasi postmodern untuk mengatur prinsip musikalnya. Cage menggunakan apa yang ia sebut sebagai 'chance operations' untuk mengatur keharmonisan suara dari berbagai sumber, termasuk dari alat elektronik. Kolaborasi Cage dan Merce Cunningham misalnya, memadukan tari dan musik. Cage menyerap kekayaan suara dalam musik, sementara Cunningham mengadaptasi banyak gerakan dari kebiasaan sehari-hari ke dalam *collage* tari yang ia ciptakan. Cunningham bahkan menolak tari ekspresif dan signifikansi, menolak pandangan bahwa ada *idea* dan makna dibalik suatu karyanya. Cunningham tidak mengklaim bahwa setiap tarinya memproduksi suatu atmosfer yang unik dan mengundang penonton untuk menginterpretasikan signifikansinya sesukanya. Maka penonton pun menciptakan makna karya seni bukan sekedar penikmat pasif.

Karena berbagai elemen yang berbeda itu bekerja bersama dalam 'teks' postmodern, kaum postmodernis pada dasarnya multiperspektif. Kaum postmodernis percaya bahwa tidak ada perspektif, teori atau kerangka estetik tunggal yang menerangi kekayaan dan kompleksitas pengalaman dunia, atau teks. Mereka juga sadar-diri tentang soal kebermainan mereka dengan elemen formal, dan menyerukan perhatian pada proses estetik yang pada hakikatnya fiktif, konstruktif, dan artifisial.

Dengan demikian jelas bahwa seni modern menurut perspektif postmodern tidak menghargai masa lalu (karya seni sebelumnya) dengan mengatakan bahwa hasil karya seni mereka bersifat 'murni' (orisinal), univalensi, dan memiliki integritas gaya. Seni postmodern justru berangkat dengan kesadaran bahwa ada hubungan erat antara miliknya dan milik orang lain ('tidak murni'). Maka seni postmodern menganut keanekaragaman gaya atau multivalensi, mencampurkan berbagai hal (*pastiche*): gambar, tata huruf yang kacau,

gaya, warna, bahkan yang tidak selaras atau bertentangan sehingga tidak ada lagi makna objektif.

Anggapan seniman modern bahwa seni mampu mentransformasi dunia kelihatannya terlalu optimistik bahkan juga utopis. Seni tidak memiliki satu tujuan tunggal melainkan ada banyak tujuan (Malpas 2005: 20). Postmodernisme justru mendemokratisasi seni baik dalam kaitannya dengan tujuan seni maupun bentuk-bentuk atau teknik-teknik artistik. Yang jelas pengakuan adanya nilai estetik dalam seni populer merupakan titik balik perkembangan seni populer terutama dalam bidang musik dan film. ***

Bab 4

Postmodernisme dalam Arsitektur

4.1. Pengantar

Perbincangan tentang postmodernisme dalam bidang arsitektur merupakan salah satu pembahasan penting dan menarik tentang gerakan pemikiran dan praktik budaya postmodernisme. Alasannya tidak saja karena banyak tulisan atau buku tentang postmodernisme umumnya dimulai dengan diskusi tentang peran postmodernisme dalam bidang arsitektur melainkan terutama karena arsitektur berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Di samping itu, alasan lainnya adalah karena dalam arsitektur lah label 'post' pada postmodernisme benar-benar lebih mudah disaksikan. Dunia arsitektur, menurut Malpas (2005: 13) tidak sekedar berurusan dengan model atau bentuk bangunan melainkan mencakup banyak dimensi kehidupan manusia: persepsi tentang diri, dunia, seni, kerja, uang, cita-cita, idealisme, dan sebagainya. Singkatnya, soal arsitektur adalah soal kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah pola budaya arsitektur mana yang ingin dikembangkan oleh pemikiran postmodernisme?

Steven Connor dalam bukunya, *Postmodernist Culture: An Introduction to Theories of the Contemporary* (1997) menyatakan bahwa terlalu simplistik dan bahkan naif jika postmodernisme arsitektur hanyalah dicirikan sebagai penolakan universalitas *Style* Internasional modern dan pembalikan ironis ke kebudayaan-kebudayaan dan tradisi-tradisi lokal dan regional. Connor menulis, "mungkin akan menjadi bunuh diri teoretis ketika mencoba mendeduksi norma stylistik tunggal seperti itu dari karya yang diproduksi dalam lukisan dan pahat lebih dari 50 tahun dan melampaui tiga benua, agar mampu melokalisasi suatu titik tolak tunggal modernis demi postmodernisme" (1997: 88). Soalnya, adalah bahwa *distingsi* antara modernisme dan postmodernisme dalam bidang arsitektur pun (juga seni) jauh lebih kompleks dari pada yang dibayangkan. Bahkan gaya Internasional yang mencirikan seni arsitektur modern pun bisa terlalu menyederhanakan kenyataan. Lalu bagaimana arsitektur postmodern dapat dipahami?

4.2. Postmodernisme dalam Arsitektur

Charles Jenks, salah seorang pembicara utama postmodernisme dalam arsitektur, menyatakan bahwa arsitektur merupakan seni publik (*the public art*). Ungkapan ini menunjukkan bahwa seniman, termasuk para arsitek, tidak memiliki status khusus dalam dunia arsitektur. Dalam bahasa Derrida, seni dan seniman, karya arsitektur dan arsitek didekonstruksi! Dideskralisasi! Seniman dan arsitek bukanlah orang yang memonopoli karya dan makna karya arsitektur. Makna suatu karya seni arsitektur tidak hanya ditentukan oleh sang arsitek sendiri melainkan juga penikmat, konsumen, dan para pemerhati seni arsitektur. Ini berarti bahwa arsitek tidak memiliki status 'khusus' dalam karya arsitektur. Ia tidak bedanya dengan 'orang biasa' yang singgah di terminal seni dalam perjalanan estetik yang tak berujung. Seniman dan arsitek didesakralisasi.

Postmodernisme arsitektur yang mulai tampak dalam berbagai bidang artistik tahun 1960-an dan 1970-an nyata dalam *design* bentuk-bentuk baru gedung-gedung kontemporer yang tidak sekedar menolak 'kemurnian gaya' dari para arsitektur modernis melainkan juga menghidupkan kembali ornamentasi, menghargai kekayaan tradisi, dan merevitalisasi gaya lama. Semua proses ini berlangsung sebagai realisasi keyakinan para arsitek postmodern bahwa arsitektur tidak lain dari cara manusia mengkonstruksi dan merekonstruksi kehidupannya sehari-hari. Maka semua orang dalam lingkup kehidupannya masing-masing: di rumah, di keluarga, di lembaga pendidikan, di tempat kerja, di lingkungan ibadat, dan segenap lingkungan sosial lain terlibat dalam narasi, konstruksi, dan tekstur arsitektur.

Berdasarkan pemahaman dekonstruktif seperti itulah pembalikan postmodernisme dalam bidang arsitektur mulai berlangsung. Dekonstruksi arsitektur tersebut meliputi penolakan terhadap konsepsi modernis tentang kemurnian gaya, elitisme estetik, rasionalisme, dan humanisme yang berbasis universal dan program politik utopian yang dapat menurunkan manusia baru melalui *design* arsitektural. Melawan prinsip-prinsip ini, kaum postmodernis seperti Robert Venturi, Philip Johnson, Christopher Jencks, Kenneth Frampton, dan Michael Graves menolak formalisme abstrak dan ahistoris dari Gaya Internasional (*the International Style*), memeluk percampuran eklektik dari style historis, mendorong pendekatan yang tanggap terhadap selera populer, profesional, dan tujuan-tujuan yang lebih real.

Seperti juga dalam literatur, sulit untuk menarik batas yang tegas antara arsitektur modern dan arsitektur postmodern. Dikotomisasi antara arsitektur modern dan postmodern hanya dengan menyamakan begitu saja arsitektur modern dengan boks kaca dari Gaya Internasional tentu tidak adil dan mungkin reduktif. Arsitektur modern yang mulai berkembang sejak 1920-an sampai 1950-an tentu amat kaya.

Simon Malpas menunjukkan bahwa dari segi waktu, gaya arsitektur era modern mencakup arsitektur Renaissance (abad 15), manierisme (abad 16), barok (abad 17), rococo dan neo-klasik (abad 18), ekspresionisme (abad 19 dan 20), seni baru (abad 19 dan 20), serta gaya industrial Amerika seperti tampak pada gedung pencakar langit Louis Sullivan, dan regionalisme organik Frank Lloyd Wright. Tetapi 'modernisme' arsitektur, menurut pandangan postmodernisme pada umumnya, dimulai dengan munculnya Gaya Internasional yang tampak pada tahun 1920-an, disistematisasi awal tahun 1930-an, dan mendominasi seluruh dunia sepanjang tahun 1950-an. Tetapi menurut Best dan Kellner, 'arsitektur modern' yang dikonstruksikan oleh polemik postmodern sebagai Gaya Internasional merupakan konstruksi yang reduktif, uniter, mengabaikan berbagai gaya dan perbedaan-perbedaan penting arsitektur modernis dalam kategori yang uniter yang disebut Gaya Internasional. Arsitektur modern sesungguhnya demikian kompleks, beragam, dan kaya sehingga tidak sekedar diidentikan dengan Gaya Internasional.

Gaya Internasional yang mencirikan arsitektur modern sebagian besar merupakan produk sekolah Bauhaus yang didirikan di Jerman tahun 1919. Gaya Internasional disamakan dengan 'modernisme arsitektural' karena, seperti gerakan modernisme lain dalam bidang seni, menjadi modern identik dengan berusaha membersihkan sisa-sisa masa lampau, mengembangkan gaya baru, material baru, teknologi-teknologi baru, serta ide-ide baru untuk zamannya. Meskipun menampilkan diri sebagai sesuatu yang terpisah dari masa lampau, arsitektur modern berkembang berdasarkan inovasi teknologi abad 19 dalam bentuk material bangunan seperti besi, baja, dan kaca. Inovasi material ini memungkinkan inovasi-inovasi konkret lain dalam teknik membangun.

Arsitektur modern tidak bisa dilepaskan dari spirit dinamisme dan kemajuan (*progress*) yang mendominasi abad 19. Demi menyerang fasafah "seni untuk seni", arsitektur modern mengeksplorasi sisi utopis dan humanis Pencerahan. Seni, menurut kaum modernis, tidak hanya perlu rasional melainkan juga mendukung misi rasionalisasi lingkungan dan pembebasan manusia dari tradisi. Nilai-nilai universal yang diadopsi oleh arsitek Bauhaus dari pemikiran Pencerahan, dipakai untuk mengkonstruksikan arsitektur global, bahasa arsitektur yang *uniform*, dan nilai-nilai rasional bagi 'manusia universal' baru. Cita-cita semacam ini tampak pada ambisi arsitek utopian modern Francis-Swiss, Le Corbusier. Le Corbusier ingin merevolusi arsitektur modern. Le Corbusier percaya bahwa penggunaan material-material modern, metode-metode struktural baru, dan prinsip-prinsip *design* universal dapat memecahkan problem-problem utama masyarakat kontemporer di perkotaan, seperti rumah, lalu lintas, dan organisasi kota, berdasarkan prinsip efisiensi dan keindahan. Spirit arsitektur Bauhaus ini terus berkembang dalam gerakan arsitektur abad 20.

Tetapi gerakan arsitektur modern tak bisa dilepaskan dari perkembangan estetik abad 20. Gaya arsitektur Bauhaus, dan dengan demikian juga arsitektur karya Le Corbusier, dipengaruhi oleh kubisme yang berciri abstrak dan geometris. Seperti futurisme yang menekankan kekuatan gambaran dan imajinasi melalui rancangan mesin baru, kubisme menekankan aspek-aspek dinamik rancangan estetik dengan metode multiperspektif yang mampu mempresentasikan berbagai dimensi objek secara simultan. Di awal karyanya, Le Corbusier menghasilkan lukisan-lukisan dengan gaya kubisme dari Picasso dan Georges Braque. Tetapi ia kemudian meninggalkan para pelukis tersebut dengan menciptakan bentuk-bentuk arsitektur baru. Dalam lukisan dan arsitekturnya, Le Corbusier mengikuti gaya kubisme yang berusaha memadukan bentuk-bentuk geometris abstrak dengan penekanan pada kualitas formalnya.

Meskipun teknologi, fisafat, dan estetika meneruskan warisan pemikiran dan praktik estetik lama, para arsitek modernis umumnya berusaha untuk memisahkan diri dari sejarah arsitektur yang mendahuluinya. Gaya ornamen yang telah lebih dahulu hadir di Eropa seperti tampak pada arsitektur Gotik secara estetik tidak lagi menarik karena dianggap otoritarian, hirarkis, dan dominatif dalam kehidupan sosial. Bahkan arsitektur Gotik dianggap meniru gaya budak yang eksploitatif. Gaya ini dianggap tidak lagi cocok dengan *design* industrial baru yang mengedepankan prinsip egaliter. Bagi para pemikir Bauhaus, gereja-gereja, bangunan-bangunan pemerintahan, dan monumen-monumen publik memproyeksikan kekuasaan dan otoritas. Katedral-katedral Gotik dari segi visinya, tidak sekedar mengungkapkan aspirasi tentang Yang Ilahi melainkan juga mengekspresikan kekuasaan dan keagungan gereja. Maka Le Corbusier dan kemudian juga Bauhaus, 'mereformasi' arsitektur di bawah pengaruh *avant-garde*, dan menginginkan agar seni mentransformasi kehidupan sosial sehari-hari. Ia mendisain kota ideal pada tahun 1922 dan pada tahun 1925, semacam rencana untuk memperbaiki Paris, yang disebut *the Plan Voisin*.

Pengaruh arsitektur *avant-garde overlapping* dengan pengaruh-pengaruh filosofis krusial Bauhaus dan Gaya Internasional yakni etos utilitarian dan fungsional dari mesin modern dan kapitalisme. Nilai-nilai kapitalis seperti standarisasi dan mekanisasi produksi diterapkan dalam bidang seni dan arsitektur. Hasilnya produksi arsitektur sekedar menjadi proses *assembly* semata, seperti ditegaskan Gropius, "*We are approaching a state of technical proficiency when it will become possible to rationalize buildings and mass-produce them in factories by resolving their structure into a number of component parts*" (Gropius, 1965: 39). Maka dalam modernisme sendiri muncul keinginan untuk melampauinya. Gropius, misalnya, menginginkan agar arsitektur modern mesti ditransformasi agar tetap memiliki idealisme estetik. Arsitektur, menurut Gropius, tidak boleh hanya menyerah pada pertimbangan-pertimbangan lain di luar seni seperti efisiensi, pasar, dagang, industri, tempat, material, standarisasi, dan sebagainya. Arsitektur pabrika dan masal semacam itu, menurut Gropius, menumpulkan keragaman arsitektur dan kebebasan berekspresi. Gropius ingin menekankan arsitektur yang tetap bebas berekspresi, tidak selalu meniru sang master. Tetapi dalam proses industrialisasi modern, seniman tidak bisa menghindarinya. Mereka tetap terkontaminasi dalam arus utama modernisasi.

Bagi para arsitek modernis, rekonstruksi ruang dan konstruksi tipe baru arsitektur merupakan bagian penting dari revolusi melawan yang lampau. Bagi kaum modernis, arsitektur harus membebaskan dirinya sendiri tidak hanya dari tradisi melainkan juga dari lingkungan alamiah agar mampu menciptakan dunia utopiannya sendiri dengan memanfaatkan kaca, baja, dan beton. Dari pada mengintegrasikan arsitektur dengan alam, banyak kaum modernis berpendapat bahwa arsitektur seharusnya berbeda secara signifikan dengan alam. Para arsitek modern lalu berusaha untuk mencari gaya baru, gaya yang berbeda yang meninggalkan simbolisme, ornamentasi, dan dekorasi guna menegaskan kesatuan, simplisitas, dan kemurnian bentuk.

Visi dan praktek arsitektur yang menekankan kesatuan, simplisitas, kemurnian bentuk, dan orisinalitas inilah yang kemudian menyulut lahir dan berkembangnya arsitektur postmodern. Para arsitek modern dengan Gaya Internasional mereduksi eklektisisme dan pluralitas ke gaya tunggal baru. Gaya Internasional menekankan uniformitas *design*, ketelitian dan ketepatan secara geometris, menyingkirkan ornamentasi, dan semuanya terstandarisasi. Gedung-gedung pencakar langit yang dibangun setelah PD II yang mendominasi kehidupan lingkungan perkotaan di seluruh dunia menerapkan konsep arsitektur modern ini.

Harus diakui bahwa arsitektur modernis juga menekankan perubahan, inovasi, dan otonomi seni. Bahkan arsitektur modern pun tidak sekedar menginginkan formalitas melainkan juga muatan politis, filsafati, visi rasional, dan nilai-nilai egalitarian. Tetapi unsur-unsur ini seolah-olah tenggelam dalam rigiditas dan repetisi Gaya Internasional.

Untuk sekedar menyebut contoh, gedung-gedung pencakar langit yang menjadi 'monumen' arsitektur modern, antara lain World Building di Manhattan yang dibangun 1890, lalu semakin 'dilangkahi' ketinggiannya oleh Metropolitan Life Tower 1909 (700 feet), Woolworth Building 1913 (792 feet), Chrysler Building 1930 (1,046 feet), dan tahun 1930-an the Empire State Building (1,250 feet). Dua gedung terakhir ini dianggap sebagai monumen perkembangan awal kapitalisme yakni kompetisi antara kapitalisme pasar yang kompetitif dan kapitalisme negara yang monopolistik.

Arsitektur modern, menurut Best dan Kellner, menyatu secara sempurna dengan kapitalisme. Bahkan kapitalisme berperan sebagai perangkat ideologi yang melegitimasi. Diabaikannya warisan arsitektur tradisional oleh arsitektur modern, tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk menstrukturisasi lingkungan hidup secara baru melainkan juga menghancurkan semua rintangan bagi modernisasi. Guna memastikan proses, produksi, dan kebutuhan-kebutuhan baru, tradisi, warisan tak tertulis, bahkan kekayaan masa lampu disingkirkan. Kebutuhan, cara hidup, tradisi, dan kebudayaan-kebudayaan tradisional ditinggalkan. Kehidupan dan kebudayaan menjadi serba mekanis, formal, dan manipulatif. Substansi, individualitas, dan subjektivitas 'dihancurkan'. Proses ini sejalan dengan proyek dominatif dan manipulatif kapitalis (pekerja lalu dianggap seperti mesin dan warga negara sebagai objek manipulasi, pekerja dikontrol sepenuhnya oleh perusahaan dan negara, kehidupan berjalan secara seragam dan homogen). Para arsitek garda-depan mendukung proses dominasi dan masifikasi kapitalis dalam memproduksi regim baru yakni regim produksi, konsumsi, dan budaya massa, tidak peduli apakah proses itu menghancurkan budaya dan masyarakat yang telah ada. Itulah sebabnya, mengapa pembalikan postmodern yang kemudian muncul menekankan unsur-unsur semacam perasaan individual, estetikalisisasi dunia kehidupan, kesenangan dan kegembiraan personal, perbedaan dan fragmentasi.

Maka peralihan dari arsitektur modern ke arsitektur postmodern tidak sekedar mutasi dari satu gaya arsitektur ke gaya arsitektur yang lain. Agaknya, peralihan itu harus dilihat sebagai tanda perubahan dari suatu regim kapital lama ke regim kapital dan tatanan sosial baru. Gaya arsitektur postmodern yang *trandy* atau *fashionable* tidak hanya sesuai dengan kebutuhan kapital transnasional dan global baru yang semakin tekno-kapitalisme, melainkan semakin menghargai tinggi perbedaan, multiplisitas, eklektisisme, populisme, dan keberagaman konsumsi.

4.3. Arah Baru Arsitektur Postmodern

Ungkapan Robert Venturi berikut ini, sebagian, menggambarkan orientasi arsitektur postmodern. Venturi menulis, "I like elements which are hybrid rather than 'pure,' compromising rather than 'clean.' I prefer 'both-and' to 'either-or.'" Ungkapan ini menunjukkan salah satu ciri utama arsitektur postmodern yakni penolakan terhadap adanya satu gaya arsitektur sebagai sesuatu yang khas, tunggal, universal, dan original melainkan pengakuan

adanya keberagaman gaya, campuran, perpaduan, atau *hybrid*. Belajar dari arsitektur bangunan dan ruang perkotaan Gaya Internasional yang menyeragamkan kebutuhan-kebutuhan orang sehingga dianggap represif, arsitektur posmodern (perumahan) berusaha meresponnya dengan menekankan keberagaman kebutuhan dan gaya arsitektur baru.

Sejak tahun 1950-an muncul kecenderungan-kecenderungan baru dalam bidang arsitektur. Charles Jenks mengklaim bahwa arsitektur modern sudah berakhir di St. Louis, Missouri, AS, ketika pada 15 Juli 1972, tepatnya pukul 3:32 p.m. proyek perumahan terkenal Pruitt-Igoe yang merupakan simbol visi arsitektur modern dirobohkan. Bangunan tersebut dianggap melambangkan fungsionalisme, kekerasan, pengkotak-kotakan, isolasionis, dan utopis. Charles Jenks menyebutnya sebagai lambang bangkunya *design* utopis arsitektur modern dan perlunya mengembangkan konsep arsitektur postmodern yang baru.

Spirit munculnya arsitektur postmodern sudah dimulai sekitar tahun 1950-an dan semakin menemukan momentumnya dalam akhir abad 20 dan 21. Philip Johnson dari Departemen Arsitektur (pada tahun 1955), seorang penggemar Mies dan ikut mendisain The Seagram Building, sudah mulai menyatakan bahwa mengharapkan semuanya dilakukan oleh gedung tidak lagi memadai. Sejak tahun 1950-an sampai 1960-an polemik menentang Gaya Internasional modern mulai muncul. Dan polemik-polemik itu membuka jalan bagi pembalikan postmodern dalam bidang arsitektur yang muncul dalam tulisan-tulisan Lewis Mumford, Jane Jacobs dengan *The Death and Life of Great American Cities* (1961), dan Robert Venturi dengan *Complexity and Contradiction in Architecture* (1966).

Lewis Mumford adalah salah satu pemikir kritis terkemuka AS pada era 1950an dalam bidang sosial dan arsitektural. Besar di Manhattan, Mumford memiliki banyak pengalaman dan pemahaman yang luas tentang berbagai aspek kehidupan urban modern. Karya-karyanya mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap arsitektur rancangan mesin, penekanan terhadap pertumbuhan, dan sentralisasi. Dalam salah satu esainya, "*The Case Against 'Modern Architecture'*", Mumford menyerang paradigma mekanistik yang tampak dalam karya Le Corbusier, Mies, Gropius. Ia menyatakan bahwa karya para arsitek modernis ini mendewakan birokrasi, terpaku pada ukuran, menghambat pada pertumbuhan, men subordinasi manusia pada tingkat komoditi, dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan sosial, budaya, dan psikologis yang demikian kompleks (Miller 1986, 78). Bagi Mumford, arsitektur tak bisa dilepaskan dari fungsi sosialnya yakni merealisasikan kebutuhan-kebutuhan sosial, budaya, dan psikologis; mempromosikan interaksi manusia; menstimulasi kreativitas; dan mengembangkan kebebasan dan spontanitas manusia. Arsitektur seharusnya tidak mereduksi manusia pada unsur mekanis semata. Maka Mumford ingin mengembangkan arsitektur baru yang memadukan seni dan teknik, mempromosikan interaksi antar manusia, dan mengkombinasikan penekanan modern pada fungsi dengan penekanan premodern pada dekorasi dan simbolisme. Disain perkotaan pun perlu memperhatikan apa yang disebut Frampton (1983) sebagai 'regionalisme kritis' yakni sensitif terhadap lokalitas, historisitas, dan tradisi.

Jane Jacobs merupakan arsitek postmodern lain yang menyerang perencanaan arsitektur perkotaan modern yang dinilai tidak memperhitungkan kebutuhan orang dan komunitas yang hidup di dalamnya. Ia berpendapat bahwa dalam kota modern yang kacau, warga negara harus berjuang membentuk tatanan masyarakat yang spontan melalui interaksi komunal yang lebih intens. Keberagaman latar belakang sosial dan budaya dalam komunitas sebagai sumber keberagaman gaya hidup dan kultural yang dianggap sudah dihancurkan oleh visi arsitektur modern karena lebih menekankan tatanan atau struktur yang uniform dan homogen, harus dihidupkan kembali. Bagi Jacobs, keberagaman itulah yang melahirkan vitalitas kota dan bukan visi arsitektur steril ala modern. Kompleksitas dan keberagaman latar belakang memperkaya kehidupan komunal. Jacobs menulis, "*There is a quality even meaner than outright ugliness or disorder, and this meaner quality is the dishonest mask of pretended order, achieved by ignoring or suppressing the real order that is struggling to exist*

and to be served" (1961: xx). Dengan demikian Jacobs membuka jalan bagi selebrasi postmodern atas keberagaman, keberlainan (*otherness*), dan heterogenitas yang kemudian diartikulasikan baik oleh teori postmodern maupun arsitektur postmodern.

Mumford mengakui nilai pandangan dan karya Jacobs yang menekankan pentingnya keluarga, latar belakang budaya, dan keberagaman sosial. Tetapi, menurut Mumford, segala kesemrawutan kehidupan perkotaan yang ada tak boleh luput dari perhatian postmodern. Kehidupan perkotaan yang 'metropolis', menurut Mumford, penuh dengan meningkatnya patologi sosial seperti kemiskinan, materialisme, *chaos*, hiruk-pikuk, dan penuh sesaknya irama kehidupan. Visi-visi kritis ini yang kurang dilihat oleh Jacobs, seperti ditegaskan Mumford, "Indeed, it could be argued that Jacobs was perceptive in her affirmative analyses of small, intimate urban areas like Greenwich Village, but that she lacked an adequate critical vision that sees the need for a radical reconstruction of urban life in its totality. Her work suffers from a contradiction between her love of the intimacy of neighborhood life and her embrace of the general structure of the megalopolis".

Meskipun Mumford dan Jacobs memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan arsitektur postmodern, Robert Venturi adalah arsitek yang paling banyak di asosiasikan dengan pembalikan postmodernisme dalam arsitektur. Venturi merumuskan beberapa prinsip arsitektur yang bertentangan dengan modernisme, seperti arsitektur postmodern yang disebutkan bercirikan kompleks dan *hybridity* sementara arsitektur modernisme bercirikan simplisitas dan kemurnian (*purity*). Menurut Venturi, arsitektur modern (modernisme arsitektur) menyingkirkan ornamentasi, dekorasi, dan warisan historis, sementara visi arsitektur postmodern justru menekankan unsur-unsur ini sambil mempromosikan keberagaman gaya, kode dan elemen-elemen dekoratif yang disingkirkan oleh modernisme.

Buku Venturi, *Learning from Las Vegas* (1972) yang ditulis bersama Denise Scott Brown dan Steven Izenour, secara eksplisit memberi signal pembalikan postmodern dalam bidang arsitektur. Venturi dan koleganya mengapresiasi bentuk-bentuk bangunan komersial Las Vegas Strip sampai billboard, neon, ruang parkir A&P, dan kanton-kanton perkotaan yang menyuguhkan visi 'bermain' (*to play*) dalam arsitektur guna memperlihatkan daya inovasi, kreativitas, dan keberagaman. Seolah-olah mereka ingin mengatakan bahwa semuanya boleh.

Bagi Klotz (1988), karakter utama arsitektur postmodern adalah pandangan bahwa makna (*meaning*) sama pentingnya dengan fungsi; bahwa sebuah gedung itu adalah sebuah "fiksi" dan sekaligus juga fungsi. Hal yang sama ditegaskan oleh Jenks (1977). Jenks bahkan menekankan pemahaman suatu karya arsitektural berdasarkan prinsip-prinsip semiotik. Ia bahkan mengatakan bahwa arsitektur postmodern merupakan bagian dari pembalikan yang sama dalam linguistik yang dipengaruhi oleh filsafat dan teori sosial. Fokus linguistik itu tak lepas dari evolusi strukturalisme dan poststrukturalisme dalam tahun 1960-an dan 1970-an. Tetapi sebagai gerakan dan kecenderungan yang mulai meninggalkan Gaya Internasional dan pencarian *vocabulary* baru, banyak arsitek sejak tahun 1950-an sudah mulai menciptakan gaya baru yang jelas-jelas berbeda dari prinsip Bauhaus. Arsitek seperti Eero Saarinen, Philip Johnson, Marcel Breuer, Louis Kahn, Venturi, dan sejumlah arsitek lain kembali ke gaya masa lampau, menyertakan ornamen, mengeksplorasi bentuk-bentuk baru sambil mengatasi keterbatasan gedung dengan boks kaca.

Gaya arsitektur yang baru tersebut misalnya muncul dalam rancangan lapangan terbang oleh Saarinen mulai dengan terminal TWA di bandara John F. Kennedy (New York, 1956-1962) dengan struktur kurva yang menunjukkan dinamisme perjalanan udara, dengan aksan konkret seperti burung yang sedang terbang. Gedung Opera House dari rancangan arsitektur Jørn Utzon di Sidney, hotel-hotel rancangan John Portman yang tersebar dari Chicago ke Los Angeles sampai Atlanta, sejak awal tahun 1970-an, menunjukkan gaya postmodern tersebut. Dinamika dan gaya yang sama tampak pada

rancangan Kevin Roche dan John Dinkeloo pada Hotel Plaza- New York, Portland Building oleh Michael Graves, dan sebagainya.

4.4. Historisisme, Eklektisisme, dan Pluralitas Arsitektur Postmodern

Seperti sudah disinggung di atas, arsitektur postmodern, pada dasarnya merupakan reaksi kritis terhadap asumsi, visi, dan gaya estetik dan arsitektur modern yang tampak pada bentuk-bentuk arsitektur sejak abad 15 sampai abad 20 seperti ekspresionisme pada karya Frank Lloyd Wright. Berhadapan dengan ciri arsitektur modern yang dinilai menenggelamkan tradisi, menekankan kemurnian gaya, dan keinginan untuk membangun visi dan tatanan sosial yang universal, arsitektur postmodern justru ingin kembali ke historisisme dan eklektisisme. Arsitektur postmodern ingin menghargai sejarah, masa lampau, mengkombinasikan dan bermain dengan gaya-gaya yang berbeda, termasuk arsitektur modern sendiri.

Berbeda dengan postmodernisme filsafati yang ingin menghapus sama sekali segala bentuk pemikiran modern yang dianggap mengukutuskan rasio, subjek, kebenaran, epistemologi, metafisika, dan universalitas, postmodern arsitektur justru tidak sepenuhnya menolak visi dan praktik arsitektur modern. Arsitektur postmodern mengapresiasi kekayaan simbolik, alegori, dan style modern. Tetapi arsitektur modern dianggap sebagai salah satu bagian dari *pastiche* arsitektur postmodern (sebagaimana tampak pada bangunan AT&T dari Philip Johnson) dan ingin melampauinya.

Eklektisisme arsitektur postmodern dimungkinkan oleh perkembangan teknologi komunikasi yang memfasilitasi persemaian dan distribusi ide lintas dunia. Perkembangan teknologi memungkinkan konsep dan *design* postmodern cepat menyebar ke seantero dunia. Tambahan lagi, komputer memungkinkan produksi massa dari 'berbagai gaya dan produk-produk yang *personalized*' (Jenks 1977: 5). Memang orang bisa menyatakan bahwa gaya arsitektur baik era modern maupun postmodern secara khusus berhubungan dengan teknologi-teknologi tertentu, respons terhadap perkembangan budaya perkotaan, tuntutan penikmat karya arsitektur, atau tuntutan dunia industri (*design* bangunan, produk, periklanan, paket, dan sebagainya). Tetapi kenyataan ini, menurut kaum postmodernis dalam bidang arsitektur, merupakan contoh paling nyata kesia-siaan arsitektur modern untuk mencari kemurnian gaya, orisinalitas, atau visi tunggal arsitektur. Arsitektur postmodern tidak hanya menekankan keberagaman dan pencampuran gaya melainkan juga memperlihatkan kekayaan simbolis, metafor, warna, *style*, dan sejarah masa lampau.

Pencampur-adukan berbagai gaya arsitektur itu yang dikenal dengan eklektisisme arsitektur postmodern. Dengan eklektisisme, arsitektur postmodern menghidupkan sisi diskontinuitas, ambiguitas (tidak ada ruang yang *fixed*), kompleksitas, bahkan juga kontradiksi dari pada kesatuan, harmoni, atau kemurnian bentuk.

Jika arsitektur modern berusaha mencari signifikansi dibalik abstraksi dan fungsionalitas bentuk dan visi arsitekturnya, kaum arsitek postmodern justru 'bermain' dengan bentuk (dari pada substansi) dan sindiran yang kaya. Semiotika arsitektur modern yang kaku, yang selalu berusaha mencari dasar atau substansi di balik suatu karya arsitektur, menurut kaum postmodern, merupakan suatu kejahatan tanda (*sign crime*). Kaum arsitek postmodern menginginkan bangunan yang kaya dalam metafor, kiasan, sindiran, yang menunjukkan diri seperti 'bebek yang berenang', seperti tangan yang sedang berdoa, seperti kapal yang berlayar, atau seperti sebuah topi. Bagi Jenks dan pengikut arsitektur postmodern lain, arsitektur mesti menyajikan kode ganda (*double coding*) yang berusaha untuk mengatasi oposisi binair antara elitisme dan populisme, antara publik dan personal, antara perhatian pada minoritas dan pluralitas.

Berbeda dengan arsitektur modern yang cenderung elitis, postmodernisme dalam arsitektur berusaha untuk melampaui yang elitis; memperluas jangkauan bahasa arsitektur (melalui *double coding*); dan menekankan keberagaman makna entah bagi arsitek, dunia

arsitektur, bagi publik, tradisi, atau bahkan bagi para slebor jalanan (setiap penanda cenderung diperkaya melalui sindiran). Oleh sebab itu, kegemaran arsitektur modern pada fungsi diganti arsitektur postmodern pada gaya, semiotik, dan komunikasi. Douglas dan Kellner menulis, "*The emphasis on semiotics is so important for Jencks that the term 'postmodern architecture' applies only to those buildings whose designers 'are aware of architecture as a language'*" (1977: 6). Atau ketika mereka mengutip dari Klotz, "*the very fact that we speak again of the meanings of architecture is the most decisive change in the architectural debate since 1945 ... the new trends in architecture are predominantly marked by attempts to draw attention to other contents besides the functional qualities of a building*" (1988: 3).

Dengan menekankan keberagaman gaya: lokal, tradisional, modern, global, dan sebagainya, pluralisme arsitektur postmodern menyertakan juga relativisme nilai seperti ditegaskan oleh Jenks, "*no code is inherently better than any other*" (Jencks, 1977: 87-88). Suatu karya arsitektur, menurut kaum postmodernis bersifat kontingen, berakar pada selera, berdasarkan konvensi tertentu, bahkan hasil dari sebuah simulasi. Sisi simulasi ini, misalnya, tampak sangat jelas pada karya Charles Moore *Piazza d'Italia*, suatu ruang publik di New Orleans (1976-1979) yang mensimulasikan Piazza Italia. Arsitektur postmodern juga menghapus perbedaan antara publik dan privat, antara dalam dan luar, seperti hotel Omni di Austin, Texas, yang menghapus sekat antara 'gudang' dan lobby, menggabungkan ruang hotel dengan kantor, alam dengan kebudayaan, tanaman dengan cahaya.

Arsitektur postmodern tidak hanya menyuguhkan kesadaran akan prinsip *implosion*, hilangnya batas-batas arsitektur, hiperrealitas arsitektur seperti didiskusikan oleh Baudrillard, melainkan juga meramu mereka secara ironik dengan berbagai gaya masa lampau. Ia menggunakan 'kutipan', dekorasi, ironi, humor untuk menyerang yang serius, rasionalis, dan karakter utopian dari arsitektur modern. Dalam reaksinya terhadap 'hilangnya kepercayaan pada metanarasi'-nya Lyotard, rasionalisme, inovasi, kemajuan, dan monumentalisme modern, postmodern arsitektur meninggalkan tema-tema *grand* dan monumen-monumen heroik dan sebaliknya menimbah inspirasi dari kebudayaan dan selera populer seperti yang tampak pada buku Venturi, *Learning from Las Vegas*.

Maka pembalikan postmodern dalam bidang arsitektur juga membuka perspektif bagi ruang perkembangbiakan simulasi, ruang maya (*cyberspace*), dan bidang-bidang baru lain dalam arsitektur. Sesungguhnya, arsitektur sekarang sangat gemar dengan simulasi, menggunakan model-model rumah dan gedung yang dirancang komputer sehingga menggiring konsumen ke domain virtual, mengubah ruang dan dekor dari model simulasi dari ruang virtual. Tetapi arsitektur baru dari ruang maya itu memproduksi ruang inovatif dan kebudayaan baru, suatu konfigurasi dari ruang original, yang juga merupakan cara baru hidup karena semakin banyak orang justru hidup dalam komunitas dan ruang-spasial virtual tersebut.

4.5. Kritik terhadap Arsitektur Postmodern

Sejak tahun 1970-an sampai 1980-an bentuk dominan arsitektur postmodern kelihatannya menemukan momentumnya dan diapresiasi secara luas dalam dunia arsitektur. Tetapi sejak 1990-an bahkan juga sampai sekarang, banyak kritik yang diarahkan terhadap postmodernisme dalam bidang arsitektur. Keberagaman gaya yang diperjuangkan, kombinasi dengan sejarah dan tradisi di masa lampau, inovasi melalui teknologi dan sebagainya pada akhirnya juga menemukan, tendensius, bahkan juga terancam menjadi seragam dan universal. Baja, beton, dan kaca yang menjadi kunci material modern, tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Dalam tataran praktik, banyak pihak mulai meragukan kemampuan visi postmodernisme arsitektur. Dapatkah sebuah bangunan sekarang ini hadir tanpa besi, baja, beton, dan kaca? Postmodernisme arsitektur dianggap mentereng dalam tataran teori tetapi lunglai berhadapan dengan kenyataan. Arsitektur postmodern pun pada gilirannya didekonstruksi lagi.

Bermula dari pandangan post-strukturalis Derrida tentang dekonstruksi (oposisi modern-postmodern adalah oposisi binair, simetris, hirarkis) visi arsitektur postmodern akhirnya juga harus didekonstruksi lagi. Diskusi tentang 'arsitektur dekonstruktif', menurut Douglas dan Kellner, dimulai tahun 1988 sejak publikasi Philip Johnson dan Mark Wigley, *Museum of Modern Art Catalogue Deconstructivist Architecture and a special issue of Architecture Design Profile* (1988). Peter Eisenman mengatakan bahwa arsitektur dekonstruktif merupakan sesuatu yang benar-benar baru. Tetapi Michael Benedikt menyatakan bahwa ciri atau karakter arsitektur dekonstruktif sudah dipraktikkan dalam arsitektur dan pedagogi modern. Yang baru mungkin kerangka teoretisnya untuk mendiskusikan prinsip-prinsip arsitektur dalam kerangka yang lebih canggih. Arsitektur postmodern dan konstruktif mengganti besi dengan lampu, menghapus karakter keterikatan pada arsitektur modern yang dianggap opresif dan menyeragamkan. Dalam reaksi mereka terhadap hakikat formalis Gaya Internasional, arsitektur postmodern mengapresiasi 'kompleksitas'. Tetapi sering kali lalu jatuh dalam prinsip modern, 'seni untuk seni' itu sendiri. Pada hal arsitektur postmodern selalu menekankan relevansi sosial. "Against efforts to advance substantive social and political ideologies, many postmodern architects limit themselves to strictly stylistic and aesthetic concerns". Tekanan pada inovasi, historisisme, eklektisisme, dan ornamentasi merupakan sesuatu yang positif. Tetapi ketika ia dikembangkan secara massal ia lalu menjadi repetitif, universal, dan membosankan. Akibatnya, arsitektur modern yang ditolak postmodernisme justru dihidupkan kembali, seperti ditegaskan Douglas dan Kellner, "The emphasis on innovation in postmodern architecture, its historicism, eclecticism, and return to ornamentation, surely represents a positive step forward in comparison to the orthodoxy of the International Style. But postmodern architecture fell prey to ludic excess, to banal eclecticism and bad taste, and itself became repetitive, predictable, and boring, leading some to call for a revival of modernism".

Meskipun memiliki kelemahan, skeptisisme postmodernis terhadap anggapan modern berkaitan dengan kebebasan, universal abstrak, totalisasi skema-skema rasionalisasi industrial, model perencanaan otoriter, dan pandangan bahwa elit senilah yang mengawasi dan menentukan perjalanan masyarakat patut mendapat apresiasi yang tinggi. Tetapi skeptisisme semacam itu pun dapat dianggap sebagai pesimisme atau bahkan sinisme terhadap pelbagai kemajuan dan perubahan kondisi kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Arsitektur postmodernisme pun pada akhirnya bisa menjadi elitis juga. Maka dalam arsitektur, pencarian bentuk-bentuk baru dalam rancang bangun arsitektur harus dilihat sebagai proyek yang tak pernah berakhir, seperti ditegaskan Douglass dan Kellner, "Against the trivial pursuits of postmodern architecture, we claim that modern architecture is an unfinished project: We still need adequate public housing; democratic urban planning; innovative models for bringing together large numbers of people (where this is necessary) in homes, apartments, and neighborhoods that are clean and safe, as well as for decentralizing cities into a more human scale; and a harmonious integration of urban and natural environments. It was the historical task of modern architecture to make the first attempts at satisfying these needs, however problematically, but postmodern architecture is on the whole a sterile detour from the urgent problems of housing and urban planning". Maka proyek real arsitektural, bukanlah sebuah proyek murni arsitektur atau seni melainkan harus dipahami sebagai bagian dari disain sosial, yakni proyek rekonstruksi masyarakat tidak hanya dari sudut pandang estetis melainkan juga dari sudut pandang demokrasi partisipatoris dengan menyertakan berbagai komponen dalam masyarakat; termasuk juga dengan mempertimbangkan sisi ekologisnya.

Maka, paling tidak, arsitektur baru yang dikembangkan oleh postmodernisme tidak bisa berjalan sendiri. Arsitektur postmodern mesti menggabungkan penekanan modern pada fungsi dan relevansi sosial dengan fokus postmodern pada style dan makna (*meaning*). Paling tidak, fungsi arsitektur tidak saja pada fungsi arsitektur pada level teknis, kegunaan dan *design* bagi hidup, kerja, bermain, olah raga, belajar, dan sebagainya melainkan juga

menginspirasi kita dalam pencarian kenyamanan, rileks, betah, dan makna hidup itu sendiri. Sebuah bangunan tidak semata-mata sebuah karya seni semata melainkan juga sebuah lingkungan kehidupan. Dengan demikian karya arsitektural bukanlah sebuah proses dan lingkungan hidup (terutama lingkungan perkotaan) yang menjemukan dan mengalienasi melainkan sebuah proses, sebuah *design*, dan sebuah lingkungan yang membebaskan dan menginspirasi, bukan lingkungan yang membelenggu dan mengalienasi, seperti ditegaskan Douglass dan Kellner, "*We are bored in the city . . . we really have to strive to discover mysteries*" (Ivan Chitchevlov, quoted in Knabb, 1981: 2). *The alienation of the modern condition, they argued, was as evident on our faces as in our buildings. The Bauhaus movement sought to provide the "education" artists needed to assume their place within the machine age; the Situationists sought to destroy the mechanization of life to liberate creativity*".

Maka yang diinginkan ke depan oleh para arsitek dewasa ini bukan sekedar gaya arsitektur postmodern melainkan sebuah *poetic architecture*, yakni sebuah arsitektur yang membangkitkan imajinasi, fantasi, hasrat, keinginan untuk menghidupkan, dan mewujudkan mimpi kehidupan yang mungkin ambigu dan misteri. Dengan demikian, ruang arsitektur tidak hanya terbatas pada ruang fisik-absolut melainkan juga ruang-relatif-relasional yang menghubungkan berbagai elemen kehidupan: lokal-global, privat-publik, jasmani-spiritual, estetis-etis, serta alam-lingkungan. ***

Bab 5

Postmodernisme dalam Filsafat dan Agama

5.1. Pengantar

Filsafat dan agama merupakan dua bidang pengetahuan yang tidak bisa dilepaskan dari gerakan pemikiran dan praktik budaya postmodernisme. Bahkan dalam ranah teoretis, tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa dewasa ini postmodernisme lebih dikenal dan berkembang subur dalam ranah filsafat dan seni dari pada bidang pengetahuan lain. Hal ini dapat dipahami karena istilah postmodernisme sendiri lebih merupakan sebuah ide, gagasan, atau pemikiran kritis filsafati terhadap pemikiran dan praktik kebudayaan modern dan postmodern dari pada gerakan dalam bidang lain di luar filsafat. Pada awalnya, postmodernisme muncul dan berkembang dalam seni, filsafat, arsitektur, dan studi literer. Perkembangan lain di luar bidang ini seperti politik, hukum, ekonomi (tidak dari kaca mata Marxian), dan agama merupakan imbas dari pemikiran postmodernisme dalam bidang-bidang utama di atas.

Muncul dan berkembangnya postmodernisme dalam bidang agama lebih merupakan implikasi perkembangan postmodernisme dalam bidang filsafat. Banyak artikel dalam bidang agama 'mengantisipasi' implikasi pemikiran postmodernisme filsafati dalam bidang agama. Salah satu pertanyaan yang biasa diajukan, misalnya, kalau menurut postmodernisme, tidak ada kebenaran yang abadi, tidak ada kebenaran yang absolut, dan semua kebenaran merupakan konstruksi sosial, lalu bagaimana nasib kebenaran tentang Allah yang diyakini dalam agama? Apakah kebenaran religius masih punya tempat dapat pemikiran dan praktik membudaya postmodern? Nilai-nilai mana yang kiranya perlu diperhatikan dalam agama, menurut kaum postmodernis? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa perkembangan postmodernisme dalam bidang agama lebih merupakan implikasi dari pemikiran modern dalam bidang filsafat dari pada pemikiran yang lahir ada dalam bidang agama sendiri.

Maka jelas bahwa, perkembangan postmodernisme dalam filsafat membawa pengaruh yang sangat besar bagi pemikiran dan praksis kehidupan beragama. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan postmodernisme dalam kedua bidang tersebut? Pemikiran pokok dan nilai-nilai mana yang menjadi pusat perhatian postmodernisme dalam kedua bidang tersebut? Bab ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Namun, bagian ini bukanlah sebuah penyelidikan historis tentang muncul dan berkembangnya postmodernisme dalam filsafat dan agama. Bab ini akan menguraikan ide-ide pokok atau spirit-spirit dasar yang dihembuskan oleh postmodernisme dalam kedua bidang tersebut. Kita mulai dengan perkembangan postmodernisme dalam filsafat.

5.2. Postmodernisme dalam Filsafat

Menurut perspektif postmodern, filsafat mesti didekonstruksi dan didesakralisasi. Bahkan dengan bahasa yang sangat provokatif: 'filsafat harus diakhiri'! Karena filsafat merupakan suatu tulisan (tak pernah merupakan ungkapan transparan pemikiran secara langsung) sehingga berciri tekstual (yang maknanya ditentukan pula oleh teks-teks lain), maka filsafat tak mampu membuat klaim-klaim yang melampaui partikularitas bahasa tekstualnya sendiri. Filsafat tak perlu berpretensi menjadi ilmu yang ketat, argumentatif, dan transendental (menentukan syarat-syarat dasar pengetahuan). Pretensi seperti ini, menurut para filsuf postmodernis, harus diakhiri. Dan filsafat harus dianggap sebagai salah satu tulisan di antara tulisan-tulisan lain.

Seperti sudah disinggung dalam pengantar di depan, filsafat, khususnya tradisi filsafat Prancis, tidak hanya penting untuk memahami pemikiran dan gerakan kebudayaan

postmodernisme melainkan lebih dari itu filsafat merupakan sumber dari banyak perdebatan dan teori yang mengkonstitusikan postmodernisme. Salah satu figur utama dalam filsafat postmodern adalah Jean-Francois Lyotard, melalui bukunya yang dianggap sebagai ekspresi teoretis postmodern, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1979). Menurut Lyotard, filsafat modern penuh dengan 'grand narasi' seperti filsafat subjek-rasional Descartes, filsafat roh Hegel, kategori apriori Kant, humanisme dan kebebasan Sartre, sampai dengan materialisme historis Marx. Grand narasi-grand narasi inilah yang membangun masyarakat dan kebudayaan Barat yang bercirikan rasional, teratur, birokratis, bebas, sejahtera, dan sebagainya. Postmodernisme, termasuk Lyotard, tidak hanya tidak lagi percaya pada narasi-narasi grand ini melainkan ingin meruntuhkannya melalui pemahaman yang baru. Marxisme, misalnya, tidak lagi dianggap relevan bagi kehidupan kita. Revolusi sosial yang dipimpin oleh kaum proletar tidak pernah terwujud. Humanisme modern justru melahirkan kehancuran manusia. Penataan dunia sosial dan masyarakat modern secara rasional justru melahirkan birokratisasi, eksploitasi, dan penindasan baru. Maka keyakinan-keyakinan dan pemikiran modern dipertanyakan kembali oleh filsafat postmodern.

Sebagai filsuf yang pertama-tama muncul dalam tradisi Marxian, Lyotard mengkritisi Marxisme itu sendiri melalui konsepnya tentang ekonomi libidinal (*libidinal economy*). Menurut Lyotard Marxisme tidak mampu melampaui berbagai dorongan libidinal individu-individu karena dorongan-dorongan tersebut tidak bisa diprediksi dan bahkan juga di luar kontrol teori apa pun. Kekeliruan Marxisme adalah berusaha menekan energi ini, dan dengan demikian secara laten teori itu otoriter. Bagi Lyotard, hakikat manusia dan proses historis tidak bisa diprediksi dan dengan demikian tidak hanya dapat dikonstruksikan melainkan juga dapat dimanipulasi. Anahnya, menurut Lyotard, Marxisme justru ingin mengontrol peristiwa-peristiwa. Ide inilah yang kemudian melahirkan penolakan Lyotard pada 'grand narasi' termasuk Marxisme itu sendiri. Maka melalui buku *The Postmodern Condition*, Lyotard memproklamirkan ketidakpercayaannya pada 'grand narasi' ('Marxisme'). Janji kesejahteraan, kebebasan, rasionalitas, keamanan, dan keteraturan (*order*), tak lagi dipercayai. Bahkan otonomi subjek, kebenaran, dan realitas itu sendiri pun patut diragukan.

Skeptisisme

Salah satu cara terbaik untuk memahami pemikiran postmodernisme sebagai gerakan filsafat adalah dengan menempatkannya sebagai salah satu bentuk skeptisisme terhadap pemikiran modern. Skeptisisme terhadap otoritas, skeptisisme terhadap pengetahuan, skeptisisme terhadap kebenaran, skeptisisme terhadap nilai, norma-norma sosial, politik, budaya, bahkan juga skeptisisme terhadap asumsi dan peran agama (Sim 2001: 3). Skeptisisme pada dasarnya merupakan sebuah bentuk pemahaman terhadap segala kenyataan dengan meragukan segala pengetahuan dan nilai yang dianggap benar atau baik. Istilah teknis untuk bentuk pemikiran filsafati semacam ini adalah model filsafat 'antifondasional'. Menimba spirit dari Friedrich Nietzsche yang menekankan perlunya evaluasi terhadap semua nilai yang sejauh ini dianut sebagai benar, kaum postmodern antifondasional mempersoalkan validitas fondasi sebuah wacana dengan mengajukan pertanyaan, "apa yang menjadi dasar dari kebenaran sebuah wacana?". Dalam kaitannya dengan ini, penolakan poststrukturalisme terhadap tradisi strukturalis mengisyaratkan ciri skeptisisme yang lain terhadap otoritas dan dapat dianggap sebagai bagian dari gambaran intelektual postmodern.

Meskipun filsafat postmodernisme sendiri sangat beragam, terdapat beberapa ciri umum yang mempersatukan mereka. Selain penolakan terhadap segala bentuk otoritas, kebenaran, kepastian, dan fondasi-fondasi pengetahuan dan kepercayaan, kaum postmodernis berusaha mendekonstruksi dan mendesakralisasi filsafat. Filsafat tidak hanya

tidak perlu memiliki privilese khusus dalam teori ilmu pengetahuan melainkan bahwa filsafat itu sendiri harus diakhiri (Sim 2005: 3-5).

Penolakan terhadap filsafat fondasional ini bersumber dari model pemahaman poststrukturalisme bahwa kepastian tentang adanya dunia tidak bisa diketahui karena pemahaman itu bergantung pada tradisi bahasa tertentu. Itulah sebabnya, sejumlah pemikir berpendapat bahwa secara filsafati akar persoalan filsafat postmodernisme terletak pada persoalan bahasa. Seperti makna bahasa, menurut kaum strukturalis, ditentukan oleh sistem makna yang ada di dalam bahasa tersebut, demikian juga makna konsep-konsep dan pemikiran filosofis ditentukan juga oleh konteks, teks, dan ko-teks sistem filsafat tersebut. Maka filsafat, menurut kaum postmodernis, tidak perlu berpretensi menjadi ilmu yang *rigorous* dan berwewenang menetapkan standard dan norma-norma kebenaran dan ilmu. Karena pada akhirnya segala ide, gagasan, pemikiran, atau ilmu pengetahuan itu sendiri dirumuskan dalam tradisi bahasa tertentu. Filsafat tidak bisa melampaui partikularitas bahasanya sendiri.

Dengan mempersoalkan dasar dari setiap argumen, pendapat, teori, atau nilai yang dianggap benar, postmodernisme ingin mendekonstruksi semua hal yang dianggap benar. Dekonstruksi yang pada awalnya diterapkan dalam pembacaan sebuah teks (strukturalis), digunakan oleh para filsuf postmodernis untuk memahami semua kebenaran filsafati. Tradisi strukturalis dikembangkan lebih lanjut dalam poststrukturalisme. Poststrukturalisme kemudian berkembang ke berbagai disiplin intelektual, tidak hanya menolak strukturalisme dan metodenya, melainkan juga asumsi ideologis yang berada di baliknya. Makna sebuah teks merupakan fenomena yang terus berubah dan 'cepat berlalu' sebagaimana yang tampak pada bahasa lisan dan tulisan. Selalu saja muncul makna-makna baru dari pada makna yang *fixed* dan baku sepanjang waktu. Filsuf Prancis Derrida menyatakan bahwa semua filsafat Barat didasarkan pada premis bahwa makna penuh sebuah teks terdapat dalam pikiran pemikir atau pembicara dan kemudian makna tersebut dikomunikasikan, tanpa keliru, kepada pendengar. Keyakinan seperti ini yang disebut Derrida sebagai 'metafisika kehadiran' (*the 'metaphysics of presence'*), yang menurut Derrida tidak lagi mungkin. Metafisika kehadiran seperti ini dianggap sebagai ilusi. Distorsi dan perbedaan (*differance*) selalu menyertai proses komunikasi. Demikian juga halnya dengan makna. Makna (*meaning*) selalu tidak pernah komplet. Makna selalu berubah, selalu dibentuk dan terus dibentuk kembali. Atau dengan istilah yang lebih trendi, selalu didekonstruksi! Makna merupakan sebuah konstruksi yang perlu terus didekonstruksi kembali. Maka dekonstruksi kemudian menjadi salah satu etos kunci filsafat postmodern.

Menghargai Keragaman

Figur postmodern lain yang sangat berpengaruh dalam filsafat postmodern adalah Michael Foucault. Foucault pun menekankan perbedaan tetapi memperluasnya dalam wilayah sosial, yakni pada orang-orang marginal (*marginalized group*) yang terpinggirkan dari kekuasaan politik dominan dalam masyarakat: orang sakit, kaum yang menderita, para tahanan, perempuan, bahkan kaum homoseksual sekalipun (Sim 2005: 6). Menurut Foucault, institusi, norma-norma sosial, dan birokrasi rasional dalam masyarakat modern merupakan ekspresi dari kekuasaan politik otoriter dari kelompok dominan dalam masyarakat modern terhadap kelompok lain. Tetapi tujuannya adalah untuk menerima dan menghargai perbedaan.

Maka kehidupan sosial yang otoriter dan iklim intelektual yang menghambat pada kebenaran tunggal yang diuniversalisasi dan dianggap mutlak, ditinggalkan. Pemikir postmodern lain seperti Gilles Deleuze and Felix Guattari dalam buku *Anti-Oedipus* (1972) menunjukkan perlawanan terhadap otoritarianisme teoretis. Menurut Deleuze dan Guattari, teori psikoanalitik itu otoriter karena teori mekanisme itu berusaha untuk mengontrol ekspresi bebas keinginan manusia. Bagi Deleuze dan Guattari, individu adalah *'desiring*

machines' sehingga tidak pernah satu (*unity*) sebagaimana sering diidentikkan dengan identitas individu. Setiap individu berusaha menyatakan keinginan mereka tetapi dihambat oleh otoritas-otoritas sosial. Maka psikoanalisis bagi Deleuze dan Guattari merupakan simbol bagaimana keinginan itu ditekan. Mereka kemudian menganalisis perilaku schizofrenik sebagai ganti dari psikoanalisis.

Bagi kaum postmodernis, tidak ada teori, kebenaran, atau pengetahuan yang tunggal. Teori-teori yang mengklaim mampu menjelaskan segala sesuatu, menurut Lyotard akan kemudian berubah menjadi *status quo* karena menolak upaya untuk mengubahnya. Marxisme, misalnya, memiliki narasinya sendiri tentang sejarah dunia yang dianggap benar sehingga tidak perlu lagi dikritik atau direvisi. Bagi Lyotard, teori semacam itu otoriter, menindas, dan tak lagi kritis. Pada hal ada banyak narasi dan teori sehingga tidak perlu memutlakan satu narasi atau teori tertentu. Pemutlakan suatu teori atau narasi tidak hanya represif melainkan juga mengingkari hakikat pengetahuan sebagai sesuatu yang interpretatif. Maka Lyotard menolak pemutlakan teori tertentu. Bahkan bagi Lyotard, pengetahuan sekarang ini tidak hanya berurusan dengan kebenaran melainkan sudah merupakan komoditi yang paling signifikan sehingga sering menjadi salah satu sumber konflik antar negara (terutama di masa depan). Siapa yang mengontrol pengetahuan dialah yang menjalankan kontrol politik. Pengetahuan merupakan bagian dari kekuasaan.

Jean Baudrillard merupakan filsuf lain yang memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan filsafat postmodern. Sebagai seorang Marxis yang kemudian kritis terhadap Marxisme dan strukturalisme, Baudrillard menolak pandangan bahwa terdapat struktur tersembunyi di balik semua fenomena yang ada sehingga tugas setiap analisis adalah mengidentifikasi dan menjelaskan struktur tersembunyi tersebut. Bagi Baudrillard, dunia postmodern merupakan dunia simulakra, dunia dimana tidak ada lagi batas yang benar-benar membedakan antara realitas dan simulasi. Simulakra itu merepresentasikan dirinya sendiri; tidak ada realitas yang menjadi referensi atau acuannya. Konsekuensinya Disneyland dan TV itulah yang membangun realitas AS.

Rasionalitas

Rasionalitas merupakan pokok lain yang diserang oleh postmodernisme. Kaum modernis mengatakan bahwa manusia menjadi manusia berkat akal budinya. Subjektivitas manusia terletak pada rasionya. Karena berkat rasionya itu manusia menciptakan dunia, sejarah, dan kehidupannya. Proses humanisasi manusia yang diperjuangkan oleh semangat modernisme sama artinya dengan menegaskan kembali peran akal budi dalam menciptakan sejarah. Dominasi akal itu tampak pada narasi kapitalisme, komunisme, eksistensialisme, liberalisme, idealisme dan sebagainya sebagai bagian dari humanisme masyarakat modern.

Dalam pemikiran modern, rasio merupakan kekuatan tunggal dalam memahami realitas dan membangun ilmu pengetahuan, teknologi, moralitas, estetika, memecahkan persoalan ekonomi, politik, budaya, ideologi, dan sebagainya. Rasio dipandang sebagai kekuatan tunggal yang menentukan segala-galanya. Bahkan narasi agung ala Hegel menancapkan kesombongan akal atas segala realitas dengan mengatakan bahwa yang real itulah yang rasional dan yang rasional itulah yang real. Weber menekankan peran rasionalitas dalam pembangunan dan teknologi. Habermas menekankan rasionalitas komunikasi. Singkatnya yang ditekankan adalah dominasi rasio dalam segenap aktivitas manusia. Manusia yang manusiawi adalah manusia yang rasional. Manusia yang tidak rasional bukanlah 'manusia'.

Bagi kaum postmodernis, rasio bukanlah kekuatan tunggal yang menentukan jalannya sejarah atau peradaban manusia. Foucault misalnya menandaskan bahwa sejarah manusia ditentukan tidak melulu oleh rasio melainkan juga oleh *bukan-rasio*, oleh 'kegilaan'. Kaum postmodernis percaya bahwa ada 'kuasa' di luar diri manusia seperti lingkungan, bahasa dan sebagainya yang bahkan irasional menentukan sejarah dan peradaban manusia.

Bagi kaum postmodernis, banyak manusia pinggiran, marginal, irasional, yang dianggap tidak penting, bahkan yang sakit jiwa sekalipun, berperan dalam sejarah. Sejarah dan peradaban bukan hanya milik orang-orang 'waras'.

Salah satu gagasan yang berkaitan erat dengan anggapan tentang rasio tersebut adalah konsep tentang rasionalitas. Bagi kaum postmodernis, rasionalitas berkaitan dengan bahasa dan bahasa itu sangat beragam karena ditentukan oleh berbagai bentuk kehidupan yang mendasarinya. Ruang, waktu, ukuran, dan aturan tentang apa yang dianggap rasional itu berbeda. Maka rasionalitas cenderung dilihat bersifat plural (lihatlah berbagai ragam permainan bahasa), sementara, atau paling tidak konvensional saja dari pada bersifat mutlak dan universal (ini berimplikasi pada anggapan bahwa akhirnya kebenaran itu bersifat 'lokal' saja). Tetapi perbedaan-perbedaan itu bisa dijumpai, menurut Rorty dengan mempelajari dan persuasi dan tidak perlu saling menaklukkan seperti dibayangkan Lyotard. Dengan kata lain persoalannya adalah persoalan dialog, penafsiran. Dalam dialog terjadi saling memahami antara teks dan penafsirnya, antara 'subjek' dan 'objek', antara 'aku' dan 'engkau'. Dengan hermeneutik filsafati, rasionalitas itu meskipun senantiasa terbungkus dalam partikularitas bahasa, toh mengatasi partikularitas bahasa juga.

Subjek

Subjek sebagai pemilik rasio juga didekonstruksi oleh kaum postmodernis. Bukan subjek yang, melalui rasio, menentukan jalannya sejarah melainkan justru sebaliknya. Subjek dan rasio ditentukan oleh mekanisme dan kontrol kekuasaan, institusi, budaya, bahasa, sosial ekonomi, keluarga, bahkan juga oleh irasionalitas dirinya sendiri. Pusat kekuasaan seorang individu tidak berada dalam dirinya sendiri melainkan diluar dirinya. Subjek yang oleh kaum modernis ditempatkan sebagai pusat (ingat Descartes) dipinggirkan (*decentering subject*). Subjek atau diri bagi kaum postmodernis bukan sesuatu yang *unified*, universal, tidak berubah, yang memiliki pengetahuan penuh dan kontrol terhadap apa yang ia pikirkan dan katakan. Menurut kaum postmodernis, diri atau subjek justru sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling, terikat pada kebudayaannya, berubah bersama kebudayaannya, dan *fragmented* sebagaimana kebudayaan (kebudayaan itu bukanlah sesuatu yang universal melainkan partikular, terdiri dari sub-sub kebudayaan yang lebih kecil). Sedikit banyak kaum postmodern ingin mengatakan: kita bukanlah apa yang kita pikirkan, bukan pula apa yang kita bicarakan, atau bukan apa yang kita kerjakan, melainkan kebudayaanlah yang memikirkan, membicarakan, dan mengerjakan buat kita.

Epistemologi

Epistemologi (selain metafisika) sebagai salah satu primadona filsafat modern menjadi sasaran kritik postmodernisme juga. Epistemologi yang merefleksikan hakikat pengetahuan (hubungan antara subjek dan objek/dunia) dan kebenaran atau epistemologi yang berperan sebagai dasar (bahkan juga menentukan batas) untuk mengecek semua klaim tentang kebenaran (suatu ilmu atau penemuan sah kalau memenuhi pengujian epistemologis) dikritik habis-habisan. Persoalan pokoknya terletak pada karakter fondasional-representasional epistemologi modern. Model epistemologi yang diperkenalkan oleh kaum postmodernis adalah epistemologi nonfundasional dan nonrepresentasional. Ini berkaitan dengan anggapan mereka tentang realitas. Tidak ada realitas *an sich*. Realitas merupakan suatu konstruksi sosial. Demikian pula kebenaran. Tidak ada kebenaran yang objektif, satu, tunggal, mutlak, dan steril dari konteks sosiokultural dan subjektivitas.

Pengetahuan kita tidak mencerminkan realitas di luar kita dan bahasa sebagai produk pikiran manusia tidak mampu menjelaskan dunia tersebut bagi kita. Tidak ada kesesuaian antara pikiran dengan realitas. Dunia tidak ditemukan 'di sana' melainkan diciptakan dengan memasukan konsep-konsep kita ke dalamnya. Dunia merupakan hasil

konstruksi orang-orang dan dengan demikian bisa berubah-ubah. Dunia kita adalah 'simbolik', suatu realitas sosial yang diciptakan melalui bahasa. Realitas sosial itu berubah-ubah maka pemahaman kita terhadap realitas di luar kita pun berubah-ubah. Tidak ada satu titik puncak dimana kita dapat melihat seluruh realitas secara objektif.

Karena ada banyak dunia, pengetahuan dan kebenaran itu pun sangat pluralistik. Karena tidak ada dunia yang objektif, maka tidak ada dasar lagi untuk menilai benar-salahnya suatu konsep (pengetahuan). Biarlah konsep-konsep yang berbeda, bahkan bertentangan itu, hidup berdampingan.

Karena realitas itu sebagian bergantung pada kebudayaan, ia setiap saat berubah sebagaimana kebudayaan, dan bervariasi dari satu komunitas dengan komunitas lain. Pengetahuan sebagai upaya manusia dalam menangkap realitas dengan demikian bukanlah pengetahuan yang satu, abadi, dan universal. Bahkan pengetahuan bagi sebagian postmodernis (Lyotard) tidak dilihat sebagai alat untuk memupuk otoritas-otoritas melainkan untuk lebih memurnikan sensitivitas terhadap perbedaan-perbedaan dan memperkuat kemampuan kita untuk bersikap toleran terhadap hal-hal yang tidak tergantikan (*incommensurable*).

Maka riset dan penyelidikan ilmiah tidak harus dilihat sebagai upaya untuk menentukan realitas yang *pre-existing*, melainkan sebuah proses interaktif antara manusia dan realitas dalam penciptaan pengetahuan. Dalam pengetahuan kita seharusnya, menurut kaum postmodernis, mengembangkan suatu '*working understanding*' atas realitas dan hidup yang menjamin tujuan-tujuan kita. Dan karena tujuan-tujuan dan konteks itu bervariasi dari satu individu dengan individu lain, dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang dicapai dalam proses itu sebagian hanyalah autobiografi. Ia merefleksikan 'narasi personal' kita, 'tempat partikular kita dalam dunia'.

Pengetahuan dan Kekuasaan

Dimensi lain dari pengetahuan, seperti ditunjukkan oleh Foucault, ialah kekuasaan. Menurut Foucault, para ahli modern memiliki anggapan yang salah tentang pengetahuan, seperti: 1) Ada pengetahuan yang objektif, 2) Pengetahuan itu netral (bebas nilai), dan 3) Pengembangan pengetahuan bermanfaat bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Foucault menolak adanya pemikiran yang objektif, karena pengetahuan dalam batas-batas tertentu, tidak bisa melampaui batas sejarah dan masyarakat. Bahkan karena pengetahuan itu menyatu dengan dunia, pengetahuan pun terlibat dalam perebutan kekuasaan dan pertempuran dunia. Bentuk-bentuk kekuasaan itu terwujud dalam bahasa-bahasa khusus dan resmi. Ia menolak kebenaran sebagai pengetahuan yang telah disahkan melalui prosedur-prosedur kelompok ahli.

Pengetahuan tidak lepas dari kekuasaan karena tidak lepas dari wacana. Wacana-wacana yang dihasilkan baik oleh individu maupun lembaga mendukung kekuasaan. Wacana berguna untuk menyamakan, memerinci, dan mendefinisikan berbagai hal sehingga menjadi ada. Kebenaran bukan sesuatu yang 'ada disana' melainkan 'diproduksi', suatu 'dongeng' yang berhubungan dengan kekuasaan. Sistem kekuasaan itulah yang mempertahankan kebenaran. Kebenaran hanyalah produk dari praktek-praktek tertentu. Kekuasaan pengetahuan tampak dalam wacana yang menciptakan 'kebenaran' demi kepentingannya. Ilmu pengetahuan merupakan sebuah ideologi.

Seperiti wacana lainnya tidak ada pengetahuan yang netral. Keinginan untuk mengetahui masa lampau tidak mungkin digerakkan oleh keinginan objektif untuk mencari pengetahuan dan kebenaran, melainkan lahir dari kehendak untuk mengontrol masa lampau untuk mengesahkan struktur masa kini yang ada. Keinginan yang seolah-olah netral, pada intinya hanyalah topeng belaka untuk menutupi 'kehendak untuk berkuasa melalui pengetahuan' (misalnya dengan membuang cerita tertentu dan mengabaikan keberagaman). Pengetahuan adalah kekerasan. Dan kekerasan ini mesti dilawan dengan

memdengungkan mitos-mitos yang berguna untuk meruntuhkan tantangan yang ada supaya menjadi usang (masa lampau).

Lyotard beranggapan bahwa tidak ada satu narasi tunggal dalam pengetahuan dan filsafat. Yang ada adalah multinarasi. Metanarasi, *metadiscourse*, narasi besar, narasi agung, atau apa pun namanya, menunggalkan kebenaran. Menunggalkan kebenaran merupakan kejahatan yang paling jahat, teroris. Karena yang terjadi bukanlah suatu dialog kebenaran melainkan suatu upaya sistematis menegaskan 'kebenaran' dengan membungkam yang lain. Berkaitan dengan multinarasi ini, kaum postmodernis umumnya percaya bahwa tidak ada satu model pengetahuan yang universal dan kekal. Salah satu dari slogan-slogan terkenal kaum postmodernis ialah bahwa 'tidak ada pusat' atau lebih tepat tidak ada tradisi pusat (*central tradition*) ilmu pengetahuan (seperti Eropa, Amerika, kelas menengah) bagi tradisi-tradisi lain (seperti Asia, pribumi, Islam, kelas pekerja, atau apa pun namanya).

Epistemologi ala postmodern merupakan suatu epistemologi yang terbuka. Tidak ada kepastian yang benar-benar pasti dan tak terubahkan dalam ilmu pengetahuan. Kebenaran hanyalah sebuah ketertundaan untuk menjadi salah. Pengetahuan, menurut postmodern, menyimpan ambiguitas dan ketidakpastian. Apa yang dianggap sebagai benar paling *banter*, terutama dari narasi-narasi agung, tidak lebih dari probabilitas-probabilitas yang semakin pasti. Dan pengetahuan itu pun terus berubah mengikuti interpretasi tertentu oleh individu-individu atau kelompok-kelompok dengan kebutuhan dan pengalaman yang berbeda. Bermain dengan interpretasi berarti bermain dengan bahasa yang diinterpretasikan dan bahasa yang dipakai untuk menyatakan hasil interpretasi. Jika bahasa adalah sebuah permainan, maka kata-kata itu tidak terikat pada konsep-konsep atau referensi-referensi yang *fixed* melainkan bergantung pada makna (*meaning*) mereka dalam suatu sistem kata secara keseluruhan dimana mereka dicampakkan. Dan sistem itu terus berubah setiap saat dan bervariasi dari satu komunitas pemakai bahasa ke komunitas pemakai bahasa yang lain.

5.3. Postmodernisme dalam Agama

Ernest Gellner, dalam bukunya, *Postmodernism, Reason and Religion* (2003), menyatakan bahwa dewasa ini, dalam kaitannya dengan agama, terdapat tiga persoalan penting yang mendesak untuk diperhatikan. Ketiga persoalan tersebut adalah pertama, fundamentalisme religius, kedua, relativisme keyakinan (sebagaimana yang tercermin dalam model keyakinan 'postmodernisme') dan ketiga, rasionalisme Pencerahan atau fundamentalisme rasional (Gellner 2003: 2). Fundamentalisme religius merupakan gerakan dalam agama yang ingin kembali ke keyakinan dan tradisi asli (*original*). Sementara relativisme ingin menegaskan keunikan kebenaran masing-masing keyakinan sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan keyakinan lain dalam masyarakat atau kebudayaan. Rasionalisme Pencerahan atau fundamentalisme rasional menegaskan anggapan bahwa setiap agama dan kebenaran keyakinan itu unik tetapi menolak bahwa setiap masyarakat tidak akan memilikinya secara definitif. Meskipun pandangan ini masih bisa diperdebatkan, dewasa ini, persoalan-persoalan agama, memang mendapat banyak perhatian.

Salah satu persoalan yang tidak kalah menarik perhatian adalah munculnya kasus-kasus kekerasan sosial dan etnis atas nama agama. Maka pertanyaannya adalah bagaimana keberagaman agama mesti dipahami dan disikapi? Postmodernisme dalam bidang agama menunjukkan salah satu visi alternatif yang bisa memperkaya wacana tentang kehidupan beragama, meskipun visi postmodern tentang agama pun tidak bisa dimutlakan juga.

Dalam bidang agama, gerakan pemikiran dan praktik postmodernisme lebih menekankan substansi keyakinan manusia dalam agama dari pada fungsi formal agama. Bahkan istilah 'agama' yang terkesan formal, ilmiah, dan rasional merupakan hal yang lebih

ingin dihidari oleh posmodernisme. Guna menghindari karakter formal keyakinan, kaum postmodernis lebih ingin menekankan spiritualitas-kepercayaan dari pada agama.

Tiga Lapisan Agama

Agama, secara hirarkis, menampilkan tiga komponen penting yang tidak hanya berbeda melainkan juga memiliki signifikansinya masing-masing. Ketiga level tersebut, adalah level sakralitas, spiritualitas, dan humanitas. Yang dimaksud dengan sakralitas adalah segala bentuk ajaran, dogma, atau teologi tentang Yang Suci yang disembah dalam setiap agama berdasarkan kitab suci atau sumber lain yang diyakini dalam setiap agama. Beragama pada level ini menuntut keyakinan dan kepercayaan penuh pada fondasi-fondasi agama dari para pemeluknya. Sementara pada level kedua, spiritualitas, berkaitan dengan bagaimana orang-orang beragama menunaikan kebajikan-kebajikan religius berdasarkan ajaran atau keyakinan yang dianutnya. Spiritualitas merupakan tanda bagaimana seorang beragama menjalankan kewajiban agamanya, dalam hubungannya dengan Allah dan juga dengan manusia, berdasarkan ajaran atau keyakinan agama yang dianutnya. Tetapi pada level ketiga, level humanitas, yang diharapkan dari seorang beragama adalah bagaimana ia mengamalkan keyakinan-keyakinan dan spiritualitas keagamaannya dalam tindak konkret sehari-hari guna menegakkan keluruhan martabat setiap manusia sebagai 'citra Allah' melalui perbaikan mutu kehidupan bersama. Dengan rumusan lain, level humanitas menunjuk pada perbuatan-perbuatan nyata sebagai realisasi keyakinan yang dianut seseorang. Pemikiran dan gerakan postmodern yang 'anti-fondasional' lebih menekankan sisi spiritualitas dan humanitas dari pada aspek sakralitas yang menurut kaca mata postmodern hampir tidak bisa dipersoalkan dalam kategori benar/salah karena berkaitan dengan berbagai ragam sumber dan interpretasi yang menyertainya.

David Ray Griffin dalam buku *Visi-Visi Postmodern: Spiritualitas dan Masyarakat* [1988 (2005)] menunjukkan bahwa spiritualitas modern lebih didasarkan pada individu dari pada komunitas secara keseluruhan. Spiritualisme modern bisa dianggap sebagai bentuk lain dari individualisme religius. Pemikiran Rene Descartes, misalnya, jelas-jelas menunjukkan bahwa seluruh dunia di luar subjek (termasuk sesama dan dunia) hanya mungkin sejauh dipikirkan dan disadari oleh individu. Manusia seolah-olah tidak membutuhkan orang atau dunia di luar dirinya karena orang lain dan dunia itu ada sejauh dipikirkan dan disadari oleh manusia. Visi ini tidak hanya mengabaikan relasi dan tanggung jawab religius manusia terhadap sesama melainkan juga terhadap seluruh makhluk hidup dan alam di luar manusia.

Sebaliknya visi postmodern menekankan hubungan konstitutif seorang individu tidak hanya dengan segala latar belakang sosial dan historis yang melingkupinya melainkan juga dengan sesama dan alam. Maka spiritualitas postmodern adalah spiritualitas komunal dan organis. Dualisme dan dominasi subjek dalam tradisi modern diatasi. Dalam perspektif postmodern manusia merupakan bagian dari ke-satu-an umat manusia dan alam. Pesona manusia dalam kebersamaan dengan alam dan dunia sama-sama diakui.

Agama, Kebenaran, dan Toleransi

Kaum postmodernis percaya bahwa monoteisme bukanlah satu-satunya kepercayaan yang betul. Yang ada adalah pluralisme kepercayaan, keyakinan, dan religius. Terdapat berbagai ragam kebenaran. Dan yang lebih penting lagi, menurut kaum postmodernis, tidak ada agama yang memiliki dan memonopoli seluruh kebenaran. Bahkan dalam satu agama pun terdapat banyak kebenaran dan interpretasi. Maka dua dosa terbesar modernitas dalam bidang agama menurut kaum postmodernis adalah sikap intoleran terhadap keyakinan lain dan kepercayaan bahwa ada realitas objektif eksternal yang dapat ditunjuk secara transparan oleh keyakinan tertentu. Sikap intoleran tersebut tampak pada sikap menolak atau mengganggu praktek-praktek agama lain, termasuk di sini

mempertanyakan kebenaran atau validitas aspek-aspek tertentu dari agama lain. Sikap seperti ini pun secara moral sangat ofensif. Kaum fundamentalis entah dalam pengertian ekstrimis agama atau orang yang menganggap diri mengetahui kebenaran (menilai ajaran agamanya sendiri atau dalam agama lain dalam kategori benar atau salah) atau memutlakan kebenaran agamanya sendiri ditolak kaum postmodernis. Kaum fundamentalis dalam kaca mata kaum postmodernis keliru karena mengklaim adanya satu kebenaran yang objektif, universal, totalistik dan mutlak dan seolah-olah mereka dapat menunjukkannya. Pada hal dalam praktik hal ini tidak pernah bisa dilakukan.

Kaum postmodernis berpendapat bahwa kaum modernis menggunakan *reason* atau akal untuk meniadakan 'orang' dalam agama. Bila ada orang menerapkan akal pada agama, realitas seseorang itu dianggap salah. Ini sangat tidak inklusif, naif dan sadis karena: pertama, mempertanyakan keyakinan lain secara tidak langsung menyatakan bahwa kita dapat menunjukkan suatu realitas objektif eksternal pada hal realitas semacam itu tidak ada. Realitas merupakan suatu konstruksi sosial. Dengan berusaha untuk menerapkan rasionalitas pada agama, kita sebetulnya ingin mempraktekkan budaya Pencerahan pada yang lain. Kedua, dengan menantang klaim-klaim kebenaran dari agama lain, kita mendevaluasi orang (*person*) yang sebetulnya merupakan sumber dari kebenarannya sendiri. Pengalaman dan interpretasi personal serta *personal empowerment* diperkenalkan kaum postmodernis sebagai ganti bagi kebenaran tentang Allah.

Relativisme intrinsik dalam tradisi-tradisi mistik Timur seperti Hinduisme, Buddhisme, dan Taoisme sangat cocok (*compatible*) dengan keyakinan kaum postmodernis. Sebagai keyakinan monistik, tradisi-tradisi tersebut mengajarkan bahwa segala sesuatu merupakan bagian dari *one essence*. Agama-agama ini tidak hanya menolak akal (*reason*) sebagai sarana untuk menemukan kebenaran melainkan juga menggunakan kontradiksi atau cara berpikir paradoks pada level rasional untuk menarik pengikutnya untuk sampai pada taraf pemahaman yang lebih dalam atau lebih tinggi. Buddhisme misalnya melukiskan Tao sebagai suara dari tepuk tangan dengan satu tangan, atau Hindu Brahma yang menekankan '*always and never*' sekaligus. Agama-agama Timur dan postmodernis tidak menerima realitas dunia dalam arti sesuatu yang objektif. Dalam Hinduisme dunia material adalah *Maya*, yang berarti ilusi. Apa yang kelihatannya real bagi kita (dunia material) hanyalah suatu ilusi. Bagi postmodernis, realitas merupakan suatu konstruksi sosial. Spiritualitas-spiritualitas tradisional dan kesadaran *New Age* yang tidak menggunakan akal dalam memahami dunia cocok dengan keyakinan postmodern ini.

Kembali ke Pengalaman Personal

Pengalaman personal: 'Allah bagi aku', 'Allah sebagaimana yang saya pahami', (bukan *content*), kiranya merupakan salah satu ciri kunci pemahaman postmodernisme tentang agama. Agama, lebih sebagai keyakinan personal masing-masing individu dari pada struktur formal dan rasional kelompok beragama. Yang ditekankan oleh kaum postmodernis bukanlah pengujian rasional keyakinan mana yang betul dan mana yang salah berdasarkan sumber-sumber keyakinan yang sah dari agama masing-masing melainkan perubahan sikap hidup personal masing-masing insan beragama sebagai perwujudan dari keyakinannya. Bukankah pengalaman beragama justru semakin diperkuat ketika seorang beragama mampu melepaskan ikatan-ikatan duniawi-sosial untuk masuk ke permenungan bathin-ilahi agar mampu bertemu Sang Khalig?

Istilah yang sering dipakai kaum postmodernis untuk melukiskan penekanan pengalaman personal dalam beragama ini adalah 'privatisasi agama'. Dalam dunia kehidupan sosial yang semakin beragam, agama sebaiknya, menurut kaum postmodernis, ditempatkan sebagai pengalaman personal (etika personal) dari pada kategori yang diterapkan dalam kehidupan sosial secara umum. Singkatnya, kaum postmodernis ingin menyatakan bahwa dalam kehidupan bersama dengan orang lain, jangan membawa agama-

agama anda (meskipun tidak bisa ditinggalkan). Hiduplah berdampingan secara damai dengan orang dari agama lain karena sebagai manusia, dia lebih real dari pada agama yang dianutnya. Sejumlah pemikir bahkan menyatakan bahwa 'humanitas' mendahului 'religiositas' seperti 'eksistensi' mendahului 'esensi'.

Dalam bidang agama, postmodernisme tidak hanya menolak adanya kebenaran keyakinan yang objektif, mutlak, dan universal, melainkan juga beranggapan bahwa semua kebenaran merupakan hasil preferensi pribadi. Roger Lundin menyatakan, *"all principles are preferences - and only preferences"*. Jika keyakinan dalam agama merupakan hasil preferensi pribadi dan dengan demikian pada hakikatnya adalah subjektif, maka juga tidak bisa dinilai benar atau salah. Kenyataan ini sudah jauh-jauh hari disadari oleh Sigmund Freud. Freud menegaskan, *"Fundamentally, we only find what we need and only see what we want to see. We have no other possibility. Since the criterion for truth - correspondence with the external world - is absent, it is entirely a matter of indifference what opinions we adopt. All of them are equally true and equally false. And no one has the right to accuse anyone else of error"*.

Karena keyakinan merupakan hasil preferensi pribadi, keyakinan pun tidak boleh dipaksakan pada orang lain. Pemaksaan merupakan salah satu bentuk 'kehendak untuk berkuasa' (Nietzsche). Itulah sebabnya mengapa, kaum postmodernisme mewaspadaikan orang-orang, kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang berbicara 'atas nama' agama. Berhadapan dengan keberagaman keyakinan, yang dibutuhkan adalah keterbukaan, toleransi dan kerja sama untuk membangun kehidupan bersama ke arah yang lebih maju dan bermartabat atas dasar saling menghargai. Allan Bloom, dalam bukunya *The Closing of the American Mind*, mengingatkan, *"The danger...is not error but intolerance. Relativism is necessary to openness; and this is the virtue, the only virtue, which all primary education for more than fifty years has dedicated itself to [teaching]. Openness - and the relativism that makes it the only plausible stance in the face of various claims to truth and the various ways of life and kinds of human beings - is the great insight of our times. The true believer is the real danger. The study of history and of culture teaches that all the world was mad in the past; men always thought they were right, and that led to wars, persecutions, slavery, xenophobia, racism and chauvinism. The point is not to correct the mistakes and really be right; rather it is not to think that you are right at all"*.

Jika otoritas dan kebenaran yang objektif ditolak, maka bagi kaum postmodernis, agama lalu dikembalikan pada emosi, perasaan, intuisi, refleksi, magis, mitos, dan pengalaman-pengalaman mistik personal. Dengan mengembalikan agama pada pengalaman personal, konsekuensinya adalah bahwa ada berbagai ragam agama dan keyakinan. Keyakinan ini berbeda dengan anggapan modern yang berusaha untuk mencari keyakinan yang benar, mutlak, universal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Agama membutuhkan sikap rendah hati dan kesederhanaan, seperti ditegaskan Os Guinness dalam buku *Fit Bodies, Fat Minds*. Os Guinness menulis, *"Where modernism was a manifesto of human self-confidence and self-congratulation, postmodernism is a confession of modesty, if not despair. There is no truth, only truths. There are no principles, only preferences. There is no grand reason, only reasons. There is no privileged civilization, only a multiple of cultures, beliefs, periods, and styles. There is no grand narrative of human progress, only countless stories of where people and their cultures are now. There is no simple reality or any grand objectivity of universal, detached knowledge, only a ceaseless representation of everything in terms of everything else. In sum, postmodernism...is an extreme form of relativism"*.

Dengan mengembalikan agama sebagai pengalaman personal, konsekuensinya, peran agama sebagai institusi utama yang menentukan nilai-nilai moral sosial pun semakin berkurang. Semua nilai moral, dalam pandangan kaum postmodernis dianggap relatif. Setiap orang, setiap kelompok, atau setiap kebudayaan menengembangkan nilai-nilai moral mereka sendiri. Maka salah satu pertanyaan etis yang penting bagi kaum postmodernis bukan 'apa yang benar atau apa yang baik' melainkan 'apa yang berguna bagi saya', 'apa

yang berguna bagi kami'. Maka tekanan diberikan pada fakta bahwa individu-individu itulah yang menjadi patokan terakhir nilai-nilai moral. Karena tanggung jawab moral pada akhirnya lebih merupakan tanggung jawab personal dari pada tanggung jawab komunal.

Tetapi dalam konteks yang lebih luas, postmodernis juga mengingatkan bahwa setiap masyarakat dan kebudayaan merupakan acuan penting nilai-nilai moral yang mesti dianut. Tidak ada kelompok masyarakat yang lebih super dari kelompok lain dan dengan demikian berhak menentukan atau memaksakan nilai-nilai moral yang mereka anut kepada kelompok masyarakat lain karena merasa nilai-nilai yang mereka anut lebih benar atau lebih baik dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok lain. Jika ini terjadi, lagi-lagi yang bisa disaksikan adalah otoriter, pemaksaan, konflik, dan intoleran. Maka kaum postmodernis menekankan toleransi terhadap nilai dan keyakinan kelompok masyarakat lain. Frederick Turner, seorang analis postmodern, dalam buku *The Future of the Gods: Notes Towards a Postmodern Religion*, menyatakan bahwa kaum postmodernis umumnya menuntut toleransi terhadap segala perbedaan dan keberagaman termasuk keberagaman nilai dan keyakinan.

Kebangkitan Kembali Agama

Jika pada era modern, pengaruh agama dalam kehidupan sosial berkurang, di era postmodern ini, peran agama justru semakin dominan. Meskipun kaum postmodernis memproklamirkan 'privatisasi agama', di era postmodern ini berlangsung apa yang sering dikenal sebagai pembalikan religius. Pembalikan tersebut selain disebabkan oleh kegagalan modernisme memenuhi janji utopisnya sebagai sandaran terakhir dalam hidup manusia, perspektif postmodernisme ikut 'mencerahkan' pemahaman yang baru tentang kehidupan beragama. Sendi-seni kepercayaan dan peran agama bagi kehidupan sosial mengalami transformasi.

Jim Leffel dan Dennis McCallum, dalam artikel *on line* mereka *Postmodernism and You: Religion*, menyatakan bahwa saat ini justru lebih banyak orang tertarik pada spiritualitas dari pada era sebelumnya. Dengan mengutip studi-studi sosiologis mereka menunjukkan bahwa sekarang ini sekitar 95% orang dewasa percaya akan Allah. Buku-buku tentang agama, pengalaman mendekati kematian, *New Age*, dan spiritualitas pun menjadi buku-buku *best seller*. Tetapi model spiritualitas baru yang semakin diminati tersebut bukanlah spiritualitas lama (modern) yang selalu ingin menguji kebenaran agama melalui metode-metode ilmiah melainkan justru meletakkan pengalaman beragama sebagai pengalaman personal (mistik) masing-masing orang.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin relasional, inklusif, terbuka, dan toleran, agama sebagai salah satu komponen kunci kebudayaan mau tak mau bersikap inklusif dan toleran juga. Pemikiran dan gerakan fundamentalisme agama yang mengklaim mengetahui dan memiliki sumber, ajaran, prinsip, atau sikap hidup yang paling benar jika dibandingkan dengan ajaran, prinsip, atau sikap hidup lain, tidak hanya keliru melainkan juga semakin usang dan ditinggalkan. Fundamentalisme agama keliru karena mereka menganggap klaim-klaim keyakinannya sebagai satu-satunya klaim yang benar dan ingin memberlakukan kebenaran klaim partikular tersebut secara universal (*metanarasi*). Sikap seperti ini sama dengan visi 'totalistik', 'universalistik' atau 'logosentrisme' yang merupakan warisan pemikiran dan praktik budaya modern.

Maka toleransi terhadap agama dan keyakinan lain merupakan salah satu pilar utama gerakan pemikiran dan budaya beragama postmodernisme. Bahkan toleransi dan solidaritas yang dimaksud tidak hanya terhadap agama dan keyakinan lain melainkan juga terhadap teori, pengetahuan, pendapat, argumen, dan cara hidup yang begitu beragam antara satu orang dengan orang lain atau antara satu kelompok dengan kelompok lain. Dasar dari toleransi terhadap kekayaan dan keberagaman sosial, termasuk keberagaman agama, adalah penolakan postmodernisme terhadap 'grand narasi' dan pengakuan adanya multinarasi terutama narasi-narasi kecil yang terpinggirkan.

Seperti kaum skeptis yang meragukan kepastian dan kebenaran pengetahuan yang objektif, dalam agama pun diragukan apakah manusia mampu mencapai kebenaran dan kepastian objektif. Seluruh kepercayaan pada dasarnya merupakan keyakinan subjektif individu-individu. Hal itu terkait dengan konsep tentang realitas. Realitas bukanlah sekedar ciptaan Allah yang terberi (*given*) melainkan hasil konstruksi manusia. Dalam kadar tertentu, peran Allah 'dikurangi'. Meskipun Dia ada, Dia tidak setiap saat menyatakan apa pun tentang apa yang kita percayai atau bagaimana seharusnya kita bertindak. Dalam kenyataan, keyakinan dan perbuatan murni merupakan hasil pilihan bebas manusia. ***

Bab 6

Postmodernisme dalam Bidang Politik dan Hukum

6.1. Pengantar

Sebagai gerakan budaya, postmodernisme berkembang dalam pemikiran dan tindakan politik serta hukum. Dalam bidang politik, kaum postmodernis menolak liberalisme sebagai *grand-narasi* modern serta penerapannya dalam demokrasi. Dalam liberalisme atau bahkan dalam demokrasi, kaum minoritas dan terpinggirkan, meskipun diakui haknya, tidak mempunyai suara yang menentukan pengelolaan masyarakat. Karena liberalisme dan demokrasi, pada akhirnya hanya menegakkan individualisme atau diktator mayoritas atas minoritas.

Dalam bidang hukum, pemahaman terhadap kebenaran dan praktik hukum berubah. Kebenaran hukum dipahami sebagai kebenaran interpretatif dan dengan demikian tak bisa dimutlakkan. Hukum pun harus diperlakukan sebagai teks yang maknanya tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, melainkan juga oleh teks-teks lain (termasuk teks di luar hukum) agar pemahaman terhadap hukum semakin luas dan menyeluruh dan bukan parsial.

Dalam bab ini akan dijelaskan pengaruh postmodernisme dalam bidang politik dan hukum. Kita mulai dengan pengaruh postmodernisme dalam bidang politik.

6.2. Postmodernisme dalam Bidang Politik

Penolakan terhadap *Grand-narasi*

Dalam bidang politik, ideologi liberalisme dan penerapannya dalam demokrasi, menurut postmodernisme, merupakan jalan memutar yang tujuan akhirnya hanyalah menyuburkan individualisme atau paling tidak oligarki dan hegemoni kekuasaan. Stephen Hicks menyebutkan tiga pemikir yang pandangannya cukup kuat mempengaruhi pemikiran modern dalam bidang politik yakni Francis Bacon, Rene Descartes, dan John Locke. Ketiga filsuf ini disebut modern karena naturalisme fisafati mereka, kepercayaan penuh mereka pada akal, dan khusus Locke, individualismenya. Menurut pemikir-pemikir modern, perspektif dan akal manusia mampu memahami alam. Manusia adalah makhluk yang otonom dan mampu membentuk karakternya sendiri. Pemikir modern menekankan sisi individualitas manusia, melihat individu sebagai *the unit of value*. Meskipun Descartes seorang rasionalis sementara Bacon dan Locke seorang empiris, tetapi yang pokok pada ketiga pemikir ini adalah status sentral akal (*reason*) sebagai sesuatu yang objektif dan kompeten. Jika akal merupakan kemampuan individual maka individualisme menjadi tema kunci dalam etika termasuk etika politik.

Penerapan individualisme dalam bidang politik tampak dalam demokrasi liberal (*liberal democracy*). Liberalisme merupakan prinsip kebebasan individual dan demokrasi merupakan prinsip desentralisasi kekuasaan politik pada individu-individu. Banyak kaum postmodernis dalam bidang politik berperan sebagai aktivis politik. Mereka mendekonstruksi akal (*reason*), kebenaran, dan realitas karena kepercayaan penuh pada akal dan realitas dalam peradaban Barat melahirkan dominasi, penindasan dan destruksi. Lyotard mengatakan *'reason and power are one and the same'. Both lead to and are synonymous with prisons, prohibitions, selection process, the public good.*

Sejumlah kaum postmodernis dalam bidang politik tidak bergerak dalam tataran teoretis, melainkan memilih menjadi aktivis politik. Mereka menentang koalisi *reason and power*. Dalam kaitannya dengan demokrasi, Jameson, misalnya, menolak penyerahan tanggung jawab dan keterlibatan politik pada kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat karena tidak ada jaminan bahwa kepentingan seluruh anggota masyarakat

diperjuangkan. Sementara itu, bagi Hutcheon, postmodernisme dikatakan ingin membuka saluran politik baru dengan menentang wacana ideologis dominan saat ini (Malpas 2005: 27).

Sebagai implikasi dari penolakan mereka terhadap grand narasi dalam bidang politik, kaum postmodernis tidak tertarik mencari dasar-dasar politik yang legitim atau dasar-dasar pembenaran kekuasaan, melainkan justru ingin mengawal pelaksanaan kekuasaan demi perubahan sosial dalam masyarakat. Kaum postmodernis berusaha menentang berbagai horror dan kejahatan politik terutama terhadap kaum minoritas, perempuan, dan kaum miskin.

Salah satu grand narasi yang ditolak oleh postmodernisme adalah ideologi politik ekonomi: kapitalisme. Meskipun kapitalisme sudah dikritik habis-habisan oleh Marx dan pengikutnya, kaum postmodernis yang beraliran Neo-Marxian, justru kritis terhadap pandangan Marx sendiri dan berusaha untuk mencari jalan lain untuk mencermati kehidupan politik ekonomi. Mereka menolak Marxisme sebagai grand narasi untuk menjelaskan persoalan-persoalan sosial seperti alienasi, penindasan, kemelaratan, kemiskinan, dan eksploitasi yang berlangsung dalam masyarakat modern dan postmodern. Marxisme bahkan dianggap gagal karena ramalan Marx bahwa kesamaan dan kesejahteraan sosial dapat terwujud ketika hak miliki pribadi atas alat-alat produksi sudah berada di tangan proletar melalui revolusi proletar. Pada hal revolusi semacam itu tidak pernah terwujud. Bahkan kebutuhan kaum proletar justru semakin terakomodasi dalam sistem kapitalis dan kapitalisme, meskipun secara perlahan tetapi meyakinkan, mengubah wajahnya sendiri menjadi semakin manusiawi. Justru sosialisme yang mengambil spirit teoretisnya dalam pemikiran Marxisme, dewasa ini, semakin kolaps. Di sisi lain, politik kapitalisme justru semakin mengglobal. Perkembangan kapitalisme global seolah menunjukkan bahwa tidak ada alternatif lain yang mumpuni bagi jaringan keuangan dan perdagangan lintas dunia alias global. Globalisasi ekonomi dengan demikian menghancurkan proyek-proyek organisasi modern, kesejahteraan dan kenegaraan (Malpas 2005: 108). Maka kaum postmodernis dalam bidang politik ekonomi, justru berusaha untuk mencermati hegemoni politik dan ekonomi di tangan pelaku-pelaku ekonomi global.

Menurut kaum postmodernis dalam bidang politik-ekonomi seperti Jameson, Baudrillard, dan Harvey, modernisme sudah berakhir ketika kapitalisme memasuki era globalisasi. Karena dalam era ini, nasib pekerja tak lagi bergantung pada majikan (seperti diramalkan Marx). Kekuasaan negara yang secara historis menentukan pasar, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk negara kesejahteraan (*welfare state*) atau demokrasi yang ingin mengintegrasikan warga negara dalam pusat kekuasaan serta melegitimasi negara-bangsa (*nation-state*) dalam era global justru tak lagi dapat dilakukan. Seperti subjek modern yang tak lagi otonom karena pusat diri justru ditentukan oleh kekuatan-kekuatan historis dan sosial di luar diri manusia, demikian politik ekonomi yang menekankan otonomi individu dan negara justru semakin tersebar (*dispersal*). Dengan kata lain, proyek politik modern sudah berakhir (Beck 2000: 100, dikutip Malpas, 108). Beck menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme global itu bukan soal penggantian kedaulatan banyak negara dengan kekuasaan tunggal dunia melainkan sebuah proses di mana kapitalisme yang diorganisasi secara global yang terus berkembang, mengikis kemampuan negara dalam meregulasi ekonomi mereka dan mendistribusi kesejahteraan bagi warga negaranya karena pasar dunia semakin terinterkoneksi.

Tetapi kaum postmodernis dalam bidang politik mengakui bahwa Marxisme merupakan salah satu narasi modern yang tetap berpengaruh sampai sekarang. Modernitas pun dianggap sebagai kritik terhadap era sebelumnya dengan tujuan untuk mengubahnya. Bahkan pemikiran Marx sendiri tidak terutama sebagai sebuah filsafat teoretis melainkan sebuah filsafat praktis yang bertujuan untuk memahami dunia dan realitas secara berbeda dengan tujuan untuk memobilisasi orang untuk mengubahnya (Malpas 2005: 110). Kritik

Marx terhadap kapitalisme harus dipahami dalam kerangka transformasi masyarakat. Begitu juga halnya dengan Smith, Descartes, Kant, dan Hegel. Tokoh-tokoh modern ini merupakan para pengkritik zaman mereka dan berusaha untuk menghasilkan dunia dan kehidupan lebih rasional dan adil. Tetapi di antara tokoh-tokoh ini, Marx dan Marxisme dianggap sebagai analis politik yang paling ketat, berpengaruh, dan langgeng, yang secara politik revolusioner dan mungkin paling berpengaruh terhadap pemikiran postmodern seperti ditulis oleh Malpas, "*Marxism is, however, one of the most sustained, rigorous and revolutionary political analyses of modern society, and is also perhaps the most influential on postmodern thought*" (Malpas 2005: 110).

Maka pertanyaannya, apa basis pemikiran Marx tentang masyarakat dan politik? Apa inti kritik Marx terhadap kapitalisme? Marx ingin menentang efek-efek dehumanisasi dari apa yang dilihatnya sebagai kontradiksi-kontradiksi yang inheren dalam masyarakat kapitalisme. Ia ingin menawarkan suatu grand narasi revolusioner alternatif berhadapan dengan grand narasi yang sedang dianut yakni bahwa kapitalismenya itu membawa kemajuan, kesejahteraan seperti yang dilakukan masyarakat Eropa semenjak Revolusi Industri. Grand narasi Marx itu dikenal dengan nama materialisme historis (*historical materialism*). Premis sentralnya diambil dari Hegel, meskipun Hegel dinilai Marx terlalu spekulatif (dialektis spekulatif). Marx kemudian mengganti idealisme pemikir terdahulu dengan analisis materialis tentang realitas dengan mengambil kekuatan politik dan ekonomi sebagai basis yang membentuk seluruh pengalaman membudaya. Menurut Marx, Hegel betul ketika mengatakan bahwa fakta kemajuan itu berlangsung atau terjadi melalui konflik dan kontradiksi. Marx meneruskannya dengan mengatakan bahwa ide-ide abstrak itu mengubah dunia material baik pemikiran individual maupun interaksi sosial. Marx beranggapan bahwa identitas dan kesadaran itu bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir (*innate in subject*) melainkan digerakkan oleh lingkungan material di sekeliling kita dan yang paling penting adalah relasi-relasi dengan orang lain dalam masyarakat. "*It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness*" (2000: 425). (Malpas 2005: 111). Menurut Marx, kesadaran manusia ('saya yang berpikir' tidak *pre-exist* dan menentukan identitas dan interaksi sosial, melainkan sebaliknya ia ditentukan oleh konteks sosial dimana ia muncul (Malpas 2005: 111).

Seperti pada Hegel, sejarah adalah sebuah perjalanan roh, argumen Marx adalah bahwa kesadaran itu ditentukan secara historis dan kultural. Bagi Hegel, spirit merupakan kekuatan penggerak kemajuan yang bekerja melalui berbagai tahap kontradiksi antara akal dan realitas, sementara bagi Marx, konflik dan kontradiksi itu tidak berlangsung antara reason dan realitas melainkan di dalam kekuatan-kekuatan material dan institusi-institusi produksi dan konsumsi ekonomi (Malpas 2005: 111).

Bagi Marx, posisi subjek dalam relasi ekonomi dalam masyarakat itulah yang memproduksi identitas, sebagaimana ditegaskan Marx, "*In the social production of their life, men enter into definite relations that are indispensable and independent of their will, relations of production which correspond to a definite stage of development of their material productive forces. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society, the real foundation, on which rises a legal and political superstructure and to which correspond definite forms of social consciousness*" (Malpas 2005: 112).

Kesadaran akan dunia ditentukan oleh relasi-relasi subjek dengan kekuatan-kekuatan produktif: antara pekerja dan manager, antara manager dan yang memiliki pabrik, dengan kepentingan dan posisi yang berbeda-beda, kesempatan yang juga berbeda menurut kesejahteraan, pendidikan, hak-hak hukum, harapan dan lain sebagainya. "Kekuatan-kekuatan produktif dan relasi ekonomi itulah yang menjadi dasar dari superstruktur budaya (seni, pendidikan, hukum, relasi keluarga, dll.) dan itu menentukan seluruh aturan dan institusi dalam masyarakat termasuk produksi dan identitas subjeknya. Analisis

terhadap struktur identitas dan bentuk-bentuk masyarakat ini menjadi basis pandangan materialisme Marx dari kemajuan dan perubahan historis, yang membedakan grand narasi Marx dari filsafat spekulatif Hegel.

Tetapi bagi teori postmodern, struktur grand narasi pemikiran Marxis ini problematis. Filsuf postmodernis berkebangsaan Italia Gianni Vattimo berpendapat bahwa banyak pemikir postmodern menggunakan kerangka berpikir Marxis sebagai pisau analisis persoalan politik dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat, tetapi sekaligus menerima kekuatan transformasi sosial dan ekonomi dalam era postmodern. Fredric Jameson dan David Harvey merupakan contoh dari para pemikir postmodern yang awalnya menggunakan pisau analisis Marxis, tetapi kemudian meninggalkannya. Dalam *"Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism"*, Jameson berpendapat bahwa setiap posisi postmodernisme dalam kebudayaan, pada saat yang sama, atau sekaligus, baik secara implisit atau eksplisit, merupakan sebuah posisi politis berhadapan dengan hakikat kapitalisme multinasional saat ini (1991: 3). Bagi Jameson, postmodernisme yang berkembang dan didiskusikan dalam seni, literatur, dan kebudayaan pada umumnya, muncul dari transformasi-transformasi yang berlangsung dalam kapitalisme selama paruh kedua abad 20. Bahkan postmodernisme itu tidak hanya berkembang dari transformasi struktur ekonomi yang disebutnya 'kapitalisme lanjut' (*'late capitalism'*) melainkan ia merupakan 'logika kultural' dari perkembangan dalam kapitalisme tersebut. Dengan kata lain, menurut Jameson dan kemudian juga Harvey, superstruktur kultural postmodernisme ditentukan oleh transformasi basis ekonomi masyarakat dalam postmodernitas kapitalisme-lanjut.

Menentang Politik Bias Gender

Feminis postmodernis Francis, Julia Kristeva, menyatakan bahwa politik modern meminggirkan peran wanita dalam arena sosial (politik). Politik semacam ini harus diakhiri. Maka perjuangan postmodernis feminis memiliki dua target. Pertama, membuka kesempatan bagi kaum wanita untuk masuk dan berperan dalam sejarah dan kedua, penolakan radikal terhadap pembatasan-pembatasan subjektif yang dipasang oleh sejarah terhadap kaum wanita atas nama kelemahan atau perbedaan yang tak dapat direduksi (Kristeva 1989: 198).

Menurut Kristeva, feminisme modern memilih jalan pertama sebagai pendekatan universal yang 'memasukan' kembali kaum wanita dalam dalam grand narasi sejarah modern atas nama klaim atas kesamaan hak. Sementara pendekatan kedua, justru tidak ingin tunduk pada grand narasi universal yang ada. Kaum postmodernis feminis semacam Kristeva justru menuntut pengakuan identitas (kewanitaan) yang tak dapat direduksi (atas nama universalitas), tanpa kesamaan dalam perbedaan jenis kelamin. Yang ditekankan adalah pluralitas yang inheren dalam subjek kewanitaan itu sendiri, dan tidak ingin disamakan (universalitas) dengan laki-laki.

Politik Postmodern: Resistensi Tanpa Fondasi?

Salah satu pertanyaan pokok bagi kaum postmodernis adalah bagaimana suatu politik tanpa didasarkan pada identitas subjek manusia dan pada pemikiran historis grand narasi progresif itu mungkin?

Jameson dan Baudrillard menjawab bahwa kemungkinan kritik politik postmodern melibatkan cara-cara resistensi yang imanen dalam kapitalisme itu sendiri dari pada dalam politik yang selalu dihasilkan dari grand narasi atau didasarkan pada fondasi alternatif. Bagi postmodernis Marxis, pandangan bahwa politik tidak didasarkan pada grand narasi fondasional sangat problematik. Karena teori postmodern sendiri, kalau tidak diperlakukan secara total (sesuatu yang sangat ditolak oleh kaum postmodernis), apakah bisa menjadi

teori atau fondasi. Maka bagi Eagleton (1996: 134), politik radikal yang harus memiliki dua hal sekaligus: oposisional dan fondasional (pencarian grand narasi alternatif).

Tetapi kaum postmodernis dalam bidang politik seperti Ernesto Laclau, berdasarkan visi kritis postmodern, mengembangkan suatu 'politik tanpa fondasi' (*a 'politics without foundations'*). Politik semacam ini mencari sumber-sumber lain guna menolak totalitas kontemporer. Dalam esainya, *'Politics and the Limits of Modernity'*, post-Marxis Ernesto Laclau menunjukkan bagaimana kritisisme postmodern menantang modern tanpa membuang tujuan emansipasinya. Tetapi menurut Laclau, karakter absolut dari nilai, teori, dan grand narasi modern itu yang ditolak oleh postmodernisme politik. Laclau menulis, "*it is precisely the ontological status of the central categories of the discourse of modernity, and not their content, that is at stake; that the erosion of this status is expressed through the 'postmodern' sensibility; and that this erosion, far from being a negative phenomenon, represents an enormous amplification of the content and operability of the values of modernity. . . . Postmodernity does not imply a change in the values of Enlightenment modernity but rather a particular weakening of their absolutist character*" (Laclau 1988: 66-67).

Menurut Laclau, dalam ranah politik, yang berubah adalah status ontologis kedua model politik tersebut, sementara nilai-nilai seperti kebenaran, keadilan, dan demokrasi tidak berubah: kepastiannya, sarana-sarana yang mengartikannya, mempertimbangkannya, atau mempertahankannya. Lyotard juga membuat posisi yang sama dalam *The Postmodern Condition*, ketika ia mengatakan bahwa meskipun konsensus universal tidak lagi memungkinkan, keadilan sebagai nilai tidak berada di luar apa yang kita lakukan. Bahkan yang penting bukan mengedepankan teori tentang kebebasan dan keadilan melainkan pendekatan yang berbeda yang membuatnya dapat diterima dan dipraktikan tanpa perlu meletakkannya pada kategori 'manusia' absolut, universal, totalitas, atau grand narasi. Laclau berpendapat bahwa apa yang membedakan postmodern dari modernis ialah bahwa, di samping proyeknya terletak pada 'pendapat tentang totalitas sejarah', postmodernitas dimulai ketika identitas yang hadir secara penuh terancam oleh hal-hal ekstrem yang tak dapat dikendalikan yang memperkenalkan dimensi kegelapan dan pragmatisme ke dalam tindakan konkret. Bagi Laclau, dalam politik yang berjalan dengan strategi-diskursus yang begitu kompleks, tidak ada kepastian mana yang musuh yang terus menyerang sehingga dibutuhkan analisis taktik tentang kemungkinan inheren yang tak terhindarkan, dan hampir pasti tidak komplet atau jelas.

Bagi Laclau dan Lyotard, postmodern itu tidak sekedar sebuah gerakan melampaui modern melainkan sebuah mode kritik yang imanen didalamnya. Ia tidak memberikan jawaban final atau membangun suatu grand narasi alternatif. Sebaliknya, postmodernisme dalam bidang seni, teori atau literer umumnya menegaskan kepingan-kepingan dan kebisuan-kebisuan yang selalu merupakan bagian dari grand narasi; menghadirkan kejahatan yang muncul dari pemikiran fundasional sebagai kategorinya yang dipaksakan pada dunia pengalaman yang begitu keras; menemukan sarana untuk menyuarakan subjek atau aspek-aspek subjektivitas yang unik yang dibungkam atau dibenamkan oleh totalitas diskursus modern, seperti ditegaskan Malpas, "*For both Laclau and Lyotard, then, the postmodern is not simply a move beyond the modern but is rather a mode of critique that is immanent to it. It does not provide final answers or set up alternative grand narratives. Instead, postmodernism in art, theory or culture generally sets out to demonstrate the fractures and silences that have always been part of the grand narratives, to present the violence that emerges from foundational thinking as its categories are imposed on the refractory world of experience, to find means to give voice to those subjects or aspects of subjectivity whose uniqueness is occluded or silenced by the discursive totalities of the modern*" (Malpas 2005: 131).

6.3 Postmodernisme dalam Bidang Hukum

Keraguan terhadap Objektivitas Hukum

Dalam bidang hukum, pandangan-pandangan dari *legal pragmatism* dan *critical legal theory* membubuhkan gelombang baru dalam pemahaman terhadap hukum. Teori abstrak dan universal tentang hukum tidak lagi dipercaya. Teori-teori menurut kaum postmodernis berguna apabila dalam batas tertentu memberikan *lawyer* dan para hakim perangkat-perangkat verbal yang berguna (*useful verbal tools*). Standar-standar itu bersifat subjektif dan bervariasi. Postmodernisme meneruskan perjuangan ini dengan mengatakan bahwa karena tidak ada prinsip-prinsip keadilan legal yang universal, argumen-argumen hukum tidak lebih dari ungkapan keinginan semata-mata dari para penafsir (*rhetorical battles of wills*).

Teori-teori hukum kritis (*critical legal studies*) menunjukkan versi ras, kelas, dan seks dari postmodernisme hukum. Menurut pandangan ini, konstitusi-konstitusi hukum dan argumen-argumen pendahulu sesungguhnya tidak menentukan. Apa yang disebut sebagai objektivitas dan netralitas penalaran hukum (*legal reasoning*) hanyalah tipuan belaka. Semua keputusan pada dasarnya subjektif dan didorong oleh faktor preferensi dan politik.

Hukum merupakan senjata yang digunakan dalam arena sosial yang penuh dengan konflik subjektif, sebuah arena dengan berbagai keinginan yang saling berkompetisi dan tuntutan-tuntutan keinginan jahat suatu kelompok terhadap kelompok lain. Dalam konteks Barat, menurut Hicks, selama bertahun-tahun hukum dipakai untuk mem-backup tuntutan keinginan orang kulit putih. Salah satu jalan untuk mencegah hal ini adalah penegasan kekuatan dan kepentingan-kepentingan subjektif yang sama dari kelompok-kelompok yang secara historis tertindas. Stanley Fish, yang berusaha untuk menggabungkan anggapan kaum pragmatistis dan teori kritis ini, mengatakan bahwa apabila para *lawyer* dan para hakim memposisikan diri mereka sendiri lebih sebagai '*supplementers*' dari pada '*textualists*', maka mereka akan menjadi lebih bebas menginterpretasi dari pada harus memaksakan ke dalam hukum konstitusi interpretasi-interpretasi mereka sendiri tentang nilai-nilai dalam masyarakat.

Dekonstruksi Formalisme Hukum

Titik tolak jurisprudensi postmodern adalah pengakuan bahwa hukum merupakan konstruksi sosial yang terdiri dari berbagai aturan, regulasi, statuta, administrasi, pengadilan, putusan, disiplin, kebudayaan, dan sebagainya. Tetapi menurut kaum postmodernis, penisahan wilayah publik dan personal, antara prinsip dan praktik, antara legalitas dan praktik hukum, membuat hukum tidak lagi koheren dan adil. Kaum yang merumuskan hukum di parlemen lebih sering menyelinapkan keinginan dan kepentingan mereka ke dalam produk undang-undang dari pada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Melalui bahasa-bahasa yang digunakan, entah berdasarkan hukum atau diskresi, para legislator justru lebih menegaskan *status quo* dan wewenang otoriter mereka dari pada kebaikan publik. Para administrator hukum lebih memproteksi kepentingan mereka sendiri dari pada masyarakat di luarnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki, para legislator, para regulator, bahkan juga para ahli hukum justru memperlebar gap antara hukum dan masyarakat. Hukum dalam masyarakat postmodern, menurut Malpas, justru lebih menampilkan wajah imperialistik dari pada keadilan sebagai substansinya. Bahkan negara pun dianggap tidak kalah koersifnya dengan hukum. Di tangan negara, hukum menjadi alat bagi politik penindasan.

Menurut kaum postmodern, hukum harus didekonstruksi. Salah satu cara untuk mendekonstruksi hukum adalah membaca dan mencermati hukum sebagai teks tidak terutama dengan memperhatikan landasan teori yang melatarbelakanginya, kontekstualitas, bahkan hubungannya dengan teks lain, melainkan mencermati sisi represif, distortif, otoriter, dan manipulatifnya. Maka studi hukum, menurut kaum postmodern, tidak terutama mencari koherensi substansif-normatifnya melainkan daya liberasi dan keadilan dalam praktis sebagai spirit dasarnya (Connor : 203). Connor menulis, "Teori postmodern

mencermati persoalan keadilan tidak hanya dalam teks melainkan juga di 'dunia' luar; organisasi tektual dan institusional hukum. Hukum, sebagai sebuah sistem tanda dan bagian dari tatanan simbolik, mengandung keniscayaan dan fiktif. Tetapi fiksi hukum menjalankan dan mengubah dunia; membantu membangun subjek sebagai subjek yang bebas karena tunduk pada logika institusi'.

Etika dan Keadilan Alteriti

Penulis klasik selalu menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai utama kebajikan, spirit, dan pertimbangan hukum. Suatu konstitusi yang adil itu legitim dan sistem hukum yang adil itu memiliki klaim yang valid terhadap ketaatan warga negaranya. Sejak Aristoteles sampai filsafat politik kontemporer, keadilan selalu dikaitkan dengan hukum dan pengambilan-keputusan hukum. Keadilan telah menjadi dasar, roh, dan tujuan hukum. Tetapi keadilan sesungguhnya adalah sesuatu yang berada di luar atau mendahului hukum – seperti kehendak Ilahi atau ekspresinya dalam alam dan akal, atau sebagai prefigurasi utopia masa depan. Tetapi keadilan pun merupakan tujuan tertinggi hukum dan putusan-putusannya. Dalam arti itu, hukum tanpa keadilan adalah hukum tanpa roh (spirit), sebuah tulisan yang mati, bukan peraturan atau inspirasi.

Jurisprudensi kontemporer sepenuhnya mengidentikan keadilan dengan hukum. Legalitas, negara hukum, imparialitas proses pengadilan, tepat mengikuti prosedur-prosedur formal, merupakan topik-topik utama dalam diskusi tentang keadilan. Hukum dilihat sebagai jawaban utama terhadap bangkitnya otoritas dan poliponi moral masyarakat modern. Filsafat kebebasan (*liberal philosophy*), sebagaimana diinterpretasikan oleh Rawls misalnya, mengasumsikan berbagai *incommensurable* yang luas, atau bahkan konsepsi-konsepsi tentang hidup yang baik dan mencoba menciptakan kerangka kerja sama dimana konflik dapat dikurangi dan individu-individu dapat mengejar tujuan pribadinya. Di tengah tidak adanya visi tentang hidup yang baik yang diterima luas, liberalisme meletakkannya pada prosedur formal: pada hukum positif dan kriteria distribusi sumber daya. Pada hal hukum seharusnya memasukkan pertimbangan nilai sebagai kriteria substantif bagi keadilan guna menjamin moralitas hukum. Hukum menjadi substitusi utama bagi tidak adanya etika dan sisi normatif. Ini adalah dasar bagi klaim jurisprudensi bahwa hukum yang tidak adil pun mungkin harus ditaati sebagai moralitas legalitas yang melampaui ketidakadilan lokal apa pun. Kandungan moral bisa diabstraksikan dari hukum tetapi usaha legal sebagai keseluruhan harus memiliki ciri moralitas.

Dalam dunia hukum, adil dan tidak adil menunjuk pada *fairness*, restorasi keseimbangan dan proporsionalitas dan posisi status quo antar individu. Tapi ini konsepsi terbatas tentang keadilan yang memenuhi kriteria *fairness* tetapi memungkinkan masuknya harapan-harapan atau kepentingan-kepentingan.

Pernyataan Roberto Unger bahwa 'kita dikelilingi ketidakadilan tanpa tahu dimana keadilan itu' merupakan program pendekatan postmodern terhadap keadilan. Teori hukum kontemporer tentang keadilan dianggap keliru bahkan bisa mengarah ke ketidakadilan. Keadilan sebetulnya berkaitan erat dengan dua hal: pertama konsep kritis yang melampaui domain hukum dan kedua, memutuskan ketidakadilannya dengan memperhatikan ciri ketakbisadipertanyaannya hukum dan kekuasaan. Postmodern mengakhirinya dengan mendasarkan tindakan moral pada kognisi, akal budi (*reason*), atau hukum dan menegaskan munculnya kesadaran etis baru. Tetapi menghubungkan kembali etika dan politik, atau keadilan dan hukum, harus melampaui konsepsi baru tentang yang baik, dalam suatu situasi dimana teleologi klasik secara historis dibuang dan transsendensi religius tidak mampu mempengaruhi penerimaan luas.

Menurut kaum postmodern, kita membutuhkan suatu prinsip etis dan teori tentang putusan yang bisa melampaui dan memungkinkan kita mengkritisi praktik-praktik hukum kita sambil menempatkannya dalam sejarah dan pengalaman kita, suatu transsendensi

dalam imanensi, dan bukan sebaliknya seperti moralisme formal Kantian. Seorang penikir yang mencoba merekonseptualisasi keadilan dan putusan menurut versi postmodernis adalah etika Emmanuel Levinas dan kemudian dipopulerkan oleh Jacques Derrida dalam studi hukum.

Levinas berpendapat bahwa filsafat Barat dan etikanya memiliki ciri umum mereduksi jarak antara diri (*self*) dan yang lain (*other*) dan membuat yang berbeda mengikuti yang sama. Filsafat klasik berjanji mengungkapkan struktur realitas dengan menyatakan bahwa realitas *being* mengikuti hukum-hukum keniscayaan teoretis. Dalam modernitas, kesadaran individual menjadi titik tolak penting bagi pengetahuan dan, hasilnya, apa yang berbeda dari diri-yang sama. Yang pertama-tama adalah yang lain. Ia merupakan kondisi eksistensi bahasa, diri, dan hukum. Dalam filsafat alteritas, yang lain tidak boleh direduksi pada diri atau perbedaan pada kesamaan. Tuntutan yang lain yang mewajibkan saya merupakan 'esensi' dari etika alteritas. Tetapi 'esensi' ini didasarkan pada *nonsense* yang lain, ia yang tidak bisa dibalikkan pada keinstanan konsep, aplikasi hukum, atau partikularisasi ego universal. Hubungan atau relasi kita dengan orang lain tidak simetris dan tidak timbal balik karena yang lain itu unik yang menyapa dan 'menuntut' saya. Kesamaan itu bukan *equality* melainkan ketidaksimetrisan absolut.

Hukum dan jurisprudensi mengandung karakter kognitif dan moral ontologi modern. Hukum seolah tahu dunia di luarnya dan merasa bisa mengatur jalannya. Sistem hukum dianggap sebagai sumber niscaya menerjemahkan fenomena non-hukum ke dalam perangkat dan wacana hukum dan menjalankan fungsi regulatifnya. Bagi yurisprudensi modern hukum dan dunia koeksistensif. Salah satu strategi kunci adalah orang hukum (*legal person*). Subjek hukum dan hak dan persetujuan kontraktual menjadi pusat semesta. Kita mengharapkan untuk memperlakukan sesama secara sama, resiprositas dan kewajiban menjadi basis legalitas hukum. Tetapi konsep keadilan sebagai *fairness* harus mereduksi kekonkretan yang lain, ia mesti meminimalisasi perbedaan kebutuhan dan keinginan, dan menekankan kesamaan dan homogen antar subjek. Nilai moral dari tuntutan yang lain untuk mencari dirinya dan yang lain dalam perbedaan dan kekhususnya yang membuat yang lain berada secara konkret.

Hukum dianggap menjamin kesamaan di depan hukum dan menjamin kebebasan semua orang. Tetapi kesamaan itu formal belaka; ia secara niscaya mengabaikan sejarah spesifik orang, motif, dan kebutuhan orang lain. Begitu juga halnya dengan kebebasan hukum: kebebasannya meluhuskan rangkaian hukum legal dan hak-hak, kebebasan menjadi apa yang diatur hukum, berkaitan dengan pilihan yang tidak diijinkan, bahwa ketidaktaatan pada norma hukum itu adalah ketidaktaatan terhadap negara hukum dan bahwa hidup di luar norma hukum itu mesti diakhiri. Norma-norma hukum dan mentalitasnya, menurut Levinas, adalah amoral, asing. Hukum menjanjikan menggantikan tanggungjawab etis dengan aplikasi mekanis yang diinginkan dan peraturan-peraturan yang secara moral netral, dan keadilan dengan administrasi keadilan. Tetapi lebih dari itu, filsafat modern dalam imperialisme ontologisnya menciptakan tatanan yang digeneralisasi. Tetapi subjek hukum, juga merupakan suatu fiksi dan subjek (hukum) natural pun pada akhirnya lebih fiktif dari pada perusahaan. Maka bagaimana kita bergerak dari etika tanggung jawab ke hukum?

Tanggung jawab etis dimulai dengan tuntutan dari seorang yang lain dan menuntut tanggung jawab. Tetapi hukum toh mesti melihat tuntutan dan harapan-harapan pihak ketiga. Keberadaan bersama itu menentukan batas dari tanggung jawab yang tak terbatas. Ketika orang berhadapan dengan hukum, orang sudah terlibat dalam konflik paling kurang dengan satu atau lebih banyak orang dan putusan yang menyeimbangkan konflik sehingga hakim harus melihat dari perspektif litigan, yakni orang ketiga, yang tindakannya menghapus perdebatan dari bidang perdebatan interpersonal dan menempatkannya dalam

batas-batas institusi. Dengan menghadirkan orang ketiga, sehingga hukum dilihat bertindak secara moral. Tetapi hukum membatasi tanggungjawab tak terbatas kita terhadap yang lain.

Kaum postmodern mengehendaki 'hukum yang etis' 'bukan sekedar hukum yang adil'. Keadilan mesti mengambil spirit dari tuntutan moral atau etis. Dan hukum yang etis itu, menurut pandangan Levinas, tidak hendak mentotalisasi atau menyamaratakan begitu saja semua orang melainkan memperlakukan semua orang lain secara lain dalam keberlainannya. 'Suatu tindakan yang adil harus memperlakukan orang lain sama dan simetris berdasarkan norma yang ada tetapi sebagai pribadi setiap orang itu sepenuhnya unik dalam melakukan respon asimetris etis. Keadilan, dengan demikian didasarkan pada pembalikan etis pada yang lain, "it is impossible without the one that renders it finding himself in proximity . . . The judge is not outside the conflict, but the law is in the midst of proximity." Para hakim, lawyer, dan pengajar hukum selalu tertibat dan berimplikasi pada hubungan etis dengan yang lain.

Menurut kaum postmodernis, hukum tidak pernah menjadi kata terakhir. Relasi hukum itu adil kalau ia mengakui 'ketidakmungkinan' yang menjadi tujuan hukum sehingga terus berupaya memperbaikinya. Keadilan adalah sebuah proses. Karena berproses, kita tidak bisa mengatakan 'adil itu X atau Y'. Keadilan adalah suatu tindakan etis-konkret. Keadilan itu bukanlah teori-teori dan kebenaran-kebenaran melainkan suatu keterbukaan tanpa batas pada yang lain secara etis. Connor menegaskan, "*Justice is not about theories and truth, nor does it...ethics is a matter of an indeterminate judgment without criteria, and justice is the bringing together of the limited calculability and determinacy of law with the infinite openness of ethical alterity*".

Menurut Lyotard, kita tidak bisa mengatakan bahwa suatu putusan itu adil. Sebuah putusan bisa diakui sangat berdasarkan pada hukum, sesuai dengan aturan-aturan dan konvensi hukum, tetapi ia tidak bisa dikatakan adil karena keadilan itu merupakan dislokalisasi dari yang "dikatakan" hukum karena ia merupakan tuntutan etis yang tidak sepenuhnya bisa direpresentasikan (dislokasi). Maka Connor menulis, "*For a decision to be just and responsible, it must, in its proper moment if there is one, be both regulated and without regulation: it must conserve the law and also destroy it or suspend it enough to have to reinvent it in each case, rejustify it, at least reinvent it in the reaffirmation and the new and free confirmation of its principle.*" ***

Bab 7

Catatan Kritis tentang Postmodernisme

7.1. Kritik atas Kritik Postmodernisme

Kritik postmodernisme terhadap modernisme yang kelihatannya sangat 'radikal' terutama dalam filsafat di atas (filsafat harus diakhiri dan epistemologi pun harus ditumbangkan!) ternyata di sana sini menuai banyak kritik. Beberapa kritik yang bisa dimunculkan sebagai kritik atas kritik postmodernisme antara lain:

1. Kalau filsafat harus diakhiri dan epistemologi harus ditumbangkan, 'filsafat' kaum postmodernist pun harus dibuang, karena pandangan mereka toh ingin berfilsafat secara baru juga. Jadi postmodernisme sebetulnya ingin menumbangkan sendiri apa yang ingin mereka bangun. Atau dalam bahasa Rosenau, posisi anti filsafat atau anti teori pada pokoknya merupakan suatu posisi filsafat atau teori juga.
2. Postmodernisme membenturkan diri mereka sendiri dengan membahasakan kembali (*relinguishing*) klaim-klaim kebenaran dalam tulisan-tulisan mereka sendiri. Mereka juga mengkritik inkonsistensi modernisme tetapi menolak untuk mengakui norma-norma konsistensi itu sendiri.
3. Penekanan berlebihan pada peran rasio memang meneggelamkan kemampuan lain yang dimiliki manusia di luar rasio. Tetapi menghapus atau menolak sama sekali peran rasio adalah sebuah kemustahilan. Soalnya adalah rasio sendiri dipakai kaum postmodern untuk memperkenalkan dan mengembangkan perspektif mereka. Singkatnya, pemikiran mereka sendiri merupakan kerja rasio. Pemikiran atau argumen apa pun mengandalkan rasio juga.
4. Postmodernisme menekankan intertekstualitas tetapi sering memperlakukan teks sangat isolatif.
5. Dalam bidang kebudayaan, postmodernisme dianggap menyuburkan tribalisme baru dengan menekankan kesadaran akan keunikan dan keunggulan suatu identitas dan kebudayaan lokal yang pada gilirannya memupuk semangat eksklusif. Pada hal Postmodernisme ingin mengembangkan semangat inklusif dan keterbukaan pada keberagaman.
6. Dalam bidang agama, pemikiran postmodern cenderung kembali ke pola berpikir pramodern yang berciri mistik-mistik seperti pada ajaran metafisika *New Age* (fisika baru) dengan semboyan 'holisme' mereka.
7. Kebudayaan modern dari perspektif postmodernisme seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang sudah jadi, stabil, bahkan selesai. Pada hal kebudayaan modern adalah sesuatu yang dinamis, berkembang, berubah. Dan perkembangan lanjutan dari kebudayaan modernisme adalah postmodernisme itu sendiri. Maka postmodernisme sebetulnya bisa dipahami sebagai 'most-modernisme'.
8. Anggapan kaum postmodern untuk menghapus sama sekali fondasi entah dalam bidang pengetahuan, tradisi, atau filsafat, tampaknya merupakan argumen yang juga kurang meyakinkan karena orang toh tidak pernah berpikir berangkat dari nol (termasuk pemikiran kaum postmodern). Pandangan kaum modernislah, yang entah disadari atau tidak, melahirkan (menjadi dasar) pemikiran postmodern. Maka

pandangan tentang 'tidak ada fondasi' sebetulnya tidak berdasar. Mungkin lebih baik mengatakan bukan tidak ada dasar melainkan bahwa dasar atau fondasi itu banyak dan tidak boleh memutlakkan satu dasar saja. Sebab ibarat rumah toh harus ada dasar. Tidak mungkin membangun tembok dan atap tanpa fondasi. Fondasi-fondasi itu entah teori, tradisi, masa lalu, atau pun namanya. Karena orang tidak mungkin berpikir mulai dari nol. Masyarakat, kebudayaan, tradisi, 'yang lain', sudah memikirkan buat kita. Memutuskan mata rantai yang menghubungkan masa kini dengan masa lampau, postmodern dari modern, tradisi yang positif sama dengan bunuh diri secara sosial, intelektual, dan moral. Mungkin posisi 'postmodernisme yang konstruktif' bisa dipertimbangkan.

7.2. Beberapa Kritik Lain

Stefan Morawski, dalam bukunya, *'The Troubles with Postmodernism'* [(1996), 2003] mengkritik postmodernisme dengan mengatakan bahwa konsep postmodernisme tidak menyatakan apa pun kecuali suatu semangat, perangkat, kerja keras dan perwujudan terbaru dari garda-depan. Bahkan postmodernisme dianggapnya berlebihan. Venturi dan Johnson dianggap hanya merasionalisasi apa yang komersial. (Morawski 2003: 103). Persoalan postmodernisme, sesungguhnya terletak pada bagaimana memahami 'modernisme' dan modernitas itu sendiri. Yakni bagaimana menyaring konflik dan dilema yang ada secara inheren dalam perspektif modernis. Singkatnya, postmodernisme hanyalah merupakan garda-depan terbaru yang menghidupi pola-pola klasik dari periode keemasan sebelumnya (1905-30) tetapi justru malah menentangnya. Dalam bidang seni, misalnya, upaya postmodernisme tidak lain dari upaya untuk memperbarui seni dalam warisan dan dinamika modern sendiri. "*They can understand by its meaning pluralism, critical attitude, genuine democracy and many similar phenomena which belong to the modernist heritage and which I endorse*" (Morawski 2003: 104).

Menurut Morawski, karakter majunya kebudayaan postmodern tidak bisa dimengerti lepas dari perkembangan masyarakat konsumen (Morawski 2003: 105). Kita hidup dalam perkampungan global. Sejumlah ide-ide postmodern begitu cepat diterima dan dimodifikasi dalam bentuk tertentu. Perkembangannya bersamaan dengan munculnya gerakan solidaritas yang memupuk energi-energi kreatif dalam persoalan patriotik dan religius. Tetapi menurut Morawski, apa yang dicapai postmodern hanyalah sebuah imitasi; sebuah upaya untuk membuktikan bahwa ia sesuai dengan standar Barat; sebuah upaya untuk memantulkan prestasi-prestasi asing dengan harapan-harapan domestik.

Morawski menegaskan bahwa postmodernisme sebetulnya tidak lain dari upaya menghidupkan kembali *avant-garde* dengan melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas anti-seni. Dalam arsitektur muncul trend revivalisme, untuk kembali ke jantung dan bentuk-bentuk natif tradisional yang membuat gedung dan ruang kehidupan menjadi *homely*. Tetapi revivalisme itu bukanlah ciri konstruktif dari usaha postmodernisme. Beberapa karya dari para seniman postmodernis kaya dengan dekorasi, terdiri dari banyak campuran konvensi-konvensi gaya. Para arsitek Polish di Rusia bahkan lebih anti postmodernis dari pada postmodernis. (Morawski 2003: 106).

Tetapi Morawski mengakui bahwa postmodernisme (meskipun ia tidak berorientasi postmodern) mencapai beberapa prestasi penting. Ia menyebut desain Dariusz Kozłowski dan beberapa *blue print* dari Tomasz Turcynowicz dan team mereka. Dalam literatur, ada novel seperti novel Z oleh Mieczysław Porebski mirip dengan masterpiece Eco, *The Name of the Rose*, yang juga ditulis dengan banyak gaya sehingga eklektisisme dan heterogenitas merupakan ikatan yang sangat bebas. Novel Tadeusz Konwicki bahkan dengan narasi yang spesial. Tetap ironis pada dirinya sendiri novel itu tidak memberi ruang bagi pastiche.

Dalam bidang filsafat, menurut Morawski, trendnya kurang menarik perhatian. Di Rusia banyak buku diterbitkan dan disiskusikan dalam seminar. Buku-buku dan esei tentang Derrida memperoleh empati positif dan diminati. Muncul pula sedikit ketertarikan yang meluas pada Rorty dan Lyotard. Bauman dibaca secara luas dan memiliki banyak pengagum. Tetapi tidak banyak publikasi tentang cara postmodern memahami sains (ilmu pengetahuan). Tentu Kuhn, Toulmin, Putnam dan Feyerabend banyak diketahui baik oleh para spesialis di Polandia, tetapi mereka tidak termasuk dalam keluarga postmodernis.

Menurut Morawski, gelombang perkembangan postmodernisme dalam pemikiran pemikir postmodernis tidak memiliki substansi yang menyakinkan. Pemikiran postmodernis tidak lain dari sekedar menekankan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Kadang-kadang, menurut Morawski, penuh dengan kecurigaan, dan aneh karena menentang sekaligus meminati filsafat tradisional. Maka Morawski menyimpulkan bahwa yang terjadi pada postmodernisme, tidak lain dari transformasi gradual dalam kondisi sosial-ekonomi yang membimbing mayoritas masyarakat memikirkan kategori-kategori berdagang, pasar, iklan, barang, dan sebagainya, dan kemudian berkembang luas dalam kesadaran postmodern dan pandangan dunianya. (Morawski 2003: 109).

Menurut Morawski, ideologi postmodernis dekat dengan ideologi sosialis. Postmodernis itu anti-fondasionalis dan menolak filsafat sejarah yang didasarkan pada apa yang disebut Lyotard *grand narasi*. Ini mendorong lahirnya pandangan tentang emansipasi dan utopianisme ke dalam ilusi-ilusi *grand*. Tetapi menurut Morawski, postmodernisme tidak memiliki jasa apa pun karena ia sekedar memperkuat dan memperdalam kesadaran kritis-diri dari kekeliruan era modern. Ia memberikan tenaga baru pada metafilsafat; menyegarkan pengetahuan bahwa seni digerakan oleh arketipe dan topoi; membalikan perhatian pada budaya massa (*strata* yang diselidiki tanpa prasangka dan curiga). Tetapi itu hanyalah sebuah koreksi terhadap kemodernan. Bukan hal yang baru.

7.3. Sumbangan Postmodernisme

Terlalu naif bila pemikiran dan gerakan postmodern dianggap diangkat dan kosong. Bahwa disana sini posisi postmodernisme agak goyah (lihat kritik-kritik di atas), tidak menghilangkan sama sekali sumbangan besar postmodernisme (kebudayaan) dalam pemahaman tentang filsafat, ilmu pengetahuan, kehidupan kehidupan sosial, bahkan juga agama.

Berkaitan dengan filsafat, sebaiknya filsafat tidak lagi dipahami sebagai 'wacana logis ketat transparan' melainkan 'sebuah konstruksi tentatif tentang dunia. Ia tidak seharusnya dilihat sebagai satu-satunya 'pemahaman (pemikiran besar) yang paling mendalam dan menyeluruh' tentang realitas (manusia dan dunia kehidupannya) melainkan sekedar 'refleksi kritis manusia tentang berbagai cara manusia memahami dunianya. Dari perspektif postmodernis-konstruktif-hermeneutis, filsafat adalah refleksi atas aktivitas pemahaman atas dunia dan kehidupan manusia sebagai teks atau wacana yang tidak memiliki makna tunggal melainkan multi makna karena yang berlangsung dalam historiko-kultural tertentu dan oleh karenanya 'terbatas'. Kesadaran atas keterbatasan ini membuka kemungkinan untuk kerja sama dan dialog antar berbagai bentuk pemahaman dan makna.

Berkaitan dengan rasionalitas, kaum postmodernis revisionis tidak menghapus sama sekali peran 'reason' dalam pemahaman. Mereka menegaskan bahwa memang tidak ada standar rasionalitas yang sepenuhnya lepas dari bahasa, kultur, atau konteks-kontes partikular tertentu. Tetapi sebaliknya dibutuhkan pula suatu rasionalitas komunikatif universal (yang serentak didasarkan pada rasionalitas yang terkandung dalam bahasa dan kultur tersebut) yang memungkinkan dicapainya dialog dan pemahaman timbal balik.

Kebenaran yang satu, universal, mutlak, dan tak tergoyahkan memang patut dipertanyakan kembali. Apalagi apa yang kita anggap sebagai kebenaran yang universal dan mutlak sekarang ini adalah hasil dari konsensus, koherensi, maupun konvensi di masa

lalu yang terus dipertahankan yang dalam kurun waktu yang begitu lama sehingga berubah menjadi 'rejin' super power yang merindas. Namun kelemahan ini selalu menuntut munculnya idealitas-normatif yang 'abstrak' (entah 'akseptabilitas rasional yang diidealkan' atau 'komunitas komunikatif ideal') yang terbentuk melalui pengambilan jarak kritis terhadap konsensus atau konvensi untuk menunjukkan kesementaraan dan keterbatasannya sehingga tidak menjadi super power. Namun kenyataan 'pada diri sendiri', apalagi yang ekstralinguistik, tak pernah persis kita ketahui. Inilah batas horison kita.

Dengan model kebudayaan postmodern, terutama dalam bidang politik, hak-hak kaum minoritas dan tertindas seperti perempuan, dunia ketiga, dan kulit hitam terus disuarakan. Visi tentang kebebasan, kesamaan, pluralitas, multikulturalitas, merupakan sumbangan besar pemikiran postmodernisme. Dengan postmodernisme, kita bisa mengajukan pertanyaan kritis: apakah Christopher Colombus adalah seorang pahlawan (hero) atau pembuka jalan bagi imperialis Barat? Apakah kebudayaan barat lebih superior dari kebudayaan lain? Apakah liberalisme, pasar bebas, teknologi, dan kosmopolitanisme – sebagai prestasi sosial – dapat dinikmati oleh semua kebudayaan, terutama non-Barat? Unsur kekuasaan, manipulasi, dan represif dalam ilmu pengetahuan juga harus diperhatikan.

Dalam bidang pengetahuan kesadaran bahwa tidak ada satu metode ilmu (baca: ilmu-ilmu alam) yang dapat diterapkan pada semua bidang pengetahuan, tidak ada satu kebenaran tunggal dan universal, bahkan tidak ada satu instansi pun yang bverdaulat menentukan kebenaran dan menjadi sumber norma-norma ilmu, merupakan sumbangan besar postmodernisme. Peran sentral ilmu pengetahuan dan teknologi memang harus di pertanyakan. Melalui postmodernisme kita semakin sadar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dengan sendirinya membuat dunia menjadi sehat, lebih bersih, dan lebih produktif. Sebaliknya, selubung elitisme, seksisme, kekuasaan, dan destruksi harus terus diwaspadai.

Dalam agama, berkaitan dengan kritik postmodern, orang beragama seharusnya semakin sadar bahwa tidak ada satu agamapun yang memonopoli semua kebenaran. Dalam kehidupan sosial yang semakin plural, fundamentalisme agama sangatlah tidak fundamen. Agama jangan dipakai sebagai dasar, tolok ukur, patokan dalam relasi sosial. Sebaliknya agama harus ditempatkan sebagai keyakinan pribadi. Di samping itu, teologi dalam agama pun bersifat 'perspektival'.***

Daftar Pustaka

- Adorno, Theodor and Max Horkheimer 1997, *Dialectic of Enlightenment*, Trans. by John Cumming, London: Verso.
- Agger, Ben 2009, *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan dan Implikasinya*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Nurhadi dari judul asli *Critical Social Theory: An Introduction*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Appadurai, A. 1996, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Andersen, Robin 1995, *Consumer Culture and TV Programming*, Boulder: Westview Press.
- Aronson, Elliot 2007, *The Social Animal*, 10th Edition, New York: Worth Publishers.
- Baudrillard, Jean 1998, *The Consumer Society*, London: Sage.
- _____. 1996, *The System of Objects*, Trans. by James Benedict. London: Verso.
- Bauman, Zygmunt 1998, *Globalization: The Human Consequences*, New York: Columbia University Press.
- Bauman, Zygmunt 2004, *Liquid Modernity*, Cambridge: Polity Press.
- _____. 1998, *Postmodernity and Its Discontents*, Cambridge: Polity Press.
- Belk, R.W. 1995, *Collecting in a Consumer Society*, London: Routledge.
- Belk, Russel 2004, "The Human Consequences of Consumer Culture" dalam Ekström, Karim M. and Brembeck, Helena (eds.), *Elusive Consumption*, Oxford-New York: Berg. hlm. 67-85.
- Bennett, Jane 2001, *The Enchantment of Modern Life: Attachments, Crossings and Ethics*, Princeton: Princeton University Press.
- Bennett, T. 2007, "Making Culture, Changing Society", dalam *Cultural Studies*, 21(4-5): pp. 610-629.
- Bertens, Hans 1995, *The Idea of The Postmodern*, London and New York: Routledge.
- Beville, Maria 2009, *Gothic-Postmodernism: Voicing the Terrors of Postmodernity*, Amsterdam - New York: Rodopi.
- Boyd, Robert & Richerson, Peter J. 2005, *The Origin and Evolution of Cultures*, Oxford: Oxford University Press.
- Buber, M. 1947 (1973), *Between Man and Man*, London: Collins.
- Budiman, Hikmat 2002, *Lubang Hitam Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Butler, Christopher 2002, *Postmodernism: A Very Short Introduction*, Oxford - New York: Oxford University Press.
- Campbell, Colin 2004, "I Shop therefore I Know that I Am: The Metaphysical Basis of Modern Consumerism" dalam Ekström, Karim M. And Brembeck, Helena (eds.), *Elusive Consumption*, Oxford-New York: Berg, hlm. 27-44.
- Caputo, John D. and Michael J. Scanlon 1999, *God, The Gift and Postmodernism*, Bloomington: Indiana University Press.
- Connor, Steven (ed.) 2004, *The Cambridge Companion to Postmodernism*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook, Guy 1992, *The Discourse of Advertising*, London: Routledge.
- Cross, Gary 2000, *An All-Consuming Century: Why Commercialism Won in Modern America*, New York: Columbia University Press.
- Dant, T. 1999, *Material Culture in the Social World*, Buckingham: Open University Press.
- Daylight, Russel 2008, 'The Language of Postmodern Space', dalam *Philament Habit & Habitat*, June [2008], hlm. 1-21.
- Debord, Guy 1995, *The Society of the Spectacle*, Trans. by Donald Nicholson-Smith. New York: Zone Books.

- Dichter, Ernest 2002, *The Strategy of Desire*, New Brunswick: Transaction Publishers.
- Eagleton, Terry 1997, *The Illusions of Postmodernism*, Oxford: Blackwell Publishers.
- Ekström, Karim M. and Brembeck, Helena (eds.) 2004, *Elusive Consumption*, Oxford-New York: Berg.
- Elliot, Richard 2004, "Making Up People: Consumption as a Symbolic Vocabulary for the Construction of Identity" dalam Ekström, Karim M. And Brembeck, Helena (eds.), *Elusive Consumption*, Oxford-New York: Berg. Pp. 129-143
- Ermath, Elizabeth Deeds 2000, 'Postmodernism', dalam *Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy*, London and New York: Routledge.
- Ewen, Stuart and Elizabeth Ewen 1982, *Channels of Desire*, New York: McGraw-Hill.
- Featherstone, M. 1991, *Consumer Culture and Postmodernism*, London: Sage.
- Featherstone, M., Lash, S., & Robertson R. 1995, "Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity" dalam *Global Modernities*, 3, 75-76.
- Featherstone, M. 1996, *Localism, Globalism, and Cultural Identity*, Durham, NC: Duke University Press.
- Forsyth, T. 2011, *Global Environmental Problems and Politics*, London: University of London.
- Foucault, Michel 1999, *Religion and Culture*, New York: Routledge.
- Fowles, Jib 1996, *Advertising and Popular Culture*, London: Sage.
- Frankl, V. 1970, *The Will to Meaning*, New York: New American Library.
- Fromm, E. 1942, *Escape from Freedom*, New York: Harper & Row.
- Fuchs, Stephan 2001, *Against Essentialism, A Theory of Culture and Society*, Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press.
- Gartman David 1998, 'Postmodernism, or Cultural Logic of Post-Fordisme', dalam *The Sociological Quarterly*, Vol. 39, No. 1 [1998], hlm. 119-137.
- Giddens, Anthony 2011, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Nurhadi dari judul asli *The Consequences of Modernity* [2004], Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Grant, Iain Hamilton 1999, 'Post-Modernism: Lyotard and Baudrillard', dalam Glendinning, Simon (ed.), *The Edinburgh Encyclopedia of Continental Philosophy*, Chicago-London: Fitzroy Dearborn Publishers.
- Griffin, David Ray (ed.) 2005, *Visi-Visi Postmodern: Spiritualitas dan Masyarakat*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh A. Gunawan Admiranto dari judul asli *Spirituality and Society: Postmodern Visions* [1988], Yogyakarta: Kanisius.
- Grenz, Stanley J. 2001, *Pengantar Untuk Memahami Postmodernisme*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Wilson Suwanto dari judul asli *A Primer on Postmodernism* [1996], Yogyakarta: Andi Offset.
- Hancock, Philip (at. all) 2000, *The Body, Culture and Society, An Introduction*, Buckingham-Philadelphia: Open university Press.
- Hardiman, F. Budi 2009, *Demokrasi Deliberatif*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. Budi, 2003, *Melampaui Modernitas dan Positivisme*, Yogyakarta: Kanisius.
- Harvey, David 1990, *The Condition of Postmodernity: An enquiry into the Origins of Cultural Change*, Cambridge, MA.: Blackwell.
- Hassan, Ihab 2011, *From Postmodernism to Postmodernity: the Local/Global Context*, diunduh 10 Nopember 2011 dari http://www.ihabhassan.com/postmodernism_to_postmodernity.htm
- Hidayat, Medhy Aginta 2012, *Menggugat Modernisme: Mengenali Rentang Pemikiran Postmodernisme Jean Baudrillard*, Yogyakarta: Jalasutra.
- Heryanto, Ariel 1994, 'Postmodernisme: Yang Mana? Tentang Kritik dan Kebingungan Dalam Debat Postmodernisme di Indonesia' dalam *Jurnal Kebudayaan Kalam*, Edisi 1 [1994], Jakarta.
- Jacobs, Mark D. and Hanrahan, Nancy Weiss (ed.) 2005, *The Blackwell Companion to*